



P U T U S A N

Nomor 1280 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AGUSTINUS HUTABARAT, S.E.;**
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/20 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lumba-lumba Nomor 11 A, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
4. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. dengan Nomor induk Pegawai (NIP) 19720820199995031001, pangkat Penata (III/c), jabatan

Hal.1 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pj. Kepala Bidang Asset dan Investigasi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor 900/87/2011 tanggal 11 April 2011 menetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas PKAD Kota Sibolga Nomor 900/2284/2011 tanggal 17 Juni 2011 pada kegiatan pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor, perluasan gedung kantor pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Tahun Anggaran 2011, secara bersama-sama dengan Saksi RUDY AZHARI, S.E. selaku wakil direktur CV. YUDDI AGUNG yang bertindak sebagai penyedia barang dan jasa (yang dituntut secara terpisah dalam perkara yang sama) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti antara bulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Sibolga, yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 huruf (a) dan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp175.373.635,40 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah empat puluh sen), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2011 sebagaimana tertuang dalam mata anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 adanya kegiatan program peningkatan sarana dan prasarana aparat, kegiatan pembangunan gedung kantor dengan kode 1.20.1.20.05.02.015 dengan uraian belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor, perluasan gedung kantor dengan kode rekening 5.2.3.26.01 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya diubah dan disahkan menjadi

Hal.2 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.341.900.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Saksi Drs. Soritua Hasibuan meminta bantuan Saksi Ir. Fachri Lubis selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga secara lisan untuk membuat desain/gambar dan RAB untuk pekerjaan tersebut selanjutnya Saksi Ir. Fachri Lubis memerintahkan Saksi Goldstar Lumban Tobing selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk membantu, berdasarkan hasil (Rincian Anggaran Pembangunan) RAB untuk pekerjaan pembangunan gedung dalam hal ini penambahan ruang kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp1.257.732.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2011 Saksi Ir. Rizal Fachri Lubis selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga melalui Surat Keputusan Nomor 800/113-A-DPUK/2011 mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011 dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor 600/165/2011 tanggal 17 Juli 2011 tentang Pengangkatan personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2011 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Panitia
1	Basarulla Lubis	Sekretaris Dinas Pekerja Umum Kota Sibolga	Ketua Merangkap Anggota
2	Delima Napitupulu, S.T.	Kasi Data Pengawas Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga	Anggota
3	Oesman Hasibuan	Kabid Penyehatan Lingkungan Perumahan dan Pertambangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga	Anggota
4	Sarmadan Harahap, S.T.	Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga	Anggota
5	Bahani Indah Hapsari, A.md	Staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga	Anggota
6	Sekretaris		
	a) Ora ola Lina Manurung, M.T.	Staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga	Staf Sekretariat
	b) James Parulian	Staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga	Staf Sekretariat
	c) Tulus Tumpal Panggabean	Staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga	Staf Sekretariat
	d) M. Rani Hutagalung	Staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga	Staf Sekretariat

Hal.3 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, Saksi Drs. Soritua Hasibuan mengirim Surat Nomor 900/2287/2011 kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk meminta bantuan Panitia Pengadaan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk melaksanakan pelelangan atas kegiatan proyek pembangunan Kantor Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011.

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, ULP Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011 melaksanakan pelelangan melalui pelelangan umum dengan pasca kualifikasi Nomor 004/ULP/DPUK/2011 di antaranya paket pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga dengan nilai RAB Rp1.257.732.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Berdasarkan daftar rekanan yang mengambil dokumen kualifikasi yang ditandatangani oleh ULP Barang/Jasa Tahun 2011 Saksi BARARULAN LUBIS, Saksi OESMAN HASIBUBUAN, Saksi SARMADAN HARAHAHAP, S.T. dan Saksi BAHANI INDAH, A.Md terdapat 11 (sebelas) perusahaan yaitu:

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA PENDAFTAR
1	CV. CITRA BIRU	BOY ALEXANDER . P. SIMATUPANG
2	CV. YUDDI AGUNG	RAHMAT SALEH SIMANJUNTAK
3	CV.WAHANA KARYA INDONESIA	IIHAM SIGALINGGING
4	CV. SURYA INDONESIA BARU	DAHNIATY MARBUN
5	CV.TRI MITRA PERKASA	ADE PAHALA PANGARIBUAN
6	CV. DAYA CONTRUKSI	INDRA FLANTURI NASUTION
7	CV. BIMA SURYA	CHARLES PARDEDE
8	PT. ERATAMA PUTRA PERKASA	ASMU'I-AR
9	CV. YAKIN JAYA	IRWANTO NAINGGOLAN
10	CV. MILENIUM 2011	ERNAT SILALAH
11	CV. ELLATEC DWIDAYA	ILHAM HIDAYAT TANJUNG

Kemudian pada tanggal 8 Juli 2011 Pukul 10.00 WIB dilakukan pembukaan dokumen penawaran dari penyedia jasa sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 009/ULP/DPUK/2011 yang disaksikan oleh perwakilan LSM Perkasa yaitu Saksi Binsar Simatupang dan Calon Penyedia Barang yaitu CV. Hotma, dimana terdapat 8 (delapan) perusahaan penawar yaitu:

					Dokumen Penawaran Teknis					
No	Nama Perusahaan	Jaminan Penawaran Asli	Daftar Kuantitas Harga	Surat Kuasa	Metoda Pelaksanaan	Jadwal Waktu Pelaksanaan	Spesifikasi Teknis	Daftar Personil	Jenis Kapasitas dan Jumlah	Dokumen Kualifikasi

Hal.4 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									Per alat an Uta ma	
1	CV. Wah ana Kary a Indo nesi a	V	v	v	v	v	v	---	---	v
2	CV. Mar uli Asi	V	v		v	v	v	v	v	v
3	CV. Yud di Agu ng (Pe men ang)	V	v		v	v	v	---	---	v
4	CV. Sury a Indo nesi a Baru	V	v		v	v	v	---	---	v
5	CV. Kurn ia	V	v		v	v	v	v	v	v
6	CV. Citra Baru	V	v		v	v	v	v	v	v
7	CV. Mub di R.N.	V	v		v	v	v	v	v	v
8	CV. Ellat ec Dwid aya	V	v		v	v	v	v	v	v

Hal.5 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juli 2011, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011 melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penerima barang/jasa dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama penyedia	Hasil Evaluasi					Keterangan
		Koreksi Aritmetika	Administrasi	Tekniks	Harga	Kualifikasi	
1.	CV. Ellatec Dwidaya	Lulus (Rp1.126.915.000)	Lulus	Lulus	Tidak Lulus	-	Harga satuan pekerjaan pada daftar harga dan analisa perhitungan untuk keramik setara roman ukuran 20x20 cm, 20x25 cm, dan 40x 40 cm dianggap terlalu dipaksakan sehingga tidak akan mungkin dapat direalisasikan untuk memenuhi seperti yang diajuhkan dalam penawaran
2.	CV. Mubdi R.N	Lulus (Rp1.141.063.000)	Tidak Lulus	-	-	-	Alamat tujuan jaminan penawaran tidak sesuai
3.	CV. Citra Baru	Lulus (Rp1.015.210.000)	Lulus	Lulus	Lulus	Tidak Lulus	Tidak ada melampirkan surat keterangan Fiskal
4.	CV. Kurnia	Lulus (Rp1.137.594.000)	Lulus	Lulus	Lulus	Tidak Lulus	Tidak ada melampirkan surat keterangan Fiskal (SKF) pada dokumen

Hal.6 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							kualifikasi
5.	CV. Wahana Karya Indonesia	Lulus (Rp1.245.095.000)	Tidak Lulus	-	-	-	Surat penawaran tidak bernomor dan jangka waktu pelaksanaan (180 hari) tidak sesuai dengan dokumen lelang (150 hari)
6.	CV. Surya Indonesia Baru	Lulus (Rp1.246.184.000)	Tidak Lulus	-	-	-	Surat penawaran tidak bernomor dan jangka waktu pelaksanaan (180 hari) tidak sesuai dengan dokumen lelang (150 hari)
7.	CV. Maruli Asi	Lulus (Rp1.065.174.000)	Tidak Lulus	-	-	-	Jangka waktu pelaksanaan (180 hari) & Nilai Jaminan Penawaran tidak sesuai dengan dokumen lelang
8.	CV. Yuddi Agung	Lulus (Rp1.244.057.000)	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	(Pemenang)

Bahwa dalam melakukan evaluasi ULP Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011 menggunakan sistem ambang batas dalam evaluasi teknis sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan, namun ULP barang/jasa Tahun Anggaran 2011 tidak menentukan tentang berapa nilai ambang batas yang dapat lulus dalam evaluasi teknis di dokumen pengadaan dan mengenai bobot penilaian dalam evaluasi teknis tidak ditetapkan dalam dokumen pengadaan hal tersebut merupakan kesepakatan tak tertulis dari pihak ULP barang/jasa Tahun Anggaran 2011 selanjutnya ULP barang/jasa Tahun Anggaran 2011 tidak

Hal.7 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan konfirmasi tertulis terkait keabsahan/keaslian jaminan penawaran yang mana hal tersebut merupakan kelalaian dari ULP barang/jasa 2011 karena dengan adanya materai yang tertera dalam jaminan penawaran maka jaminan penawaran tersebut telah sah dan terkait dokumen jadwal waktu pelaksanaan yang ditawarkan oleh CV. YUDDI AGUNG Rudy Azhari adalah 6 (enam) bulan, melebihi batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP yaitu 150 hari kalender. ULP terfokus pada surat penawaran sehingga ULP tidak meninjau waktu pelaksanaan dari CV. YUDDI AGUNG serta tidak melakukan pengecekan personil serta daftar peralatan utama dalam dokumen penawaran, seharusnya CV. YUDDI AGUNG tidak lulus dalam pelelangan ini hal ini merupakan kesalahan evaluasi administrasi yang dilakukan oleh ULP penyedia barang/jasa Tahun Anggaran 2011.

Bahwa Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. selaku PPK tidak ada menyusun dan menetapkan HPS dan membuat spesifikasi teknis, gambar serta rancangan kontrak kepada panitia pengadaan sehingga panitia lelang tidak dapat melaksanakan tugasnya secara baik. Perbuatan Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. yang tidak memedomani Surat Keputusan Nomor 900/2284/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen serta Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 11 Ayat 1 huruf a, di mana HPS dan spesifikasi teknis tersebut akan dipergunakan oleh Panitia ULP dalam menentukan pemenang lelang sesuai dengan Pasal 17 Ayat 2 huruf f sebagaimana Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Namun pada tanggal 27 Juli 2011, ULP Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, membuat berita cara hasil pelelangan (BAHP) Nomor 012/ULP/DPUK/2011, yang menyimpulkan, bahwa penyedia jasa untuk ditetapkan sebagai calon pemenang adalah CV. Yuddi Agung selanjutnya dibuatlah Berita Acara Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 013/ULP/DPUK/2011, menetapkan CV. Yuddi Agung sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang kantor Dinas PKAD Kota Sibolga dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp1.244.057.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah) yang selanjutnya dilakukan pengumuman pada tanggal 28 Juli 2011 dengan Surat Nomor 014/ULP-DPUK/2011.

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011, Saudara M. Rizal Rusli selaku Direktur CV. Ellatec Dwidaya mengajukan sanggahan pengumuman melalui Surat Nomor 14/CV.EDD/Sanggah/VIII/2011 perihal Sanggahan Pengumuman

Hal.8 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini yang pada pokoknya menyatakan terdapat selisih harga yang sangat signifikan antara nilai yang diajukan oleh CV. Ellatec Dwidaya sebesar Rp1.140.355.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan nilai penawaran yang diajukan oleh CV. Yuddi Agung sebesar Rp1.244.057.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2011, unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun anggaran 2011 melalui Surat Nomor 021/ULP/DPUK/201 perihal Jawaban atas Sanggahan Pengumuman Nomor 014/ULP-DPUK/2011 kepada Direktur CV. Ellatec Dwidaya yang menjelaskan bahwa penawaran dari CV. Ellarec Dwidaya terlalu dipaksakan, di mana pada daftar harga dan analisa perhitungan tercantum harga 1 M2 keramik setara Roman untuk 20 X 20 cm untuk lantai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), keramik setara Roman untuk 20 X25 untuk dinding Rp3.900,00 (tiga ribu sembilan ratus rupiah), keramik setara Roman untuk 40 X40 cm adalah Rp12.800,00 (dua belas ribu delapan ratus rupiah). Menurut ULP, harga yang ditawarkan CV. Ellatec Dwidaya tersebut tidak akan dapat direalisasikan apabila harus memenuhi setara dengan Roman yang diajukan.

Bahwa pada satu hari sebelumnya pada tanggal 3 Agustus 2011 Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011, melalui Surat Nomor 01/UND/PPK-DPKAD/VIII/2011 mengundang CV. Yuddi Agung untuk menghadiri pengambilan SPPBJ dan Rapat Prakontrak yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2011, adapun hasil Rapat Pra Kontrak antar Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. dan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pra-Kontrak Nomor 01/RPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 antara lain:

- a) Waktu pelaksanaan pekerjaan disepakati selama 143 hari sejak diterbitkannya surat perintah mulai kerja (SPMK);
- b) Jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari harga kontrak diterbitkan oleh bank atau asuransi suretye bond dengan format disesuaikan dengan penerbit jaminan tersebut di atas;
- c) Setiap harinya penyedia jasa harus membuat catatan harian yang diketahui oleh pengawas pekerjaan;
- d) Semua ketentuan dan persyaratan dalam dokumen kontrak mengikat, namun apabila pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan ditemukan

Hal.9 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



saran dan masukan dari pejabat membuat komitmen serta disepakati untuk menjadi ketentuan, maka dinyatakan berlaku.

Bahwa tindakan Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. yang menerbitkan SPPBJ pada tanggal 02 Agustus 2011 dalam masa sanggahan, telah menyalahi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 62 Ayat 2 huruf d yaitu: "masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding".

Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011 Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 dan Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG serta diketahui Saksi Drs. Soritua Hasibuan selaku Kepala Dinas PKAD Sibolga menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Nomor 01SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 dengan total harga kontrak sebesar Rp1.244.057.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 9 Agustus 2011 Saksi Rudy Azhari selaku Wakil Direktur CV. Yuddi Agung menyerahkan Sertifikasi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 12.06.05.2011.0030 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja Putra Cabang Sumatra Utara dengan nilai jaminan sebesar Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta rupiah dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 01/SPMK/PPK-DPKAD/VIII/2011.

Bahwa sebelumnya Kepala Dinas PKAD Kota Sibolga atas nama Drs. Soritua Hasibuan menyampaikan perubahan item pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 kepada Saksi Rudi Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG berupa perubahan fungsi ruang, tampak bangunan, tangga, dll kemudian dalam perubahan ini Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK menyetujuinya lalu memerintahkan Saksi Rudi Azhari, S.E. untuk membuat surat permohonan tambah kurang atau CCO atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang kantor dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011.

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 Saksi Rudi Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG melalui Surat Nomor 01/CV.YA/VIII/2011 perihal permohonan pekerja tambah kurang CCO kepada PPK Dinas PKAD Kota Sibolga mengajukan permohonan pekerja tambah kurang pekerjaan

Hal.10 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 di dalam surat permohonan tersebut disebutkan bahwa alasan permohonan alasan pekerjaan tambah kurang atau CCO adalah terjadi perubahan pekerjaan dari perencanaan awal karena adanya perubahan fungsi ruang, tampak bangunan, tangga, dll.

Berdasarkan laporan harian pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh Yovi Ansyah Putra, S.T. selaku tenaga teknik dari kontraktor pelaksana CV. YUDDI AGUNG dan diperiksa dan ditandatangani oleh Saksi Kariaman Waruwu selaku pengawas lapangan pelaksana pekerjaan pembangunan gedung kantor dhi penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 dimulai sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan selesainya tanggal 22 Desember 2011.

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Saksi Adiram Ompusunggu, S.T. selaku Direksi Teknis melalui Surat Nomor 01/P-CCO/2011 perihal Penyampaian Revisi Perhitungan Anggaran, menyampaikan rincian perhitungan anggaran dan gambar desain baru atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dhi penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 kepada PKK Dinas PKAD Kota Sibolga, begitu juga dengan tenaga teknis CV YUDDI AGUNG atas nama Yovi Ansyah Putra, S.T. telah membuat kontrak Cange Order atau CCO pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 yang mana kontrak Cange Order tersebut Saksi Kariaman Waruwu selaku Pengawas Lapangan dan diketahui oleh Adiram Ompusunggu selaku teknis serta disetujui oleh Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG dan Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 dan dari rincian perubahan volume item pekerjaan tambah kurang (CCO) tersebut diperoleh hasil penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume sebelum CCO	Harga Sebelum CCO (Rp)	Pekerjaan Tambah (Kurang)	Volume setelah Cco	Harga setelah CCO (Rp)
A	Pekerjaan Pendahuluan						
1	Pekerjaan Pembongkaran bangunan	-	1.00	5.750.000,00	-1.00	-	-

Hal.11 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lama						
2	Pekerjaan Pembongkara n Beton/Pas Batu bata	M2	-	-	189.65	189,65	16.897.346,65
3	Pekerjaan Pembongkara n rangka atap kayu dan atap seng	-	-	-	1.00	1.00	4.500.000,00
4	Pengukuran dan Pemasangan Bauwplank	M	118.00	5.770.200,00	-	118.00	5.770.200,00
5	Membuang bekas bongkaran	-	-	-	1.00	1.00	2.250.000,00
6	Papan Nama Proyek	-	1.00	300.000,00	-	1.00	300.000,00
B	Pekerjaan Tanah						
1	Pekerjaan galian tanah pondasi	M3	28.22	1.357.777,08	-10.94	17.28	831.409,92
2	Pekerjaan urukan tanah kembali	M3	8.47	135.841,46	-3.44	5.03	80.640,86
3	Pekerjaan urukan Pasir di bawah pondasi T=10 cm	M3	8.88	930.108,96	-0.29	8.59	899.786,15
4	Pekerjaan timbunantanah menurut trap elevasi	M3	18.30	1.523.255,40	-18.30	-	-
5	Pekerjaan Cerocok kayu @15cm= 2,50 m	M	378.00	33.073.877,34	-54.00	324.00	28.349.037.72
6	Pekerjaan lantai kerja tapak/sloop 1:3:5 T 10 cm	M3	2.02	1.353.337,42	1.00	3.02	2.021.966,50
7	Pekerjaan Beton Rabat 1:3:5	M3	-	-	5.90	5.90	3.952.817,22

Hal.12 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.	Lantai Dasar						
	C1 Pekerjaan						
	Beton						
1	Pekerjaan Pondasi Tapak beton Bertulang Cor 1 : 2 : 3	M3	5.04	15.571.427,56	-0.72	4.32	13.346.937,91
2	Pekerjaan sloop cor 1:2:3: 20 X 50	M3	7.05	18.611.255,38	-0.60	6.45	17.027.318,75
3	Pekerjaan sloop cor 1:2:3 15 X20	M3	-	-	0.32	0.32	973.776,864
4	Pekerjaan stik kolom beton bertulang cor 1:2:3	M3	0.66	4.568.396,68	-0.10	0.56	3.893.519,90
5	Pekerjaan kolom struktur 1:2:3 @ 30 cm	M3	0.54	3.455.888,01	-0.54	-	-
6	Pekerjaan kolom struktur 1:2:3 @ 40 cm	M3	-	-	0.50	0.50	3.225.495,48
7	Pekerjaan kolom struktur A cor 1:2:3 , 0.30 X0.30	M3	2.25	14.358.698,91	0.99	3.24	20.676.526,43
8	Pekerjaan kolom struktur B cor 1:2:3 0,30 X0,30	M3	0.30	1.269.846,01	-0.30	-	-
9	Pekerjaan kolam praktis 15 X 15 cm	M3	0.10	419.119.09	0.24	0.34	1.414.526,93
10	Pekerjaan balok 0,20 X 0.50 cor 1:2:3	M3	6.12	35.173.494,18	-0.37	5.75	33.065.383,45
11	Pekerjaan balok 0,20 X0,25 cor 1: 2 : 3	M3	0.75	4.706.885,67	1.09	1.84	11.552.580,19
12	Pekerjaan plat lantai cor 1:2:3	M3	19.07	111.076.909,6 2	-5.27	13.80	80.399.995,10
13	Pekerjaan tangga beton cor 1:2:3	M3	1.08	5.187.861,83	-1.08	-	-
	C2 Pekerjaan						

Hal.13 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dinding dan Pasangan						
1	Pondasi batu bata camp 1 : 2	M2	26.07	2.29.784,04	-7.47	18.60	1.640.099,08
2	Pas dinding batu camp 1 : 4	M2	135.54	10.619.240,48	-9.72	125.82	9.857.701,32
3	Plesteram camp 1 : 2 pada pondasi batu bata	M2	45.39	1.991.511,67	-23.07	22.32	979.302,50
4	Plesteram camp 1 : 4 untuk dinding batu bata	M2	271.08	10.505.092,76	-19.44	251.64	9.751.739, 49
	C3 Pekerjaan kayu/konsen/pintu/Jendela/kaca						
1	Kosen pintu/Jendela kayu kapur	M3	0.98	6.966.084,51	0.11	1.09	7.747.991,96
2	Pemasagan pintu panil kayu	M2	6.72	2.942.533,44	5.04	11.76	5.149.433,52
3	Jendela panel kaca	M2	11.52	4.970.149,63	2.76	14.28	6.160.914,65
4	Pemasangan kunci tanam pada daun pintu	Set	3.00	346.777,20	4.00	7.00	809.146,80
5	Pasangan engsel pintu	Bh	9.00	201.366,00	12.00	21.00	469.854,00
6	Pasangan grendel pintu	Bh	3,00	54.021,42	4.00	7.00	126,028,98
7	Pasangan hendel daun pintu	Bh	3,00	55.242,00	4.00	7.00	128.898,00
8	Pasangan engsel Jendela	Bh	32.00	519.552,00	4.00	36.00	584.496,00
9	Pasangan grendel Jendela	Bh	16.00	177.186,24	2.00	18.00	199.334,52
10	Pasangan hak angin jendela	Bh	32.00	1.096.128,00	4.00	36,00	1.233.144,00
11	Pasangan hendle Jendela	Bh	16.00	294.624,00	2.00	18.00	331.452,00

Hal.14 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	C4 Pekerjaan Lantai						
1	Pemasangan kramik (lantai) ukuran 40 X40 cm	M2	88.50	13.714.077,71 1	15.76	104,26	16.156.268, 27
2	Pemasangan kramik (tangga) 40 X 40 cm	M2	7.56	1.171.507,65	-7.56	-	-
3	Pemasangan kramik lantai ukuran 20 X20 cm	M2	3.60	488.638,98	-3.60	-	-
4	Pemasangan kramik (dinding) ukuran 20 X 25 cm	M2	18.36	3.243.417,56	-18.36	-	-
5	Bon-Bon keramik	M	4.10	101.024,00	-	4.10	101.024,00
	C5 Pekerjaan langit-langit/plafond						
1	Plafond gypsun tebal 9 mm + rangka hollow	M2	100.50	10.222.912,26	-15.00	85,50	8.697.104,46
2	Pemasangan list plafond gypsun	M	91.50	2.398.850,01	-20.00	71.50	1.874.511,21
	C6 Pekerjaan Instalasi air/sanitasi						
1	Pemasangan kloset jongkok	Bh	1.00	1.020.994,50	-1.00	-	-
2	Pemasangan kran air	Bh	1.00	29.898,00	-1.00	-	-
3	Pemasangan floord drain	Bh	1.00	40.642,40	-1.00	-	-
4	Bak air fiber glass	Bh	1.00	856.587,60	-1.00	-	-
5	Pemasangan Jaringan pipa air bersih dia ¾	M	18.00	538.164,00	-18.00	-	-
6	Pemasangan jaringan pipa	M	25.00	8.043.477,75	-25.00	-	-

Hal.15 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	air kotor 4						
7	Pemasangan jaringan pipa air bersih 3 inci	M	40.00	8.879.864,40	-40.00	-	-
8	Pembuatan Septictank	Bh	1.00	3.555.621,901	-1.00	-	-
	C7 Pekerjaan instalasi listrik/penerangan						
1	Pemasangan kabel untuk titik-titik api	Tik	49.00	4.802.490,00	-27.00	22.00	2.156.220,00
2	Pemasangan armature down light	Bh	32.00	2.077.360,00	-10.00	13.00	1.174.160,00
3	Pemasangan fitting plafond	Bh	21.00	646.968,21	-16.00	5.00	154.040,05
4	Pemasangan bola lampu SLE 18 watt	Bh	44.00	1.330.758,44	-26.00	18.00	544.401,18
5	Pemasangan stop kontak	Bh	5.00	88.605,05	-1.00	4.00	70.884,04
6	Pemasangan saklar tunggal	Bh	4.00	77.462,02	-	4.00	77.462,04
7	Pemasangan saklar double	Bh	2.00	61.271,02	-1.00	1,00	30.635,51
8	Pemasangan sekering box	Bh	1.00	160.429,50	-	1.00	160.429,50
	C8 Pekerjaan railing /jerejak						
1	Pembuatan Railing tangga	M	4.90	3.501.916,66	-4.90	-	-
2	Pembuatan jerajak jendela	M2	15.36	10.308.740,04	-15.36	-	-
3	Pembuatan tangga putar dan pagar pengaman	-	-	-	1.00	1.00	13.000.000,00
4	Pembuatan railing tangga utama	-	-	-	1.00	1.00	15.500.000,00
	C9 Pekerjaan Pengecatan						
1	Cat kilat kayu	M2	23.18	675.044,25	37,72	60.90	1.773.520,06
2	Cat tembok pada bidang	M2	271.08	4.463.462,32	662,34	933,42	16.369.208,34

Hal.16 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	permukaan dinding						
3	Cat tembok pada bidang permukaan plafond	M2	306,50	5.046.669,62	77.40	383,90	6.321.097,77
D	Lantai satu						
1	Pekerjaan kolom struktur 1:2:3 Uk 0,30 X 0,30	M3	0.31	1.983.935,71	1.15	1,46	9.343.697,23
2	Pekerjaan kolom struktur 1:2:3 uk 0,20 X0,25	M3	2.17	9.553.859,56	-2.17	-	-
3	Pekerjaan kolom struktur 1:2:3 uk 0,15 X 0,25	M3	-	-	1.42	1.42	6.251.834,37
4	Pekerjaan kolom praktis 15 X 15	M3	1.74	7.292.672,18	0.20	1.94	8.130.910,37
5	Pekerjaan Balok 0,20 X 0,40	M3	2.08	11.954.390,18	0.58	2.66	15.287.825,90
6	Pekerjaan balok 0,20 X 0,40	M3	5.82	36.525.432,80	0.33	6.15	38.596.462,49
7	Pekerjaan ring balok 15 X20 cm	M3	0.21	791.933,03	0.92	1.13	4.261.353,90
8	Pekerjaan plat leufel beton bertulang	M3	0,72	3.173.028,01	-0.72	-	-
	D2 Pekerjaan Dinding dan Pasangan						
1	Pasang dinding batu camp 1 : 4	M2	223.19	17.486.412,00	78.05	301.24	23.601.446,09
2	Plesteran camp 1 4 untuk dinding batu bata	M2	446.38	17.298.448,08	156.10	60248	23.347.750,80
	D3 Pekerjaan Kayu/Kose/Pin						

Hal.17 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tu/Jendela/Kaca						
1	Kosen pintu/jendela kayu kapur	M3	2.38	16.917.633,81	-0.70	1.68	11.937.508,91
2	Pemasangan Pintu kayu panil kaca	M2	10.08	4.413.800,16	-3.36	6.72	2.942.533,44
3	Jendela panel kaca	M2	31.68	13.667.911,49	-0.96	30.72	2.942.533,44
4	Pemasangan kunci tanam pada daun pintu	Set	6.00	693.554,40	-2.00	4.00	462.369,60
5	Pasang engsel pintu	Bh	18	402.732,00	-6.00	12.00	268.488,00
6	Pasang grendel pintu	Bh	6.00	108.024,84	-2.00	4.00	72.016,56
7	Pasang hadel daun pintu	Bh	6.00	110.484,00	-2.00	4.00	73.656,00
8	Pasang engsel jendela	Bh	76.00	1.233.936,00	-4.00	72.00	1.168.992,00
9	Pasang gredel jendela	Bh	38.00	420.817,32	-24.00	36.00	398.669,00
10	Pasang hak angin jendela	Bh	76.00	2.603.304,00	-4.00	72.00	2.466.288,00
11	Pasang hadle jendela	Bh	38.00	699.732,00	-2.00	36.00	662.904,00
	D4 Pekerjaan Lantai						
1	Pemasangan kramik (lantai) ukuran 40 X 40 cm	M2	325.37	50.419.767,94	- 141.92	183,45	28.427.655,99
2	Pemasangan keramik (lantai) ukuran 20 X20 cm	M2	3.00	407.199,15	5.25	8.25	1.119.797,66
3	Pemasangan kramik (dinding) ukuran 20 X25 cm	M2	11.16	1.971.189,11	12.96	24.12	4.260.960,33
4	Bon-bon keramik	M	4.60	113.344,00	-	4.60	113.344,00
	D5 Pekerjaan langit-langit /plafond						

Hal.18 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Plafond gypsun tebal 9mm + rangka hollow	M2	328.00	33.364.330,56	- 148,05	179,95	18.304.607,57
2	Pemasangan list plafond gypsun	M	257.40	6.748.240,36	-92.56	164,84	4.321.600,39
3	Lafond triplek #3 mm + rangka	-	-	-	92,30	92,30	13.083.386,55
D6 Pekerjaan instalasi air/sanitasi							
1	Pemasangan kloet jongkok	Bh	1.00	1.020.994,50	1.00	2.00	2.041.989,00
2	Pemasangan kran air	Bh	1.00	29.898,00	1.00	2.00	59.796,00
3	Pemasangan flood drain	Bh	1.00	40.642,40	1.00	2.00	81.284,80
4	Bak air fiber glass	Bh	1.00	856.587,60	1.00	2.00	1.713.175,00
5	Pemasangan jaringan pipa air besim dia ¾	M	20.00	597.960,00	-	20.00	597.960,00
6	Pemasangan jaringan pipa air kotor dia 4	M	15.00	4.826.086,65	-	15.00	4.826.086,65
7	Pemasangan jaringan pipa air bekas dia 3	M	20.00	4.439.932,20	-	20.00	4.439.932,20
D7 Pekerjaan Instalasi listrik/Peneran gan							
1	Penarikan kabel untuk titik-titik lampu	Ttk	88.00	8.624.880,00	-58.00	30.00	2.940.300,00
2	Pemasangan fitting plafond	Bh	-	-	11.00	11.00	338.888,11
3	Pemasangan armateur down light	Set	74.00	6.683.680,00	-59.00	15.00	1.354.800,00
4	Pemasangan bola lampu SLE 18 watt	Bh	74.00	2.238.093,74	-48.00	26.00	786.357,26
5	Pemasangan stop kontak	Bh	14.00	248.094,14	-10.00	4.00	70.884,04

Hal.19 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pemasangan saklar tunggal	Bh	6.00	116.193,06	-2.00	4.00	77.462,04
7	Pemasangan saklar double	Bh	11.00	336.990,61	-10.00	1.00	30.635,51
	D8 Pekerjaan pengatapan						
1	Rangka atap baja ringan (spesifikasi pabrikan)	M2	727.69	215.627.645,42	24.91	752.60	233.008.926,80
2	Pemasangan atap genteng metal berwarna	M2	727.69	81.582.854,05	24.91	752,60	84.375.566,46
3	Pemasangan Rabung metal berwarna	M	50.96	5.500.607,11	1.05	52.01	5.613.943,80
4	Pemasangan Talang dalam	M	11.00	1.893.716,55	-	11.00	1.893.716,55
5	Pemasangan Listplank kayu kapur	M	-	-	99.50	99.50	7.020.415,35
	D 9 Pekeraan Pengecatan						
1	Cat kilat kayu	M2	33.85	985.774,28	-2.60	31.25	910.057,50
2	Cat tembok pada bidang permukaan dinding	M2	446.38	7.349.860,96	444.58	890,96	14.670.153,82
3	Cat tembok pada bidang permukaan plafond	M2	328.65	5.411.380,00	-0.65	328.00	5.400.677,44
	E Pekerjaan Tambahan						
1	Pembuatan relief secara keseluruhan	M	95.50	7.800.449,55	-	95.50	7.800.449,55
2	Pekerjaan Pembuatan tiang	Bh	-	-	2.00	2.00	5.000.000,00
	F. Pekerjaan lain-lain						
1.	Foto dokumen/administrasi	Lbr	150.00	525.000,00	-	-	1.000.000,00
2	Laporan	Bln	6.00	13.000.000,00	-	6.00	3.750.000,00

Hal.20 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	harian						
3	Steling kerja	-	1.00	13.000.000,00	-	1.00	13.000.000,00
4	Lansir bahan	-	-	-	1.00	1.00	1.500.000,00
5	As bult drawing dan administrasi	-	-	-	1.00	1.00	1.750.000,00
6	Pembersihan akhir	-	1.00	450.000,00	-	-	1.050.000,00
Jumlah							1.009.473.054, 79
Profit							121.136.766,5 8
PNN 10 %							100.947.305,4 8
IMB							12.500.000,00
Jumlah							1.244.057.126, 85
Dibulatkan							1.244.057.000, 00

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011 telah dilaksanakan rapat pekerjaan CCO untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Perubahan Pekerjaan 01/PPK-DPKAD/VIII/2011 yang dibuat oleh Saksi Adiram Ompusunggu, S.T. selaku Direksi Teknis disetujui oleh Saudara Rudy Azhari selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 dan Saksi Drs. Soritua Hasibuan selaku Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga.

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 kontrak *cange order* (CCO) Nomor 01/CCO/PPK-DPKAD/VIII/2011 atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan Ruang Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 untuk pengerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 telah dibuat laporan hariannya oleh Yovi Ansyah Putra, S.T. selaku tenaga teknik dari kontraktor pelaksana CV. YUDDI AGUNG selanjutnya diperiksa dan ditandatangani oleh Saksi Kariaman Waruwu selaku Pengawas Lapangan.

Bahwa pada tanggal 03 November 2011 Saksi Rudi Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG melalui Surat Nomor 01/CV.YD/2011 perihal Permintaan Pembayaran Termin Pertama kepada PPK Dinas PKAD Kota Sibolga atas nama Saksi Rudi Azhari, S.E., memohon agar diberikan

Hal.21 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan di lapangan dan disetor ke Rekening Nomor 0290.0104003878.0 pada PT. SUMUT Cabang Sibolga.

Bahwa pada tanggal 04 November 2011 Saksi Adiram Ompusunggu, S.T. selaku Direksi Teknis, Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG dan Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 02/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang kantor dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 telah mencapai 65 % kemudian dokumen (laporan progres, berita acara hasil pemeriksaan lapangan, berita acara prestasi pekerjaan, berita acara pemberian kuitansi) diserahkan kepada Pejabat Teknis kegiatan atas nama Saksi Rahma Wati Siregar, S.E. untuk menyiapkan surat permintaan pembayaran tersebut ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama M. Zubir dan menyampaikannya kepada Pejabat Penata Usaha Keuangan untuk memeriksa dokumen sekaligus menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPM).

Bahwa pada tanggal 8 November 2011 Saksi M. Zubir selaku Bendahara PKAD Kota Sibolga mengajukan Surat Permintaan Belanja Langsung (SPP/LS) Barang/Jasa Nomor 903/131/SPP-LS-BJ/2011 kepada Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PKAD Kota Sibolga sebesar Rp746.434.200,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Bahwa pada tanggal 9 November 2011 Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM/LS) Nomor 900/131/SPM-LS/2011 sebesar Rp746.434.200,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga atas nama Saksi Amarula Gultom, S.E. agar menerbitkan SP2D kepada Saksi Rudi Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG untuk keperluan pembayaran angsuran I (60%) pekerjaan pembangunan gedung dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai Kontrak Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, termasuk di dalamnya potongan PPN sebesar Rp67.857.655,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan PPh Pasal 4 jasa konstruksi sebesar Rp13.571.531,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan pada tanggal yang sama Terdakwa

Hal.22 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Hutabarat, S.E. selaku Kuasa Penggunaan Anggaran PKAD Kota Sibolga menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan (SPM-LS) sebesar Rp746.434.200,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 (Pihak I), Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG (Pihak II), Saksi Rahmawati Siregar, S.E. selaku PPTK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 serta diketahui oleh Saksi Drs. Soritua Hasibuan selaku Kepala Dinas PKAD Kota Sibolga menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 04/PPK-DPKAD/BAP/2011 untuk pembayaran angsuran pertama (60%) atau sebesar Rp746.434.200,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) pekerjaan pembangunan gedung dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai kontraknya Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 selanjutnya pada bulan yang sama Bendahara Pengeluaran PKAD Kota Sibolga atas nama Saksi M. Zubir membuat tanda terima pembayaran angsuran pertama sebesar 60% atau senilai Rp746.434.200,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) kepada Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG yang mana tanda terima tersebut juga diketahui/ditandatangani oleh Saksi Rahmawati Siregar, S.E. selaku PPTK Dinas PKAD Kota Sibolga serta disetujui oleh Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 kemudian pada tanggal 9 November 2011 Saksi Amarula Gultom, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintahan Kota Sibolga berdasarkan SPM-LS Nomor 900/131/SPM-LS/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tersangka Agustinus Hutabarat selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 31580 melalui PT. BANK SUMUT untuk mencairkan/memindah bukukan dari bank Rekening Nomor 290-01.02.003505.0 uang sebesar Rp746.434.200,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) kepada Saksi Rudi Azhari, S.E./Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG dengan Nomor Rekening 290-01.04.00378.0 pada PT. BANK SUMUT Cabang Sibolga untuk keperluan belanja langsung pembayaran angsuran pertama 60% dari harga kontra pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 termasuk PPN sebesar Rp67.857.655,00 (enam puluh tujuh juta

Hal.23 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan PPh Pasal 4 jasa konstruksi sebesar Rp13. 571.531,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 Saksi Rudi Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG melalui Surat Nomor 02/CV.YD/VIII/2011 perihal Permintaan Termin kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PKAD Kota Sibolga dimohon agar diberikan pembayaran sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan dan disetor ke Rekening Nomor 290-01.02.003505.0 PT. BANK SUMUT Cabang Sibolga selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2011 Saksi M. Zubir selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PKAD Kota Sibolga mengajukan Surat Permintaan Belanja Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa Nomor 903/213/SPP-LS-BJ/2011 kepada Pengguna Anggaran Dinas PKAD sebesar Rp373.217.100,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) lalu ditanggal yang sama Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku Pengguna Anggaran Dinas PKAD menerbitkan Surat Perintah Membayar SPM-LS Nomor 900/213/SPM-LS/2011 sebesar Rp373.217.100,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga yaitu Saksi Amarula Gultom, S.E. agar menerbitkan SP2D kepada Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG untuk keperluan pembayaran angsuran II sebesar $90\% - 60\% = 30\%$ dari harga kontrak kantor dalam hal ini penambahan ruang kerja Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Kontrak Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, termasuk di dalamnya potongan PPN sebesar Rp33.928.827,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan PPh Pasal 4 jasa konstruksi sebesar Rp6.785.765,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) kemudian di tanggal yang sama Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. menandatangani SPM-LS Nomor 900/213/SPM-LS/2011 sebesar Rp373.217.100,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) yaitu Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 (Pihak I), Saksi Rudy Azhary selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG (Pihak II), Saksi Rahmawati Siregar, S.E. selaku PPTK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 serta diketahui oleh Saksi Drs. Soritua Hasibuan selaku Kepala Dinas PKAD Kota Sibolga menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 07/PPK-DPKAD/BAP/2011 untuk pembayaran angsuran pertama (30%) atau sebesar 373.217.100,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh belas

Hal.24 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus rupiah) pekerjaan pembangunan gedung dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai kontraknya Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 selanjutnya pada bulan yang sama Bendahara Pengeluaran PKAD Kota Sibolga atas nama Saksi M. Zubir membuat tanda terima pembayaran angsuran kedua sebesar 30% atau senilai Rp373.217.100,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) kemudian di bulan yang sama (tanpa tanggal) Saksi M. Zubir selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PKAD Kota Sibolga membuat tanda terima uang pembayaran angsuran II sebesar 30% atau senilai Rp373.217.100,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) kepada Rudy Azhari selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG yang mana tanda terima tersebut diketahui/ditandatangani oleh Saksi Rahmawati Siregar, S.E. selaku PPTK Dinas PKAD Kota Sibolga serta disetujui oleh Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga selanjutnya pada tanggal 21 November 2011 Saksi Amarula Gultom, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintahan Kota Sibolga berdasarkan SPM-LS Nomor 900/213/SPM-LS/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 32070 melalui PT. BANK SUMUT untuk mencairkan/memindah buku kan dari BANK Rekening Nomor 290-01.02.003505.0 uang sebesar Rp373.217.100,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) kepada Saksi Rudi Azhari, S.E./Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG dengan Nomor Rekening 290-01.04.00378.0 pada PT. BANK SUMUT Cabang Sibolga untuk keperluan belanja langsung pembayaran angsuran dua 30% dari harga kontra pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 termasuk PPN sebesar Rp33.928.827,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan PPh Pasal 4 jasa konstruksi sebesar Rp33.928.827,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 Saksi M. Zubir selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PKAD Kota Sibolga mengajukan Surat Permintaan Belanja Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa Nomor 903/239/SPP-LS-BJ/2011 kepada Pengguna Anggaran Dinas PKAD sebesar Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) lalu

Hal.25 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggal yang sama Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku Pengguna Anggaran Dinas PKAD menerbitkan Surat Perintah Membayar SPM-LS Nomor 900/239/SPM-LS/ 2011 sebesar Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga yaitu Saksi Amarula Gultom, S.E. agar menerbitkan SP2D kepada Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG untuk keperluan pembayaran angsuran III sebesar 95%-60%-30% = 5% dari harga kontrak untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang kerja Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Kontrak Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, termasuk di dalamnya potongan PPN sebesar Rp5.654.805 (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan PPh Pasal 4 jasa konstruksi sebesar Rp1.130.961,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) kemudian Tersangka Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 (Pihak I), Saksi Rudy Azhary selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG (Pihak II), Saksi Rahmawati Siregar, S.E. selaku PPTK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 serta diketahui oleh Saksi Drs. Soritua Hasibuan selaku Kepala Dinas PKAD Kota Sibolga menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 11/PPK-DPKAD/BAP/2011 atas pembayaran angsuran Termin ke III sebesar 5 % atau senilai 62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai kontraknya Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 selanjutnya pada bulan yang sama Bendahara Pengeluaran PKAD Kota Sibolga atas nama Saksi M. Zubir membuat tanda terima pembayaran angsuran III sebesar 5% atau senilai Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian di bulan yang sama (tanpa tanggal) Saksi M. Zubir selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PKAD Kota Sibolga membuat tanda terima uang pembayaran angsuran III sebesar 5% atau senilai Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Rudy Azhari selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG yang mana tanda terima tersebut diketahui/ditandatangani oleh Saksi Rahmawati Siregar, S.E. selaku PPTK Dinas PKAD Kota Sibolga serta disetujui oleh Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga dan Saksi Drs. Soritua selaku Kepala Dinas PKAD Kota Sibolga selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2011

Hal.26 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Amarula Gultom, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintahan Kota Sibolga berdasarkan SPM-LS Nomor 900/239/SPM-LS/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 32329 melalui PT. BANK SUMUT untuk mencairkan/memindah bukukan dari bank Rekening Nomor 290-01.02.003505.0 uang sebesar Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Saksi Rudi Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG dengan Nomor Rekening 290-01.04.00378.0 pada PT. BANK SUMUT Cabang Sibolga untuk keperluan belanja langsung pembayaran angsuran III 5% dari harga kontra pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 termasuk PPN sebesar Rp5.654.805,00 (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan PPh Pasal 4 jasa konstruksi sebesar Rp1.130.961,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG melalui Surat Nomor 03/CV.YD/VIII/2011 perihal Permintaan Pembayaran Uang Retensi, kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PKAD Kota Sibolga dimohon agar diberikan pembayaran sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan dan disetor ke Rekening Nomor 290-01.02.003505.0 PT. BANK SUMUT Cabang Sibolga, kemudian pada tanggal 22 Desember 2011 Saudara Adiram Omposunggu, S.T. selaku Direksi Teknis, Saksi Rudi Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. Yuddi Agung dan Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 8/PPK-DPKAD/BAHPL/2011, yang menyatakan bahwa seluruh hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini pada tanggal 23 Desember 2011 bertindak sebagai Pihak Pertama dan Saksi Rudi Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. Yuddi Agung bertindak sebagai Pihak Kedua, menandatangani Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor 9/PPK-DPKAD/BAPP/2011 yang menyatakan bahwa total prestasi pekerjaan pembangunan Gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sampai saat ini adalah sebesar 100%. Pada tanggal yang sama Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. juga menandatangani Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor 13/PPK-DPKAD/BAPP/2011 yang menyatakan bahwa total prestasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini

Hal.27 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambahan ruang kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sampai saat ini adalah sebesar 100 %, pada tanggal 27 Desember 2011 Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. selaku Pihak Pertama dan Saksi Rudi Azhari, S.E. selaku Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor 10/PPK/BA/2011 yang menyatakan telah mengadakan serah terima pekerjaan untuk yang pertama, pada tanggal yang sama Terdakwa juga menandatangani Surat Nomor 14/PPK/BA/2011 yang menyatakan telah mengadakan serah terima pekerjaan untuk yang kedua kali selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2011 Saksi M. Zubir selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PKAD Kota Sibolga mengajukan Surat Permintaan Belanja Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa Nomor 903/240/SPP-LS-BJ/2011 kepada Pengguna Anggaran Dinas PKAD sebesar Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) lalu ditanggal yang sama Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku Pengguna Anggaran Dinas PKAD menerbitkan Surat Perintah Membayar SPM-LS Nomor 900/240/SPM-LS/2011 sebesar Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga yaitu Saksi Amarula Gultom, S.E. agar menerbitkan SP2D kepada Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG untuk keperluan pembayaran uang retensi sebesar 5% dari harga kontrak kantor dalam hal ini penambahan ruang kerja Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Kontrak Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, termasuk di dalamnya potongan PPN sebesar Rp5.654.805,00 (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan PPh Pasal 4 jasa konstruksi sebesar Rp1.130.961,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) kemudian di tanggal yang sama Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. menandatangani SPM-LS Nomor 900/240/SPM-LS/2011 sebesar Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yaitu Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 (Pihak I), Saksi Rudy Azhary selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG (Pihak II), Saksi Rahmawati Siregar, S.E. selaku PPTK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 serta diketahui oleh Saksi Drs. Soritua Hasibuan selaku Kepala Dinas PKAD Kota Sibolga menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 15/PPK-DPKAD/BAP/2011 atas pembayaran uang retensi sebesar 5 % atau senilai Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) pekerjaan pembangunan gedung dalam hal ini penambahan

Hal.28 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai kontraknya Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 selanjutnya pada bulan yang sama Bendahara Pengeluaran PKAD Kota Sibolga atas nama Saksi M. Zubir membuat tanda terima pembayaran uang retensi sebesar 5% atau senilai Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian di bulan yang sama (tanpa tanggal) Saksi M. Zubir selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PKAD Kota Sibolga membuat tanda terima uang pembayaran uang retensi sebesar 5% atau senilai Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Rudy Azhari selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG yang mana tanda terima tersebut diketahui/ditandatangani oleh Saksi Rahmawati Siregar, S.E. selaku PPTK dinas PKAD Kota Sibolga serta disetujui oleh Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga dan Saksi Drs. Soritua Hasibuan selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2011 Saksi Amarula Gultom, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintahan Kota Sibolga berdasarkan SPM-LS Nomor 900/213/SPM-LS/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 32330 melalui PT. BANK SUMUT untuk mencairkan/memindah bukukan dari bank Rekening Nomor 290-01.02.003505.0 uang sebesar Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah kepada Saksi Rudi Azhari, S.E./Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG dengan Nomor Rekening 290-01.04.00378.0 pada PT. BANK SUMUT Cabang Sibolga untuk keperluan belanja langsung sebesar 5% dari harga kontra pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai surat perjanjian Kontrak Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 termasuk PPN sebesar Rp5.654.805,00 (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan PPh Pasal 4 jasa konstruksi sebesar Rp1.130.961,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

Bahwa syarat-syarat pembayaran atas kegiatan pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 adalah laporan progres fisik pekerjaan, gambar dokumentasi, surat perintah pembayaran yang ditujukan kepada PPK, SPP-LS yang ditujukan kepada PPTK, dan Bendahara SPM dan dalam proses pembayaran ini Tersangka Agustinus Hutabarat selaku Kuasa Pengguna

Hal.29 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/PPK tidak mengikut sertakan PPTK untuk menandatangani dokumen SPP-LS, yang mana dalam hal ini peran PPTK dalam pencairan dana hanya menyampaikan dokumen Berita Acara Pembayaran yang dibuat dan ditandatangani, sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan daerah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pasal 4 Ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pasal 4 Ayat (3): Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 122 Ayat (10): Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 184 Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
6. Pasal 205 Ayat (1) : PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang/jasa untuk disampaikan pada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
7. Pasal 205 Ayat (6) : Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

Bahwa tenaga teknik rekanan dari CV. YUDDI AGUNG atas nama Yovi Ansyahputra, S.T. tidak pernah berjumpa atau berinteraksi dengan Pengawas Lapangan Dinas PKAD atas nama Kariaman Waruwu dalam membuat/ mengajukan laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan untuk

Hal.30 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK dalam pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011, dengan kata lain bahwa Yovi Ansyah Putra, S.T. selaku tenaga teknik dari CV. YUDDI AGUNG tidak pernah melakukan pengecekan langsung terhadap pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011, karena yang bersangkutan tidak pernah sekalipun datang ke lokasi pengerjaan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan perkembangan atau progres pengerjaan tersebut telah direkayasa oleh Saksi Rudy Azhari, S.E.

Bahwa tindakan Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. yang turut melakukan membenaran perbuatan Saksi RUDY AZHARI, S.E. yang menyatakan proyek tersebut telah 100 % selesai tanpa ada dibentuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana diisyaratkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 95 Ayat 2 dan 3 dan tanpa ada masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan sebagaimana Pasal 95 Ayat 5 huruf b.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. secara melawan hukum yang tidak berpedoman Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi CV. YUDDI AGUNG dan menimbulkan kerugian Negara/perekonomian Negara sejumlah Rp175.373.655,40 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah dan empat puluh sen) sebagaimana laporan hasil investigasi lapangan pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 oleh Ahli Ir. Indra Jaya Pandia, M.T. dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik USU tanggal 13 November 2013 dan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor R-104/PWO-2/5/2014 tanggal 4 November 2014 yang dilakukan oleh Agus Dwi Pratama, dkk diperoleh hasil sebagai berikut yaitu:

No.	Uraian	Sa	Volu	Volu	Selisi	Harga	Harga	Nilai	Nilai
-----	--------	----	------	------	--------	-------	-------	-------	-------

Hal.31 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		tua n	me Yang Diba yar	me Yang Terp asan g	h Volu me Fisik	Satuan Kontrak/C CO (Rp)	Satuan Terpasa ng (Rp)	Pekerjaan Yang Dibayarka n Sesuai Kontrak (Rp)	Pekerj aan Terpas ang (Rp)
a.	b	c	d	e	f	g	h	i	j=(exh)
A.	Pekerjaan Pendahul uan								
1	Pekerjaan Pembong karan Bangunan Lama	-	-	-	-	5,750,00 0.00	-	-	-
2	Pekerjaan Pembong karan Beton/Pa s. Batu Bata	M ²	189. 65	189. 65	-	89,097.5 3	6,415.2 0	16,897,3 46.56	1,216, 642.68
3	Pekerjaan Pembong karan Rangka Atap Kayu dan Atap Seng	-	1.00	1.00	-	4,500,00 0.00	4,500,0 00.00	4,500,00 0.00	4,500, 000.00
4	Pengukur an dan Pemasan gan Bouwplan k	M	118. 00	32.5 0	(85. 50)	48,900.0 0	30,959. 28	5,770,20 0.00	1,006, 176.60
5	Membuan g Bekas Bongkara n	-	1.00	1.00	-	2,250,00 0.00	2,250,0 00.00	2,250,00 0.00	2,250, 000.00
6	Papan Nama Proyek	-	1.00	1.00	-	300,000. 00	-	300,000. 00	-
	Sub Jumlah							29,717,5 46.56	8,972, 819.28
B.									

Hal.32 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan Tanah								
1	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi	M ³	17.28	21.45	4.17	48,114.00	39,105.00	831,409.92	838,802.25
2	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	M ³	5.03	2.91	(2.12)	16,038.00	13,035.00	80,640.86	37,931.85
3	Pekerjaan Urugan Pasir di bawah Pondasi t=10 cm	M ³	8.59	-	(8.59)	104,742.00	104,742.00	899,786.15	-
4	Pekerjaan Timbunan Tanah menurut Trap Elevasi	M ³	-	-	-	83,238.00	-	-	-
5	Pekerjaan Cerocok Kayu Keras @ 15 cm L=2,50 m	M	324.00	324.00	-	87,497.03	87,497.03	28,349.037.72	28,349,037.72
6	Pekerjaan Lantai Kerja Tapak/Slo of 1:3:5 t 10 cm	M ³	3.02	-	(3.02)	669,969.02	669,969.02	2,021,966.50	-
7	Pekerjaan Beton Rabat 1:3:5	M ³	5.90	6.04	0.14	669,969.02	669,969.02	3,952,817.22	4,046,612.88
	Sub Jumlah							36,135,658.37	33,272,384.70
C.	Lantai Dasar C1								
	Pekerjaan Beton								
1	Pekerjaan	M ³	4.32	7.57	3.25	3,089,56	3,190,8	13,346,9	24,15

Hal.33 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pondasi Tapak Beton Bertulang Cor 1:2:3					8.96	51.93	37.91	4,749.11
2	Pekerjaan Sloof Cor 1:2:3 ; 20x50	M³	6.45	10.97	4.52	2,639,894.38	3,916,306.32	17,027,318.75	42,961,880.33
3	Pekerjaan Sloof Cor 1:2:3 ; 15x20	M³	0.32	0.32	-	3,091,355.11	3,916,306.32	973,776.86	1,253,218.02
4	Pekerjaan Stik Kolom Beton Bertulang Cor 1:2:3	M³	0.56	-	(0.56)	6,921,813.15	6,921,813.15	3,893,519.90	-
5	Pekerjaan Kolom Struktur 1:2:3 @ 30 cm	M³			-	6,399,792.62		-	-
6	Pekerjaan Kolom Struktur 1:2:3 @ 40 cm	M³	0.50	0.50	-	6,399,792.62	3,534,093.60	3,225,495.48	1,767,046.80
7	Pekerjaan Kolom Struktur A Cor 1:2:3 ; 0,30x0,30	M³	3.24	3.24	-	6,381,643.96	3,534,093.60	20,676,526.43	11,450,463.26
8	Pekerjaan Kolom Struktur B Cor 1:2:3 ; 0,30x0,30	M³			-	4,232,820.04		-	-
9	Pekerjaan Kolom Praktis 15 x 15 cm	M³	0.34	0.41	0.07	4,191,190.91	3,534,093.60	1,414,526.93	1,448,978.38
10	Pekerjaan Balok	M³	5.75	8.78	3.03	5,747,302.97	5,131,304.18	33,065,383.45	45,052,850.

Hal.34 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0,20 x 0,50 Cor 1:2:3								70
11	Pekerjaan Balok 0,20 x 0,25 Cor 1:2:3	M ³	1.84	0.84	(1.0 0)	6,275,84 7.56	5,131,3 04.18	11,552,5 80.19	4,310, 295.51
12	Pekerjaan Plat Lantai Cor 1:2:3	M ³	13.8 0	10.8 3	(2.9 7)	5,824,69 3.74	6,091,0 63.95	80,399,9 95.10	65,96 6,222. 58
13	Pekerjaan Tangga Beton Cor 1:2:3	M ³	-		-	4,803,57 5.77		-	-
	Sub Jumlah							185,576, 060.99	198,3 65,704 .69
	C2 Pekerjaan Dinding dan Pasangan								
1	Pondasi Batu Bata Camp. 1:2	M ²	18.6 0	-	(18. 60)	88,177.3 7	88,177. 37	1,640,09 9.08	-
2	Pas Dinding Bata Camp. 1:4	M ²	125. 82	110. 23	(15. 59)	78,347.6 5	78,347. 65	9,857,70 1.32	8,636, 261.46
3	Plesteran Camp. 1:2 pada Pondasi Batu Bata Plesteran	M ²	22.3 2	-	(22. 32)	43,875.5 6	43,875. 56	979,302. 50	-
4	Camp. 1:4 untuk Dinding Batu Bata	M ²	251. 64	220. 46	(31. 18)	38,752.7 4	33,406. 74	9,751,73 9.49	7,364, 849.90
	Sub Jumlah							22,228,8 42.40	16,00 1,111. 36

Hal.35 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	C3 Pekerjaan Kayu/Kos en/Pintu/J endela/Ka ca								
1	Kosen Pintu/Jen dela Kayu Kapur	M ³	1.09	0.62	(0.4 7)	7,108,24 9.50	7,084,4 40.00	7,747,99 1.96	4,392, 352.80
2	Pemas an Pintu Panil Kayu	M ²	11.7 6	8.00	(3.7 6)	437,877. 00	386,63 0.00	5,149,43 3.52	3,093, 040.00
3	Jendela Panel Kaca	M ²	14.2 8	13.4 4	(0.8 4)	431,436. 60	431,00 1.00	6,160,91 4.65	5,792, 653.44
4	Pemas an Kunci Tanam pada Daun Pintu	Se t	7.00	5.00	(2.0 0)	115,592. 40	115,59 2.40	809,146. 80	577,9 62.00
5	Pasangan Engsel Pintu	Bh	21.0 0	10.0 0	(11. 00)	22,374.0 0	22,374. 00	469,854. 00	223,7 40.00
6	Pasangan Grendel Pintu	Bh	7.00	-	(7.0 0)	18,004.1 4	18,004. 14	126,028. 98	-
7	Pasangan Handel Daun Pintu	Bh	7.00	5.00	(2.0 0)	18,414.0 0	47,500. 00	128,898. 00	237,5 00.00
8	Pasangan Engsel Jendela	Bh	36.0 0	28.0 0	(8.0 0)	16,236.0 0	16,236. 00	584,496. 00	454,6 08.00
9	Pasangan Grendel Jendela	Bh	18.0 0	28.0 0	10.0 0	11,074.1 4	11,074. 14	199,334. 52	310,0 75.92
10	Pasangan Hak Angin Jendela	Bh	36.0 0	28.0 0	(8.0 0)	34,254.0 0	34,254. 00	1,233,14 4.00	959,1 12.00
11	Pasangan Handle Jendela	Bh	18.0 0	14.0 0	(4.0 0)	18,414.0 0	18,414. 00	331,452. 00	257,7 96.00
	Sub Jumlah							22,940,6 94.42	16,29 8,840.

Hal.36 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

									16
	C4 Pekerjaan Lantai								
1	Pemasangan Keramik (Lantai) ukuran 40x40 cm	M ²	104. 26	121. 40	17.1 4	154,961. 33	148,07 6.87	16,156,2 68.27	17,97 6,532. 02
2	Pemasangan Keramik (Tangga) ukuran 40x40 cm	M ²	-	-	-	154,961. 33	-	-	-
3	Pemasangan Keramik (Lantai) ukuran 20x20 cm	M ²	-	-	-	135,733. 05	-	-	-
4	Pemasangan Keramik (Dinding) ukuran 20x25 cm	M ²	-	-	-	176,656. 73	-	-	-
5	Bon-bon keramik	M	4.10	2.20	(1.9 0)	24,640.0 0	16,883. 44	101,024. 00	37,14 3.57
	Sub Jumlah							16,257,2 92.27	18,01 3,675. 59
	C5 Pekerjaan Langit- Langit								
1	Plafond Gypsum tebal 9 mm + Rangka Hollow	M ²	85.5 0	90.2 5	4.75	101,720. 52	101,72 0.52	8,697,10 4.46	9,180, 276.93
2	Pemasangan List Plafond	M	71.5 0	75.7 7	4.27	26,216.9 4	16,883. 44	1,874,51 1.21	1,279, 258.25

Hal.37 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gypsum								
	Sub Jumlah						10,571,615.67	10,459,535.18	
	C6 Pekerjaan Instalasi Air/Sanitasi								
1	Pemasangan Kloset Jongkok	Bh	-	-	-	1,020,994.50	-	-	-
2	Pemasangan Kran Air	Bh	-	-	-	29,898.00	-	-	-
3	Pemasangan Floor Drain	Bh	-	-	-	40,642.40	-	-	-
4	Bak Air Fiber Glass	Bh	-	-	-	856,587.60	-	-	-
5	Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih dia 3/4"	M	-	-	-	29,898.00	-	-	-
6	Pemasangan Jaringan Pipa Air Kotor 4"	M	-	-	-	321,739.11	-	-	-
7	Pemasangan Jaringan Pipa Air Bekas 3"	M	-	-	-	221,996.61	-	-	-
8	Pembuatan Septictank	Bh	-	-	-	3,555,621.90	-	-	-
	Sub Jumlah						-	-	
	C7 Pekerjaan Instalasi								

Hal.38 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Listrik/Pe nerangan								
1	Penarikan Kabel untuk Titik-titik Lampu	Ttk	22.0 0	16.0 0	(6.0 0)	98,010.0 0	98,010. 00	2,156,22 0.00	1,568, 160.00
2	Pemasangan Armateur Down Light	Bh	13.0 0	18.0 0	5.00	90,320.0 0	90,320. 00	1,174,16 0.00	1,625, 760.00
3	Pemasangan Fitting Plafond	Bh	5.00	10.0 0	5.00	30,808.0 1	30,808. 01	154,040. 05	308,0 80.10
4	Pemasangan Bola Lampu SLE 18 Watt	Bh	18.0 0	25.0 0	7.00	30,244.5 1	30,244. 51	544,401. 18	756,1 12.75
5	Pemasangan Stop Kontak	Bh	4.00	13.0 0	9.00	17,721.0 1	17,721. 01	70,884.0 4	230,3 73.13
6	Pemasangan Saklar Tunggal	Bh	4.00	3.00	(1.0 0)	19,365.5 1	19,365. 51	77,462.0 4	58,09 6.53
7	Pemasangan Saklar Double	Bh	1.00	3.00	2.00	30,633.5 1	30,633. 51	30,633.5 1	91,90 0.53
8	Pemasangan Sekring Box	Bh	1.00	-	(1.0 0)	160,429. 50	160,42 9.50	160,429. 50	-
	Sub Jumlah							4,368,23 2.32	4,638, 483.04
	C8 Pekerjaan Railing/Je rejak								
1	Pembuat an Railling Tangga	M	-	-	-	714,676. 87		-	-
2	Pembuat an Jerajak	M ²	-	-	-	671,141. 93		-	-

Hal.39 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jendela								
3	Pembuat an Tangga Putar dan Pagar Pengama n Tangga	-	1.00	1.00	-	13,000,0 00.00	13,000, 000.00	13,000,0 00.00	13,00 0,000. 00
4	Pembuat an Railling Tangga Utama	-	1.00	1.00	-	15,500,0 00.00	15,500, 000.00	15,500,0 00.00	15,50 0,000. 00
	Sub Jumlah							28,500,0 00.00	28,50 0,000. 00
	C9 Pekerjaa n Pengecat an								
1	Cat Kilat Kayu	M ²	60.9 0	43.7 1	(17. 19)	29,121.8 4	29,833. 76	1,773,52 0.06	1,304, 033.65
2	Cat Tembok pada Bidang Permukaa n Dinding	M ²	933. 42	220. 46	(712 .96)	16,465.4 8	21,484. 88	15,369,2 08.34	4,736, 556.64
3	Cat Tembok pada Bidang Permukaa n Plafond	M ²	383. 90	90.2 5	(293 .65)	16,465.4 8	21,484. 88	6,321,09 7.77	1,939, 010.42
	Sub Jumlah							23,463,8 26.17	7,979, 600.71
D.	Lantai 1								
	D1 Pekerjaan Beton								
1	Kolom struktur 1:2:3 uk. 0,3 x0,3	M ³	1.46	1.46	-	6,399,79 2.62	3,534,0 93.60	9,343,69 7.23	5,159, 776.66
2	Kolom struktur 1:2:3 uk. 0,2 x0,25	M ³	-	-	-	4,402,70 0.26	-	-	-

Hal.40 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kolom struktur 1:2:3 uk. 0,15 x0,25	M ³	1.42	1.42	-	4,402,70 0.26	3,534,0 93.60	6,251,83 4.37	5,018, 412.91
4	Kolom praktis 15 x15 cm	M ³	1.94	1.30	(0.6 4)	4,191,19 0.91	3,534,0 93.60	8,130,91 0.37	4,594, 321.68
5	Balok 0,2 x 0,4	M ³	2.66	2.64	(0.0 2)	5,747,30 2.97	5,131,3 04.18	15,287,8 25.90	13,54 6,643. 04
6	Balok 0,15 x 0,4	M ³	6.15	1.95	(4.2 0)	6,275,84 7.56	5,131,3 04.18	38,596,4 62.49	10,00 6,043. 15
7	Ring balok 15 x 20 cm	M ³	1.13	2.52	1.39	3,771,10 9.65	3,771,1 09.65	4,261,35 3.90	9,503, 196.32
8	Plat leufel beton bertulang	M ³	-	-	-	4,406,98 3.35	-	-	-
	Sub Jumlah							81,872,0 84.26	47,82 8,393. 75
	D2 Pekerjaan Dinding dan Pasangan								
1	Pas. Dinding bata camp. 1:4	M ²	301. 24	334. 44	33.2 0	78,347.6 5	78,347. 65	23,601,4 46.09	26,20 2,588. 07
2	Plesteran camp. 1:4 untuk dinding batu bata	M ²	602. 48	668. 88	66.4 0	38,752.7 4	33,752. 74	23,347,7 50.80	22,57 6,532. 73
	Sub Jumlah							46,949,1 96.88	48,77 9,120. 80
	D3 Pekerjaan Kayu/Kosen/Pintu/Jendela/Ka								

Hal.41 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ca								
1	Kosen pintu/ jendela kayu kapur	M ³	1.68	0.54	(1.1 4)	7,108,24 9.50	7,084,4 40.00	11,937,5 08.91	3,825, 597.60
2	Pintu panil kayu	M ²	6.72	6.40	(0.3 2)	437,877. 00	386,63 0.00	2,942,53 3.44	2,474, 432.00
3	Jendela panil kaca	M ²	30.7 2	20.4 5	(10. 27)	431,436. 60	431,00 1.00	13,253,7 32.35	8,813, 970.45
4	Kunci tanam pada daun pintu	set	4.00	4.00	-	115,592. 40	115,59 2.40	462,369. 60	462,3 69.60
5	Engsel pintu	Bh	12.0 0	8.00	(4.0 0)	22,374.0 0	22,374. 00	268,488. 00	178,9 92.00
6	Grendel pintu	Bh	4.00	-	(4.0 0)	18,004.1 4	18,004. 14	72,016.5 6	-
7	Handle daun pintu	Bh	4.00	-	(4.0 0)	18,414.0 0	47,500. 00	73,656.0 0	-
8	Engsel jendela	Bh	72.0 0	60.0 0	(12. 00)	16,236.0 0	16,236. 00	1,168,99 2.00	974,1 60.00
9	Grendel jendela	Bh	36.0 0	60.0 0	24.0 0	11,074.1 4	11,074. 14	398,669. 04	664,4 48.40
10	Hak angin jendela	Bh	72.0 0	60.0 0	(12. 00)	34,254.0 0	34,254. 00	2,466,28 8.00	2,055, 240.00
11	Handle jendela	Bh	36.0 0	30.0 0	(6.0 0)	18,414.0 0	18,414. 00	662,904. 00	552,4 20.00
	Sub Jumlah							33,707,1 57.90	20,00 1,630. 05
	D4 Pekerjaan Lantai								
1	Keramik lantai uk. 40x40 cm	M ²	183. 45	158. 75	(24. 70)	154,961. 33	148,07 6.87	28,427,6 55.99	23,50 7,203. 11
2	Keramik lantai uk. 20x20 cm	M ²	8.25	5.63	(2.6 2)	135,733. 05	150,82 2.68	1,119,79 7.66	849,1 31.69
3	Keramik dinding uk. 20x25 cm	M ²	24.1 2	15.4 5	(8.6 7)	176,656. 73	157,07 9.48	4,260,96 0.33	2,426, 877.97
4	Bon-bon keramik Sub	M	4.60	3.97	(0.6 3)	24,640.0 0	24,640. 00	113,344. 00	97,82 0.80
								33,921,7	26,88

Hal.42 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah							57.98	1,033.57
	D5 Pekerjaan Langit- Langit/Pla fond Plafond gypsum tebal 9 mm + rangka hallow	M ²	179.95	334.50	154.55	101,720.52	101,720.52	18,304,607.57	34,025,513.94
2	Pemasangan list plafond gypsum Plafond triplek # 3 mm + rangka	M	164.84	250.75	85.91	26,216.94	16,883.44	4,321,600.39	4,233,522.58
3	Sub Jumlah	-	92.30	92.00	(0.30)	141,748.50	38,199.30	13,083,386.55	3,514,335.60
								35,709,594.51	41,773,372.12
	D6 Pekerjaan Instalasi Air/Sanita si								
1	Kloset jongkok	Bh	2.00	2.00	-	1,020,994.50	1,030,696.50	2,041,989.00	2,061,393.00
2	Pemasangan Kran Air	Bh	-	-	-	29,898.00	-	-	-
3	Pemasangan Floor Drain	Bh	-	-	-	40,642.40	-	-	-
4	Bak Air Fiber Glass	Bh	-	-	-	856,587.60	-	-	-
5	Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih dia 3/4"	M	-	-	-	29,898.00	-	-	-
6	Pemasangan	M	-	-	-	321,739.	-	-	-

Hal.43 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	gan Jaringan Pipa Air Kotor 4"					11			
7	Pemasangan Jaringan Pipa Air Bekas 3" Pembuat	M	-	-	-	221,996.61	-	-	-
8	n Septictank	Bh	-	-	-	3,555,621.90	-	-	-
	Sub Jumlah							-	-
	C7 Pekerjaan Instalasi Listrik/Pe nerangan								
1	Penarikan Kabel untuk Titik-titik Lampu	Ttk	22.00	16.00	(6.00)	98,010.00	98,010.00	2,156,220.00	1,568,160.00
2	Pemasangan Armateur Down Light	Bh	13.00	18.00	5.00	90,320.00	90,320.00	1,174,160.00	1,625,760.00
3	Pemasangan Fitting Plafond	Bh	5.00	10.00	5.00	30,808.01	30,808.01	154,040.05	308,080.10
4	Pemasangan Bola Lampu SLE 18 Watt	Bh	18.00	25.00	7.00	30,244.51	30,244.51	544,401.18	756,112.75
5	Pemasangan Stop Kontak	Bh	4.00	13.00	9.00	17,721.01	17,721.01	70,884.04	230,373.13
6	Pemasangan Saklar Tunggal	Bh	4.00	3.00	(1.00)	19,365.51	19,365.51	77,462.04	58,096.53
7	Pemasangan	Bh	1.00	3.00	2.00	30,633.5	30,633.5	30,633.5	91,90

Hal.44 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	gan Saklar Double					1	51	1	0.53
8	Pemasangan Sekring Box Sub	Bh	1.00	-	(1.00)	160,429.50	160,429.50	160,429.50	-
	Jumlah							4,368,232.32	4,638,483.04
	C8 Pekerjaan Railing/Jerajak								
1	Pembuatan Railing Tangga	M	-	-	-	714,676.87		-	-
2	Pembuatan Jerajak Jendela	M ²	-	-	-	671,141.93		-	-
3	Pembuatan Tangga Putar dan Pagar Pengaman Tangga	-	1.00	1.00	-	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
4	Pembuatan Railing Tangga Utama	-	1.00	1.00	-	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00
	Sub Jumlah							28,500,000.00	28,500,000.00
	C9 Pekerjaan Pengecatan								
1	Cat Kilat Kayu	M ²	60.90	43.71	(17.19)	29,121.84	29,833.76	1,773,520.06	1,304,033.65
2	Cat Tembok pada Bidang Permukaan Dinding	M ²	933.42	220.46	(712.96)	16,465.48	21,484.88	15,369,208.34	4,736,556.64
3	Cat Tembok	M ²	383.90	90.25	(293.65)	16,465.48	21,484.88	6,321,097.77	1,939,010.42

Hal.45 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pada Bidang Permukaan Plafond								
	Sub Jumlah							23,463,826.17	7,979,600.71
D.	Lantai 1								
	D1 Pekerjaan Beton Kolom								
1	struktur 1:2:3 uk. 0,3 x0,3	M ³	1.46	1.46	-	6,399,792.62	3,534,093.60	9,343,697.23	5,159,776.66
2	Kolom struktur 1:2:3 uk. 0,2 x0,25	M ³	-	-	-	4,402,700.26	-	-	-
3	Kolom struktur 1:2:3 uk. 0,15 x0,25	M ³	1.42	1.42	-	4,402,700.26	3,534,093.60	6,251,834.37	5,018,412.91
4	Kolom praktis 15 x15 cm	M ³	1.94	1.30	(0.64)	4,191,190.91	3,534,093.60	8,130,910.37	4,594,321.68
5	Balok 0,2 x 0,4	M ³	2.66	2.64	(0.02)	5,747,302.97	5,131,304.18	15,287,825.90	13,546,643.04
6	Balok 0,15 x 0,4	M ³	6.15	1.95	(4.20)	6,275,847.56	5,131,304.18	38,596,462.49	10,006,043.15
7	Ring balok 15 x 20 cm	M ³	1.13	2.52	1.39	3,771,109.65	3,771,109.65	4,261,353.90	9,503,196.32
8	Plat leufel beton bertulang	M ³	-	-	-	4,406,983.35	-	-	-
	Sub Jumlah							81,872,084.26	47,828,393.75
	D2 Pekerjaan Dinding dan Pasangan								
1	Pas.	M ²	301.	334.	33.2	78,347.6	78,347.	23,601,4	26,20

Hal.46 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dinding bata camp. 1:4		24	44	0	5	65	46.09	2,588.07
2	Plesteran camp. 1:4 untuk dinding batu bata	M ²	602.48	668.88	66.40	38,752.74	33,752.74	23,347.750.80	22,576,532.73
	Sub Jumlah							46,949.196.88	48,779,120.80
	D3 Pekerjaan Kayu/Kosen/Pintu/Jendela/Kaca								
1	Kosen pintu/kayu kapur	M ³	1.68	0.54	(1.14)	7,108.249.50	7,084.440.00	11,937.508.91	3,825,597.60
2	Pintu panil kayu	M ²	6.72	6.40	(0.32)	437,877.00	386.630.00	2,942.533.44	2,474,432.00
3	Jendela panil kaca	M ²	30.72	20.45	(10.27)	431,436.60	431.001.00	13,253.732.35	8,813,970.45
4	Kunci tanam pada daun pintu	set	4.00	4.00	-	115,592.40	115.592.40	462,369.60	462,369.60
5	Engsel pintu	Bh	12.00	8.00	(4.00)	22,374.00	22,374.00	268,488.00	178,992.00
6	Grendel pintu	Bh	4.00	-	(4.00)	18,004.14	18,004.14	72,016.56	-
7	Handle daun pintu	Bh	4.00	-	(4.00)	18,414.00	47,500.00	73,656.00	-
8	Engsel jendela	Bh	72.00	60.00	(12.00)	16,236.00	16,236.00	1,168.992.00	974,160.00
9	Grendel jendela	Bh	36.00	60.00	24.00	11,074.14	11,074.14	398,669.04	664,488.40
10	Hak angin jendela	Bh	72.00	60.00	(12.00)	34,254.00	34,254.00	2,466.288.00	2,055,240.00
11	Handle jendela	Bh	36.00	30.00	(6.00)	18,414.00	18,414.00	662,904.00	552,420.00
	Sub							33,707.1	20,00

Hal.47 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah							57.90	1,630.05
	D4 Pekerjaan Lantai								
1	Keramik lantai uk. 40x40 cm	M ²	183.45	158.75	(24.70)	154,961.33	148,076.87	28,427,655.99	23,507,203.11
2	Keramik lantai uk. 20x20 cm	M ²	8.25	5.63	(2.62)	135,733.05	150,822.68	1,119,797.66	849,131.69
3	Keramik dinding uk. 20x25 cm	M ²	24.12	15.45	(8.67)	176,656.73	157,079.48	4,260,960.33	2,426,877.97
4	Bon-bon keramik	M	4.60	3.97	(0.63)	24,640.00	24,640.00	113,344.00	97,820.80
	Sub Jumlah							33,921,757.98	26,881,033.57
	D5 Pekerjaan Langit- Langit/Pla fond								
1	Plafond gypsum tebal 9 mm + rangka hallow	M ²	179.95	334.50	154.55	101,720.52	101,720.52	18,304,607.57	34,025,513.94
2	Pemasangan list plafond gypsum	M	164.84	250.75	85.91	26,216.94	16,883.44	4,321,600.39	4,233,522.58
3	Plafond triplek # 3 mm + rangka	-	92.30	92.00	(0.30)	141,748.50	38,199.30	13,083,386.55	3,514,335.60
	Sub Jumlah							35,709,594.51	41,773,372.12
	D6 Pekerjaan Instalasi Air/Sanita								

Hal.48 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	si								
1	Kloset jongkok	Bh	2.00	2.00	-	1,020,99 4.50	1,030,6 96.50	2,041,98 9.00	2,061, 393.00
2	Kran air	Bh	2.00	2.00	-	29,898.0 0	13,622. 40	59,796.0 0	27,24 4.80
3	Floor drain	Bh	2.00	2.00	-	40,642.4 0	40,642. 40	81,284.8 0	81,28 4.80
4	Bak air fiber glass	Bh	2.00	2.00	-	856,587. 60	665,52 1.56	1,713,17 5.20	1,331, 043.12
5	Jaringan pipa air bersih dia. ¾"	M	20.0 0	12.5 0	(7.5 0)	29,898.0 0	65,340. 00	597,960. 00	816,7 50.00
6	Jaringan pipa air kotor 4"	M	15.0 0	12.0 0	(3.0 0)	321,739. 11	321,73 9.11	4,826,08 6.65	3,860, 869.32
7	Jaringan pipa air bekas 3"	M	20.0 0	14.0 0	(6.0 0)	221,996. 61	221,99 6.61	4,439,93 2.20	3,107, 952.54
	Sub Jumlah							13,760,2 23.85	11,28 6,537. 58
	D7 Pekerjaan Instalasi Listrik								
1	Kabel untuk titik-titik lampu	Ttk	30.0 0	30.0 0	-	98,010.0 0	98,010. 00	2,940,30 0.00	2,940, 300.00
2	Fitting plafond	Bh	11.0 0	8.00	(3.0 0)	30,808.0 1	30,808. 01	338,888. 11	246,4 64.08
3	Armatuer down light	Set	15.0 0	25.0 0	10.0 0	90,320.0 0	90,320. 00	1,354,80 0.00	2,258, 000.00
4	Bola lampu SLE 18 watt	Bh	26.0 0	26.0 0	-	30,244.5 1	30,244. 51	786,357. 26	786,3 57.26
5	Stop kontak	Bh	4.00	19.0 0	15.0 0	17,721.0 1	17,721. 01	70,884.0 4	336,6 99.19
6	Saklar tunggal	Bh	4.00	5.00	1.00	19,365.5 1	19,365. 51	77,462.0 4	96,82 7.55
7	Saklar double	Bh	1.00	1.00	-	30,635.5 1	30,635. 51	30,635.5 1	30,63 5.51
	Sub Jumlah							5,599,32 6.96	6,695, 283.59
	D8 Pekerjaan Pematapan								

Hal.49 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	an								
1	Rangka Atap Baja Ringan (Spesifikasi Pabrikan) Pemasangan Atap Genteng Metal Berwarna	M ²	752. 60	752. 60	-	296,318. 00	296,31 8.00	223,008, 926.80	223,0 08,926 .80
2	Pemasangan Atap Genteng Metal Berwarna	M ²	752. 60	752. 60	-	112,112. 10	110,25 3.60	84,375,5 66.46	82,97 6,859. 36
3	Pemasangan Rabung Metal Berwarna Pemasangan	M	52.0 1	52.0 1	-	107,939. 70	107,93 9.70	5,613,94 3.80	5,613, 943.80
4	gan Talang Dalam	M	11.0 0	11.0 0	-	172,156. 05	107,11 3.05	1,893,71 6.55	1,178, 243.55
5	Pemasangan Listplank Kayu Kapur	M	99.5 0	97.3 0	(2.2 0)	70,557.3 0	70,557. 30	7,020,45 1.35	6,865, 225.29
	Sub Jumlah							321,912, 604.96	319,6 43,198 .80
	D9 Pekerjaan Pengecatan								
1	Cat Kilat Kayu	M ²	31.2 5	53.9 1	22.6 6	29,121.8 4	29,833. 76	910,057. 50	1,608, 338.00
2	Cat Tembok pada Bidang Permukaan Dinding	M ²	890. 96	668. 88	(222 .08)	16,465.4 8	21,484. 88	14,670,1 53.82	14,37 0,806. 53
3	Cat Tembok pada Bidang Permukaan	M ²	328. 00	426. 50	98.5 0	16,465.4 8	21,484. 88	5,400,67 7.44	9,163, 301.32

Hal.50 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	n Plafond								
	Sub Jumlah						20,980,8 88.76	25,14 2,445. 86	
E.	Pekerjaan Tambaha n								
1	Pembuata n Relief secara Keseluruh an	M	95.5 0	29.8 1	(65. 69)	81,680.1 0	81,680. 10	7,800,44 9.55	2,434, 883.78
2	Pekerjaan Pembulat an Tiang Sub Jumlah	Bh	2.00	2.00	-	2,500,00 0.00	2,500,0 00.00	5,000,00 0.00	5,000, 000.00
							12,800,4 49.55	7,434, 883.78	
F.	Pekerjaan Lain-Lain								
1	Foto Dokument asi/Admin istrasi	Lbr	1.00	1.00	-	1,000,00 0.00	1,000,0 00.00	1,000,00 0.00	1,000, 000.00
2	Laporan Harian	Bln	6.00	6.00	-	625,000. 00	625,00 0.00	3,750,00 0.00	3,750, 000.00
3	Steling Kerja	-	1.00	1.00	-	13,000,0 00.00	13,000, 000.00	13,000,0 00.00	13,00 0,000. 00
4	Lansir Bahan As Built	-	1.00	1.00	-	1,500,00 0.00	1,500,0 00.00	1,500,00 0.00	1,500, 000.00
5	Drawing dan Administr asi	-	1.00	1.00	-	1,750,00 0.00	1,750,0 00.00	1,750,00 0.00	1,750, 000.00
6	Pembersi han Akhir	-	1.00	1.00	-	1,500,00 0.00	1,500,0 00.00	1,500,00 0.00	1,500, 000.00
	Sub Jumlah						22,500,0 00.00	22,50 0,000. 00	
	Jumlah						1,009,47 3,054.79	920,4 68,054 .60	
	Profit						121,136, 766.58	-	
	PPN 10%						100,947, 113,0		

Hal.51 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							305.48	96,092
								.00
	IMB						12,500,0	12,50
							00	0,000
	Total						1,244,05	1,046,
							7,126.85	064,14
	Dibulatkan						1,244,05	6.60
							7,000.00	
Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah								
Jumlah uang yang telah dicairkan dari kas daerah Pemerintah Kota Sibolga dan telah digunakan/ dipertanggungjawabkan								
- untuk Pembayaran Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dhi Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011								
Rp 1,244,057,000								
Dikurangi								
- IMB								
Rp 12,500,000.								
- PPN yang telah dipungut dan disetor (Lampiran II)								
Rp 113,096,092.								
- PPh Pasal 4 Jasa Konstruksi yang telah dipungut dan disetor (Lampiran II)								
Rp 22,619,218.00								
Nilai Fisik Pekerjaan yang dibayarkan								
Rp1,095,841,690.								
Nilai Realisasi Fisik di Lapangan								
Rp 920,468,054.60								
Kerugian Keuangan Negara/Daerah								
Rp175,373,635.4								

Perbuatan Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. tersebut di atas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 19720820189995031001, pangkat Penata (III-c) jabatan Pj. Kepala Bidang Asset dan Investigasi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor 900/87/2011 tanggal 11 April 2011 ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PKAD Kota Sibolga Nomor 900/2284/2011 tanggal 17

Hal.52 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011 pada kegiatan pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor, perluasan gedung kantor pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Tahun Anggaran 2011, secara bersama-sama dengan Saksi RUDY AZHARI, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG yang bertindak sebagai penyedia barang dan jasa (yang dituntut secara terpisah dalam perkara yang sama) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti antara bulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Sibolga, yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 huruf (a) dan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp175.373.635,40 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah empat puluh sen), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2011 sebagaimana tertuang dalam mata anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 adanya kegiatan program peningkatan sarana dan prasarana aparat, kegiatan pembangunan gedung kantor dengan kode 1.20.1.20.05.02.015 dengan uraian belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor, perluasan gedung kantor dengan kode rekening 5.2.3.26.01 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya diubah dan disahkan menjadi Rp1.341.900.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Untuk melaksanakan daftar pelaksana anggaran (DPA) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 menetapkan Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor

Hal.53 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/87/2011 tanggal 11 April 2011, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai tugas:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- b. Melaksanakan anggaran unit kerja.
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU.
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran dan,
- h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Sebagaimana pada point d, dan pada tanggal 17 Juli 2011 Saksi Drs. Soritua Hasibuan selaku Kepala Kantor Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga telah juga menetapkan Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PKAD Kota Sibolga Nomor 900/2284/2011 tanggal 17 Juni 2011, adapun tugas pokok selaku pejabat pembuat komitmen adalah:

- a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi teknik barang/jasa.
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
 3. Rencana kontrak
- b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa.
- c) Menandatangani kontrak.
- d) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
- e) Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- f) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Sibolga.
- g) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Sibolga setiap triwulan.
- h) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- i) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Hal.54 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) Tugas lain yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan kewenangan sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pekerjaan tersebut adalah:

- a. Mengusulkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga.
 2. Perubahan paket pekerjaan dan/atau
 3. Perubahan Jadwal kegiatan pengadaan.
- b. Menetapkan tim pendukung.
- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas.
- d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayar kepada penyedia barang/jasa.
- e. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Saksi Drs. Soritua Hasibuan meminta bantuan Saksi Ir. Fachri Lubis selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga secara lisan untuk membuat desain/gambar dan RAP untuk pekerjaan tersebut selanjutnya Saksi Ir. Fachri Lubis memerintahkan Saksi Goldstar Lumban Tobing selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk membantu, berdasarkan RAB (riancaian Anggaran Pembangunan) untuk pekerjaan pembangunan gedung dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp1.257.732.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2011 Saksi Ir. Rizal Fachri Lubis selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga melalui Surat Keputusan Nomor 800/113-A-DPUK/2011 mengangkat panitia Pengadaan Barang/jasa Tahun Anggaran 2011 dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor 600/165/2011 tanggal 17 Juli 2011 tentang Pengangkatan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2011 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Panitia
1	Basarulla Lubis	Sekretaris Dinas Pekerja Umum Kota Sibolga	Ketua Merangkap Anggota
2	Delima Napitupulu, S.T.	Kasi Data Pengawas Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum	Anggota

Hal.55 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



		Kota Sibolga	
3	Oesman Hasibuan	Kabid Penyehatan Lingkungan Perumahan dan Pertambangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga	Anggota
4	Sarmadan Harahap, S.T.	Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga	Anggota
5	Bahani Indah Hapsari, Amd	Staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga	Anggota
6	Sekretaris		
	a) Ora ola Lina Manurung, M.T.	Staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga	Staf Sekretariat
	b) James Parulian	Staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga	Staf Sekretariat
	c) Tulus Tumpal Panggabean	Staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga	Staf Sekretariat
	d) M. Rani Hutagalung	Staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga	Staf Sekretariat

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, Saksi Drs. Soritua Hasibuan mengirim Surat Nomor 900/2287/2011 kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk meminta bantuan panitia pengadaan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk melaksanakan pelelangan atas kegiatan proyek pembangunan Kantor Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011.

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, ULP Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011 melaksanakan pelelangan melalui pelelangan umum dengan pasca kualifikasi Nomor 004/ULP/DPUK/2011 di antaranya paket pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruangan kantor Dinas PKAD Kota Sibolga dengan nilai RAB Rp1.257.732.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Berdasarkan daftar rekanan yang mengambil dokumen kualifikasi yang ditandatangani oleh ULP barang/jasa tahun 2011 Saksi BARARULAN LUBIS, Saksi OESMAN HASIBUBUAN, Saksi SARMADAN HARAHAP, S.T. dan Saksi BAHANI INDAH, A.Md terdapat 11 (sebelas) perusahaan yaitu:

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA PENDAFTAR
1	CV. CITRA BIRU	BOY ALEXANDER . P. SIMATUPANG
2	CV. YUDDI AGUNG	RAHMAT SALEH SIMANJUNTAK
3	CV.WAHANA KARYA INDONESIA	IIHAM SIGALINGGING
4	CV. SURYA INDONESIA BARU	DAHNIATY MARBUN
5	CV.TRI MITRA PERKASA	ADE PAHALA PANGARIBUAN
6	CV. DAYA CONTRUKSI	INDRA FLANTURI NASUTION
7	CV. BIMA SURYA	CHARLES PARDEDE
8	PT. ERATAMA PUTRA PERKASA	ASMU'I-AR
9	CV. YAKIN JAYA	IRWANTO NAINGGOLAN
10	CV. MILENIUM 2011	ERNAT SILALAH
11	CV. ELLATEC DWIDAYA	ILHAM HIDAYAT TANJUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 8 Juli 2011 Pukul 10.00 WIB dilakukan pembukaan dokumen penawaran dari penyedia jasa sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 009/ULP/DPUK/2011 yang disaksikan oleh perwakilan LSM Perkasa yaitu Saksi Binsar Simatupang dan calon penyedia barang yaitu CV. Hotma, dimana terdapat 8 (delapan) perusahaan penawar yaitu:

					Dokumen Penawaran Teknis					
No	Nama Perusahaan	Jaminan Penawaran Asli	Daftar Kuantitas Harga	Surat Kuasa	Metoda Pelaksanaan	Jadwal Waktu Pelaksanaan	Spesifikasi Teknis	Daftar Personil	Jenis Kapasitas dan Jumlah Peralatan Utama	Dokumen Kualifikasi
1	CV. Wahana Karya Indonesia	v	v	v	v	v	v	---	---	v
2	CV. Maruli Asi	v	v		v	v	v	V	v	v
3	CV. Yuddi Agung (Pemenang)	v	v		v	v	v	---	---	v
4	CV. Surya	v	v		v	v	v	---	---	v

Hal.57 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Indo nesi a Baru									
5	CV. Kurn ia	v	v		v	v	v	V	v	v
6	CV. Citra Baru	v	v		v	v	v	V	v	v
7	CV. Mub di R.N.	v	v		v	v	v	V	v	v
8	CV. Ellat ec Dwid aya	v	v		v	v	v	V	v	v

Bahwa pada bulan Juli 2011 (tanpa tanggal) ULP Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011 melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penerima barang/jasa dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama penyedia	Hasil Evaluasi					Keterangan
		Koreksi Aritmetika Lulus	Administrasi Lulus	Tekniks Lulus	Harga Tidak Lulus	Kualifikasi -	
1.	CV. Ellatec Dwidaya	(Rp1.126.915.000)					Harga satuan pekerjaan pada daftar harga dan analisa perhitungan untuk keramik setara roman ukuran 20x20 cm, 20x25 cm, dan 40x 40 cm dianggap terlalu dipaksakan sehingga tidak akan mungkin dapat direalisasikan untuk memenuhi seperti yang

Hal.58 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

							diajukan dalam penawaran
2.	CV. Mubdi R.N	Lulus (Rp1.141.063.000)	Tidak Lulus	-	-	-	Alamat tujuan jaminan penawaran tidak sesuai
3.	CV. Citra Baru	Lulus (Rp1.015.210.000)	Lulus	Lulus	Lulus	Tidak Lulus	Tidak ada melampirkan surat keterangan Fiskal
4.	CV. Kurnia	Lulus (Rp1.137.594.000)	Lulus	Lulus	Lulus	Tidak Lulus	Tidak ada melampirkan surat keterangan Fiskal (SKF) pada dokumen kualifikasi
5.	CV. Wahana Karya Indonesia	Lulus (Rp1.245.095.000)	Tidak Lulus	-	-	-	Surat penawaran tidak bernomor dan jangka waktu pelaksanaan (180 hari) tidak sesuai dengan dokumen lelang (150 hari)
6.	CV. Surya Indonesia Baru	Lulus (Rp1.246.184.000)	Tidak Lulus	-	-	-	Surat penawaran tidak bernomor dan jangka waktu pelaksanaan (180 hari) tidak sesuai dengan dokumen lelang (150 hari)
7.	CV. Maruli Asi	Lulus (Rp1.065.174.000)	Tidak Lulus	-	-	-	Jangka waktu pelaksanaan (180 hari) & Nilai Jaminan Penawaran

Hal.59 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							tidak sesuai dengan dokumen lelang
8.	CV. Yuddi Agung	Lulus (Rp1.244.057.000)	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	(Pemenang)

Bahwa dalam melakukan evaluasi ULP barang/jasa Tahun Anggaran 2011 menggunakan sistem ambang batas dalam evaluasi teknis sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan, namun ULP barang/jasa Tahun Anggaran 2011 tidak menentukan tentang berapa nilai ambang batas yang dapat lulus dalam evaluasi teknis di dokumen pengadaan dan mengenai bobot penilaian dalam evaluasi teknis tidak ditetapkan dalam dokumen pengadaan hal tersebut merupakan kesepakatan tak tertulis dari pihak ULP barang/jasa Tahun Anggaran 2011 selanjutnya ULP barang/jasa Tahun Anggaran 2011 tidak melakukan konfirmasi tertulis terkait keabsahan/keaslian jaminan penawaran yang mana hal tersebut merupakan kelalaian dari ULP barang/jasa 2011 karena dengan adanya materai yang tertera dalam jaminan penawaran maka jaminan penawaran tersebut telah sah dan terkait dokumen jadwal waktu pelaksanaan yang ditawarkan oleh CV. YUDDI AGUNG Rudy Azhari adalah 6 (enam) bulan, melebihi batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP yaitu 150 hari kalender, ULP terfokus pada surat penawaran sehingga ULP tidak meninjau waktu pelaksanaan dari CV. YUDDI AGUNG serta tidak melakukan pengecekan personil serta daftar peralatan utama dalam dokumen penawaran, seharusnya CV. YUDDI AGUNG tidak lulus dalam pelelangan ini hal ini merupakan kesalahan evaluasi administrasi yang dilakukan oleh ULP penyedia barang/jasa Tahun Anggaran 2011.

Bahwa Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. selaku PPK tidak ada menyusun dan menetapkan HPS dan membuat spesifikasi teknis, gambar serta rancangan kontrak kepada Panitia pengadaan sehingga perbuatan Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. yang tidak memedomani Surat Keputusan Nomor 900/2284/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen serta Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 11 Ayat 1 huruf a, dimana HPS dan spesifikasi teknis tersebut akan dipergunakan oleh Panitia ULP dalam menentukan pemenang lelang sesuai dengan Pasal 17 Ayat 2 huruf f sebagaimana Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Hal.60 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Namun pada tanggal 27 Juli 2011, ULP Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, membuat berita cara hasil pelelangan (BAHP) Nomor 012/ULP/DPUK/2011, yang menyimpulkan, bahwa penyedia jasa untuk ditetapkan sebagai calon pemenang adalah CV. Yuddi Agung selanjutnya dibuatlah Berita acara penetapan pemenang Pelelangan Nomor 013/ULP/DPUK/2011, menetapkan CV. Yuddi Agung sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini Penambahan ruang kantor Dinas PKAD Kota Sibolga dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp1.244.057.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah) yang selanjutnya dilakukan pengumuman pada tanggal 28 Juli 2011 dengan Surat Nomor 014/ULP-DPUK/2011.

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011, Saudara M. Rizal Rusli selaku Direktur CV. Ellatec Dwidaya mengajukan sanggahan pengumuman melalui Surat Nomor 14/CV.EDD/Sanggah/VIII/2011 perihal Sanggahan Pengumuman pemenang pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini yang pada pokoknya menyatakan terdapat selisih harga yang sangat signifikan antara nilai yang diajukan oleh CV. Ellatec Dwidaya sebesar Rp1.140.355.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan nilai penawaran yang diajukan oleh CV. Yuddi Agung sebesar Rp1.244.057.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2011, unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011 melalui Surat Nomor 021/ULP/DPUK/2011 perihal Jawaban atas Sanggahan Pengumuman Nomor 014/ULP-DPUK/2011 kepada Direktur CV. Ellatec Dwidaya yang menjelaskan bahwa penawaran dari CV. Ellatec Dwidaya terlalu dipaksakan, dimana pada daftar harga dan analisa perhitungan tercantum harga 1 M2 keramik setara Roman untuk 20 X 20 cm untuk lantai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), keramik setara Roman untuk 20 X25 untuk dinding Rp3.900,00 (tiga ribu sembilan ratus rupiah), keramik setara Roman untuk 40 X40 cm adalah Rp12.800,00 (dua belas ribu delapan ratus rupiah). Menurut ULP, harga yang ditawarkan CV. Ellatec Dwidaya tersebut tidak akan dapat direalisasikan apabila harus memenuhi setara dengan Roman yang diajukan.

Bahwa pada satu hari sebelumnya pada tanggal 3 Agustus 2011 Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011, melalui Surat Nomor 01/UND/PKK-DPKAD/VIII/2011 mengundang CV.

Hal.61 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuddi Agung untuk menghadiri pengambilan SPPBJ dan Rapat Prakontrak yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2011, adapun hasil Rapat Pra Kontrak antara Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. dan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pra-Kontark Nomor 01/RPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 antara lain:

- a) Waktu pelaksanaan pekerjaan disepakati selama 143 hari sejak diterbitkannya surat perintah mulai kerja (SPMK).
- b) Jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari harga kontrak diterbitkan oleh bank atau asuransi suretye bond dengan format disesuaikan dengan penerbit jaminan tersebut di atas.
- c) Setiap harinya penyedia jasa harus membuat catatan harian yang diketahui oleh pengawas pekerjaan.
- d) Semua ketentuan dan persyaratan dalam dokumen kontrak mengikat, namun apabila pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan ditemukan saran dan masukan dari pejabat membuat komitmen serta disepakati untuk menjadi ketentuan, maka dinyatakan berlaku.

Bahwa tindakan Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menerbitkan SPPBJ pada tanggal 02 Agustus 2011 dalam masa sanggahan, telah menyalahi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 62 Ayat 2 huruf d yaitu : masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding“.

Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011 Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 dan Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG serta diketahui Saksi Drs. Soritua Hasibuan selaku kepala Dinas PKAD Sibolga menandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Nomor 01SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 dengan total harga kontrak sebesar Rp1.244.057.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 9 Agustus 2011 Saksi Rudy Azhari selaku Wakil Direktur CV. Yuddi Agung menyerahkan sertifikasi jaminan pelaksanaan pekerjaan Nomor 12.06.05.2011.0030 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja Putra Cabang Sumatra Utara dengan nilai jaminan sebesar Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta rupiah dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) selanjutnya diterbitkan surat perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 01/SPMK/PPK-DPKAD/VIII/2011.

Hal.62 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Kepala Dinas PKAD Kota Sibolga atas nama Drs. Soritua Hasibuan menyampaikan perubahan item pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 kepada Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG berupa perubahan fungsi ruang, tampak bangunan, tangga, dll kemudian dalam perubahan ini Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK menyetujuinya lalu memerintahkan Saksi Rudy Azhari, S.E. untuk membuat surat permohonan tambah kurang atau CCO atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011.

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG melalui Surat Nomor 01/CV.YA/VIII/2011 perihal Permohonan pekerja tambah kurang CCO kepada PPK Dinas PKAD Kota Sibolga mengajukan permohonan pekerja tambah kurang pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 di dalam surat permohonan tersebut disebutkan bahwa alasan permohonan alasan pekerjaan tambah kurang atau CCO adalah terjadi perubahan pekerjaan dari perencanaan awal karena adanya perubahan fungsi ruang, tampak bangunan, tangga.

Berdasarkan laporan harian pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh Yovi Ansyah Putra, S.T. selaku tenaga teknik dari kontraktor pelaksana CV. YUDDI AGUNG dan diperiksa dan ditandatangani oleh Saksi Kariaman Waruwu selaku pengawas lapangan pelaksana pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 dimulai sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan selesainya tanggal 22 Desember 2011.

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Saksi Adiram Ompusunggu, S.T. selaku Direksi Teknis melalui Surat Nomor 01/P-CCO/2011 perihal Penyampaian Revisi Perhitungan anggaran, menyampaikan rincian perhitungan anggaran dan gambar desain baru atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 kepada PPK Dinas PKAD Kota Sibolga, begitu juga dengan tenaga teknis CV. YUDDI AGUNG atas nama Yovi Ansyah Putra, S.T. telah membuat kontrak *Cange Order* atau CCO pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahunn Anggaran 2011 yang mana kontrak *Cange Order* tersebut Saksi Kariaman Waruwu selaku Pengawas Lapangan dan diketahui oleh Adiram

Hal.63 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ompusunggu selaku teknis serta disetujui oleh Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG dan Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 turut menyetujui dan dari rincian perubahan volume item pekerjaan tambah kurang (CCO) tersebut diperoleh hasil penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume sebelum CCO	Harga Sebelum CCO (Rp)	Pekerjaan Tambah (Kurang)	Volume setelah Cco	Harga setelah CCO (Rp)
A	Pekerjaan Pendahuluan						
1	Pekerjaan Pembongkaran bangunan Lama	-	1.00	5.750.000,00	-1.00	-	-
2	Pekerjaan Pembongkaran Beton/Pas Batu bata	M2	-	-	189.65	189,65	16.897.346,65
3	Pekerjaan Pembongkaran rangka atap kayu dan atap seng	-	-	-	1.00	1.00	4.500.000,00
4	Pengukuran dan Pemasangan Bauwplank	M	118.00	5.770.200,00	-	118.00	5.770.200,00
5	Membuang bekas bongkaran	-	-	-	1.00	1.00	2.250.000,00
6	Papan Nama Proyek	-	1.00	300.000,00	-	1.00	300.000,00
B	Pekerjaan Tanah						
1	Pekerjaan galian tanah pondasi	M3	28.22	1.357.777,08	-10.94	17.28	831.409,92
2	Pekerjaan urukan tanah kembali	M3	8.47	135.841,46	-3.44	5.03	80.640,86
3	Pekerjaan urukan Pasir di bawah	M3	8.88	930.108,96	-0.29	8.59	899.786,15

Hal.64 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pondasi T=10 cm						
4	Pekerjaan timbunant tanah menurut trap elevasi	M3	18.30	1.523.255,40	-18.30	-	-
5	Pekerjaan Cerocok kayu @15cm= 2,50 m	M	378.00	33.073.877,34	-54.00	324.00	28.349.037,72
6	Pekerjaan lantai kerja tapak/sloop 1:3:5 T 10 cm	M3	2.02	1.353.337,42	1.00	3.02	2.021.966,50
7	Pekerjaan Beton Rabat 1:3:5	M3	-	-	5.90	5.90	3.952.817,22
C.	Lantai Dasar						
	C1 Pekerjaan Beton						
1	Pekerjaan Pondasi Tapak beton Bertulang Cor 1 : 2 :3	M3	5.04	15.571.427,56	-0.72	4.32	13.346.937,91
2	Pekerjaan sloop cor 1:2:3: 20 X 50	M3	7.05	18.611.255,38	-0.60	6.45	17.027.318,75
3	Pekerjaan sloop cor 1:2:3 15 X20	M3	-	-	0.32	0.32	973.776,864
4	Pekerjaan stik kolom beton bertulang cor 1:2:3	M3	0.66	4.568.396,68	-0.10	0.56	3.893.519,90
5	Pekerjaan kolom struktur 1:2:3 @ 30 cm	M3	0.54	3.455.888,01	-0.54	-	-
6	Pekerjaan kolom struktur 1:2:3 @ 40 cm	M3	-	-	0.50	0.50	3.225.495,48
7	Pekerjaan kolom struktur A cor 1:2:3 , 0.30 X0.30	M3	2.25	14.358.698,91	0.99	3.24	20.676.526,43
8	Pekerjaan kolom struktur B cor 1:2:3	M3	0.30	1.269.846,01	-0.30	-	-

Hal.65 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0,30 X0,30						
9	Pekerjaan kolam praktis 15 X 15 cm	M3	0.10	419.119,09	0.24	0.34	1.414.526,93
10	Pekerjaan balok 0,20 X 0.50 cor 1:2:3	M3	6.12	35.173.494,18	-0.37	5.75	33.065.383,45
11	Pekerjaan balok 0,20 X0,25 cor 1:2:3	M3	0.75	4.706.885,67	1.09	1.84	11.552.580,19
12	Pekerjaan plat lantai cor 1:2:3	M3	19.07	111.076.909,62	-5.27	13.80	80.399.995,10
13	Pekerjaan tangga beton cor 1:2:3	M3	1.08	5.187.861,83	-1.08	-	-
	C2 Pekerjaan Dinding dan Pasangan						
1	Pondasi batu bata camp 1 :2	M2	26.07	2.29.784,04	-7.47	18.60	1.640.099,08
2	Pas dinding batu camp 1 :4	M2	135.54	10.619.240,48	-9.72	125.82	9.857.701,32
3	Plesteram camp 1 :2 pada pondasi batu bata	M2	45.39	1.991.511,67	-23.07	22.32	979.302,50
4	Plesteram camp 1 :4 untuk dinding batu bata	M2	271.08	10.505.092,76	-19.44	251.64	9.751.739,49
	C3 Pekerjaan kayu/konsen/pintu/Jendela/kaca						
1	Kosen pintu/Jendela kayu kapur	M3	0.98	6.966.084,51	0.11	1.09	7.747.991,96
2	Pemasangan pintu panil kayu	M2	6.72	2.942.533,44	5.04	11.76	5.149.433,52
3	Jendela panel kaca	M2	11.52	4.970.149,63	2.76	14.28	6.160.914,65
4	Pemasangan kunci tanam pada daun pintu	Set	3.00	346.777,20	4.00	7.00	809.146,80
5	Pasangan	Bh	9.00	201.366,00	12.00	21.00	469.854,00

Hal.66 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	engsel pintu						
6	Pasangan grendel pintu	Bh	3,00	54.021,42	4.00	7.00	126.028,98
7	Pasangan hendel daun pintu	Bh	3,00	55.242,00	4.00	7.00	128.898,00
8	Pasangan engsel Jendela	Bh	32.00	519.552,00	4.00	36.00	584.496,00
9	Pasangan grendel Jendela	Bh	16.00	177.186,24	2.00	18.00	199.334,52
10	Pasangan hak angin jendela	Bh	32.00	1.096.128,00	4.00	36,00	1.233.144,00
11	Pasangan hendle Jendela	Bh	16.00	294.624,00	2.00	18.00	331.452,00
	C4 Pekerjaan Lantai						
1	Pemasangan kramik (lantai) ukuran 40 X40 cm	M2	88.50	13.714.077,71	15.76	104,26	16.156.268, 27
2	Pemasangan kramik (tangga) 40 X 40 cm	M2	7.56	1.171.507,65	-7.56	-	-
3	Pemasangan kramik lantai ukuran 20 X20 cm	M2	3.60	488.638,98	-3.60	-	-
4	Pemasangan kramik (dinding) ukuran 20 X 25 cm	M2	18.36	3.243.417,56	-18.36	-	-
5	Bon-Bon keramik	M	4.10	101.024,00	-	4.10	101.024,00
	C5 Pekerjaan langit- langit/plafond						
1	Plafond gypsun tebal 9 mm + rangka hollow	M2	100.50	10.222.912,26	-15.00	85,50	8.697.104,46
2	Pemasangan list plafond	M	91.50	2.398.850,01	-20.00	71.50	1.874.511,21

Hal.67 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	gypsun						
	C6 Pekerjaan Instalasi air/sanitasi						
1	Pemasangan kloset jongkok	Bh	1.00	1.020.994,50	-1.00	-	-
2	Pemasangan kran air	Bh	1.00	29.898,00	-1.00	-	-
3	Pemasangan floord drain	Bh	1.00	40.642,40	-1.00	-	-
4	Bak air fiber glass	Bh	1.00	856.587,60	-1.00	-	-
5	Pemasangan Jaringan pipa air bersih dia ¾	M	18.00	538.164,00	-18.00	-	-
6	Pemasangan jaringan pipa air kotor 4 inci	M	25.00	8.043.477,75	-25.00	-	-
7	Pemasangan jaringan pipa air bersih 3 inci	M	40.00	8.879.864,40	-40.00	-	-
8	Pembuatan Septictank	Bh	1.00	3.555.621,901	-1.00	-	-
	C7 Pekerjaan instalasi listrik/penerangan						
1	Pemasangan kabel untuk titik-titik api	Tik	49.00	4.802.490,00	-27.00	22.00	2.156.220,00
2	Pemasangan armature down light	Bh	32.00	2.077.360,00	-10.00	13.00	1.174.160,00
3	Pemasangan fitting plafond	Bh	21.00	646.968,21	-16.00	5.00	154.040,05
4	Pemasangan bola lampu SLE 18 watt	Bh	44.00	1.330.758,44	-26.00	18.00	544.401,18
5	Pemasangan stop kontak	Bh	5.00	88.605,05	-1.00	4.00	70.884,04
6	Pemasangan saklar tunggal	Bh	4.00	77.462,02	-	4.00	77.462,04
7	Pemasangan saklar double	Bh	2.00	61.271,02	-1.00	1,00	30.635,51
8	Pemasangan sekring box	Bh	1.00	160.429,50	-	1.00	160.429,50
	C8 Pekerjaan						

Hal.68 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	railing /jerejak						
1	Pembuatan Railling tangga jerajak jendela	M	4.90	3.501.916,66	-4.90	-	-
2	Pembuatan jerajak jendela	M2	15.36	10.308.740,04	-15.36	-	-
3	Pembuatan tangga putar dan pagar pengaman	-	-	-	1.00	1.00	13.000.000,00
4	Pembuatan railing tangga utama	-	-	-	1.00	1.00	15.500.000,00
	C9 Pekerjaan Pengecatan						
1	Cat kilat kayu	M2	23.18	675.044,25	37,72	60.90	1.773.520,06
2	Cat tembok pada bidang permukaan dinding	M2	271.08	4.463.462,32	662,34	933,42	16.369.208,34
3	Cat tembok pada bidang permukaan plafond	M2	306,50	5.046.669,62	77.40	383,90	6.321.097,77
D	Lantai satu						
1	Pekerjaan kolom struktur 1:2:3 Uk 0,30 X 0,30	M3	0.31	1.983.935,71	1.15	1,46	9.343.697,23
2	Pekerjaan kolom struktur 1:2:3 uk 0,20 X0, 25	M3	2.17	9.553.859,56	-2.17	-	-
3	Pekerjaan kolom struktur 1:2:3 uk 0,15 X 0,25	M3	-	-	1.42	1.42	6.251.834,37
4	Pekerjaan kolom praktis 15 X 15	M3	1.74	7.292.672,18	0.20	1.94	8.130.910,37
5	Pekerjaan Balok 0,20 X 0,40	M3	2.08	11.954.390,18	0.58	2.66	15.287.825,90
6	Pekerjaan balok 0,20 X 0,40	M3	5.82	36.525.432,80	0.33	6.15	38.596.462,49
7	Pekerjaan ring balok 15 X20 cm	M3	0.21	791.933,03	0.92	1.13	4.261.353,90

Hal.69 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pekerjaan plat leufel beton bertulang	M3	0,72	3.173.028,01	-0.72	-	-
	D2 Pekerjaan Dinding dan Pasangan						
1	Pasang dinding batu camp 1 : 4	M2	223.19	17.486.412,00	78.05	301.24	23.601.446,09
2	Plesteran camp 1 4 untuk dinding batu bata	M2	446.38	17.298.448,08	156.10	60248	23.347.750,80
	D3 Pekerjaan Kayu/Kose/Pintu/Jendela/Kaca						
1	Kosen pintu/jendela kayu kapur	M3	2.38	16.917.633,81	-0.70	1.68	11.937.508,91
2	Pemasangan Pintu kayu panil kaca	M2	10.08	4.413.800,16	-3.36	6.72	2.942.533,44
3	Jendela panel kaca	M2	31.68	13.667.911,49	-0.96	30.72	2.942.533,44
4	Pemasangan kunci tanam pada daun pintu	Set	6.00	693.554,40	-2.00	4.00	462.369,60
5	Pasang engsel pintu	Bh	18	402.732,00	-6.00	12.00	268.488,00
6	Pasang grendel pintu	Bh	6.00	108.024,84	-2.00	4.00	72.016,56
7	Pasang hadel daun pintu	Bh	6.00	110.484,00	-2.00	4.00	73.656,00
8	Pasang engsel jendela	Bh	76.00	1.233.936,00	-4.00	72.00	1.168.992,00
9	Pasang gredel jendela	Bh	38.00	420.817,32	-24.00	36.00	398.669,00
10	Pasang hak angin jendela	Bh	76.00	2.603.304,00	-4.00	72.00	2.466.288,00
11	Pasang hadle jendela	Bh	38.00	699.732,00	-2.00	36.00	662.904,00
	D4 Pekerjan Lantai						
1	Pemasangan kramik (lantai)	M2	325.37	50.419.767,94	-	183,45	28.427.655,99

Hal.70 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukuran 40 X 40 cm						
2	Pemasangan keramik (lantai) ukuran 20 X20 cm	M2	3.00	407.199,15	5.25	8.25	1.119.797,66
3	Pemasangan kramik (dinding) ukuran 20 X25 cm	M2	11.16	1.971.189,11	12.96	24.12	4.260.960,33
4	Bon-bon keramik	M	4.60	113.344,00	-	4.60	113.344,00
	D5 Pekerjaan langit-langit /plafond						
1	Plafond gypsun tebal 9mm + rangka hollow	M2	328.00	33.364.330,56	- 148,05	179,95	18.304.607,57
2	Pemasangan list plafond gypsun	M	257.40	6.748.240,36	-92.56	164,84	4.321.600,39
3	Lafond triplek #3 mm + rangka	-	-	-	92,30	92,30	13.083.386,55
	D6 Pekerjaan instalasi air/sanitasi						
1	Pemasangan kloet jongkok	Bh	1.00	1.020.994,50	1.00	2.00	2.041.989,00
2	Pemasangan kran air	Bh	1.00	29.898,00	1.00	2.00	59.796,00
3	Pemasangan float drain	Bh	1.00	40.642,40	1.00	2.00	81.284,80
4	Bak air fiber glass	Bh	1.00	856.587,60	1.00	2.00	1.713.175,00
5	Pemasangan jaringan pipa air besim dia 3/4	M	20.00	597.960,00	-	20.00	597.960,00
6	Pemasangan jaringan pipa air kotor dia 4	M	15.00	4.826.086,65	-	15.00	4.826.086,65
7	Pemasangan jaringan pipa air bekas dia 3	M	20.00	4.439.932,20	-	20.00	4.439.932,20

Hal.71 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	D7 Pekerjaan Instalasi listrik/Penerangan						
1	Penarikan kabel untuk titik-titik lampu	Ttk	88.00	8.624.880,00	-58.00	30.00	2.940.300,00
2	Pemasangan fitting plafond	Bh	-	-	11.00	11.00	338.888,11
3	Pemasangan armateur down light	Set	74.00	6.683.680,00	-59.00	15.00	1.354.800,00
4	Pemasangan bola lampu SLE 18 watt	Bh	74.00	2.238.093,74	-48.00	26.00	786.357,26
5	Pemasangan stop kontak	Bh	14.00	248.094,14	-10.00	4.00	70.884,04
6	Pemasangan saklar tunggal	Bh	6.00	116.193,06	-2.00	4.00	77.462,04
7	Pemasangan saklar double	Bh	11.00	336.990,61	-10.00	1.00	30.635,51
	D8 Pekerjaan pengatapan						
1	Rangka atap baja ringan (spesifikasi pabrikan)	M2	727.69	215.627.645,42	24.91	752.60	233.008.926,80
2	Pemasangan atap genteng metal berwarna	M2	727.69	81.582.854,05	24.91	752,60	84.375.566,46
3	Pemasangan Rabung metal berwarna	M	50.96	5.500.607,11	1.05	52.01	5.613.943,80
4	Pemasangan Talang dalam	M	11.00	1.893.716,55	-	11.00	1.893.716,55
5	Pemasangan Listplank kayu kapur	M	-	-	99.50	99.50	7.020.415,35
	D 9 Pekerjaan Pengecatan						
1	Cat kilat kayu	M2	33.85	985.774,28	-2.60	31.25	910.057,50
2	Cat tembok pada bidang permukaan dinding	M2	446.38	7.349.860,96	444.58	890,96	14.670.153,82
3	Cat tembok pada bidang	M2	328.65	5.411.380,00	-0.65	328.00	5.400.677,44

Hal.72 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



	permukaan plafond						
E	Pekerjaan Tambahan						
1	Pembuatan relief secara keseluruhan	M	95.50	7.800.449,55	-	95.50	7.800.449,55
2	Pekerjaan Pembuatan tiang	Bh	-	-	2.00	2.00	5.000.000,00
F.	Pekerjaan lain- lain						
1.	Foto dokumen/admi nistarsi	Lbr	150.00	525.000,00	-	-	1.000.000,00
2	Laporan harian	Bln	6.00	13.000.000,00	-	6.00	3.750.000,00
3	Steling kerja	-	1.00	13.000.000,00	-	1.00	13.000.000,00
4	Lansir bahan	-	-	-	1.00	1.00	1.500.000,00
5	As bult drawing dan administrasi	-	-	-	1.00	1.00	1.750.000,00
6	Pembersihan akhir	-	1.00	450.000,00	-	-	1.050.000,00
	Jumlah						1.009.473.054, 79
	Profit						121.136.766,5 8
	PNN 10 %						100.947.305,4 8
	IMB						12.500.000,00
	Jumlah						1.244.057.126, 85
	Dibulatkan						1.244.057.000, 00

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011 telah dilaksanakan rapat pekerjaan CCO untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat perubahan Pekerjaan Nomor 01/PPK-DPKAD/VIII/2011 yang dibuat oleh Saksi Adiram Ompusunggu, S.T. selaku Direksi Teknis disetujui oleh Saudara Rudy Azhari selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG dan turut diketahui/disetujui oleh Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 dan Saksi Drs. Soritua Hasibuan selaku Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga.

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 kontrak *cange order* (CCO) Nomor 01/CCO/PPK-DPKAD/VIII/2011 atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan Ruang Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 untuk pengerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 telah dibuat laporan hariannya oleh Yovi Ansyah Putra, S.T. selaku Tenaga Teknik dari Kontraktor Pelaksana CV. YUDDI AGUNG selanjutnya diperiksa dan ditandatangani oleh Saksi Kariaman Waruwu selaku Pengawas Lapangan.

Bahwa pada tanggal 03 November 2011 Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG melalui Surat Nomor 01/CV.YD/2011 perihal Permintaan Pembayaran Termin Pertama kepada PPK Dinas PKAD Kota Sibolga atas nama Saksi Rudy Azhari, S.E., memohon agar diberikan pembayaran sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan di lapangan dan disetor ke Rekening Nomor 0290.0104003878.0 pada PT. SUMUT Cabang Sibolga.

Bahwa pada tanggal 04 November 2011 Saksi Adiram Ompusunggu, S.T. selaku Direksi Teknis, Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG dan Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 02/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 telah mencapai 65 % kemudian dokumen (laporan progres, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Berita Acara Pemberian Kuitansi) diserahkan kepada Pejabat Teknis Kegiatan atas nama Saksi Rahmawati Siregar, S.E. untuk menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran tersebut ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama M. Zubir dan menyampaikannya kepada Pejabat Penata Usaha Keuangan untuk memeriksa dokumen sekaligus menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPM).

Bahwa pada tanggal 8 November 2011 Saksi M. Zubir selaku Bendahara PKAD Kota Sibolga mengajukan Surat Permintaan Belanja Langsung (SPP/LS) Barang/Jasa Nomor 903/131/SPP-LS-BJ/2011 kepada Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PKAD Kota Sibolga sebesar Rp746.434.200,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Hal.74 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 9 November 2011 Terdakwa Agustinus Hutabarat, SE selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM/LS) Nomor 900/131/SPM-LS/2011 sebesar Rp746.434.200,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga atas nama Saksi Amarula Gultom, S.E. agar menerbitkan SP2D kepada Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG untuk keperluan pembayaran angsuran I (60%) pekerjaan pembangunan gedung dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai Kontrak Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, termasuk di dalamnya potongan PPN sebesar Rp67.857.655,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan PPh Pasal 4 jasa konstruksi sebesar Rp13.571.531,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan pada tanggal yang sama Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku Kuasa Penggunaan Anggaran PKAD Kota Sibolga menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan (SPM-LS) sebesar Rp746.434.200,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 (Pihak I), Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG (Pihak II), Saksi Rahmawati Siregar, S.E. selaku PPTK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 serta diketahui oleh Saksi Drs. Soritua Hasibuan selaku Kepala Dinas PKAD Kota Sibolga menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 04/PPK-DPKAD/BAP/2011 untuk pembayaran angsuran pertama (60%) atau sebesar Rp746.434.200,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) pekerjaan pembangunan gedung dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai kontraknya Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 selanjutnya pada bulan yang sama Bendahara Pengeluaran PKAD Kota Sibolga atas nama Saksi M Zubir membuat tanda terima pembayaran angsuran pertama sebesar 60% atau senilai Rp746.434.200,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) kepada Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG yang mana tanda terima tersebut juga diketahui/ditandatangani oleh Saksi Rahmawati Siregar, S.E. selaku PPTK Dinas PKAD Kota Sibolga serta disetujui oleh Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun

Hal.75 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 kemudian pada tanggal 9 November 2011 Saksi Amarula Gultom, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintahan Kota Sibolga berdasarkan SPM-LS Nomor 900/131/SPM-LS/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tersangka Agustinus Hutabarat selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 31580 melalui PT. BANK SUMUT untuk mencairkan/memindah bukukan dari bank Rekening Nomor 290-01.02.003505.0 uang sebesar Rp746.434.200,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) kepada Saksi Rudi Azhari, S.E./Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG dengan Nomor Rekening 290-01.04.00378.0 pada PT. BANK SUMUT Cabang Sibolga untuk keperluan belanja langsung pembayaran angsuran pertama 60% dari harga kontra pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 termasuk PPN sebesar Rp67.857.655,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan PPh Pasal 4 jasa konstruksi sebesar Rp13.571.531,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG melalui Surat Nomor 02/CV.YD/VIII/2011 perihal Permintaan termin kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PKAD Kota Sibolga dimohon agar diberikan pembayaran sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan dan disetor ke Rekening Nomor 290-01.02.003505.0 PT. BANK SUMUT Cabang Sibolga selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2011 Saksi M. Zubir selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PKAD Kota Sibolga mengajukan Surat Permintaan Belanja Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa Nomor 903/213/SPP-LS-BJ/2011 kepada Pengguna Anggaran Dinas PKAD sebesar Rp373.217.100,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) lalu ditanggal yang sama Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku Pengguna Anggaran Dinas PKAD menerbitkan Surat Perintah Membayar SPM-LS Nomor 900/213/SPM-LS/2011 sebesar Rp373.217.100,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga yaitu Saksi Amarula Gultom, S.E. agar menerbitkan SP2D kepada Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG untuk keperluan pembayaran angsuran II sebesar 90%-60% =30% dari harga kontrak kantor dalam hal ini penambahan ruang kerja kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Kontrak Nomor

Hal.76 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, termasuk di dalamnya potongan PPN sebesar Rp33.928.827,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan PPh Pasal 4 jasa konstruksi sebesar Rp6.785.765,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) kemudian di tanggal yang sama Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. menandatangani SPM-LS Nomor 900/213/SPM-LS/2011 sebesar Rp373.217.100,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) yaitu Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 (Pihak I), Saksi Rudy Azhary selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG (Pihak II), Saksi Rahmawati Siregar, S.E. selaku PPTK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 serta diketahui oleh Saksi Drs. Soritua Hasibuan selaku Kepala Dinas PKAD Kota Sibolga menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 07/PPK-DPKAD/BAP/2011 untuk pembayaran angsuran pertama (30%) atau sebesar 373.217.100,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) pekerjaan pembangunan gedung dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai kontraknya Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 selanjutnya pada bulan yang sama bendahara pengeluaran PKAD Kota Sibolga atas nama Saksi M. Zubir membuat tanda terima pembayaran angsuran kedua sebesar 30% atau senilai Rp373.217.100,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) kemudian di bulan yang sama (tanpa tanggal) Saksi M. Zubir selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PKAD Kota Sibolga membuat tanda terima uang pembayaran angsuran II sebesar 30% atau senilai Rp 373.217.100,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) kepada Rudy Azhari selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG yang mana tanda terima tersebut diketahui/ditandatangani oleh Saksi Rahmawati Siregar, S.E. selaku PPTK Dinas PKAD Kota Sibolga serta disetujui oleh Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga selanjutnya pada tanggal 21 November 2011 Saksi Amarula Gultom, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintahan Kota Sibolga berdasarkan SPM-LS Nomor 900/213/SPM-LS/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 32070 melalui PT. BANK SUMUT untuk mencairkan/memindah buku kan dari bank Rekening Nomor 290-01.02.003505.0 uang sebesar Rp373.217.100,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu

Hal.77 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus rupiah) kepada Saksi Rudi Azhari, S.E./Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG dengan Nomor Rekening 290-01.04.00378.0 pada PT. BANK SUMUT Cabang Sibolga untuk keperluan belanja langsung pembayaran angsuran dua 30% dari harga kontra pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 termasuk PPN sebesar Rp33.928.827,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan PPh Pasal 4 jasa konstruksi sebesar Rp33.928.827,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 Saksi M. Zubir selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PKAD Kota Sibolga mengajukan Surat Permintaan Belanja Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa Nomor 903/239/SPP-LS-BJ/2011 kepada Pengguna Anggaran Dinas PKAD sebesar Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) lalu ditanggal yang sama Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku Pengguna Anggaran Dinas PKAD menerbitkan Surat Perintah Membayar SPM-LS Nomor 900/239/SPM-LS/2011 sebesar Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga yaitu Saksi Amarula Gultom, S.E. agar menerbitkan SP2D kepada Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG untuk keperluan pembayaran angsuran III sebesar $95\%-60\%-30\%=5\%$ dari harga kontrak untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang kerja Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Kontrak Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, termasuk di dalamnya potongan PPN sebesar Rp5.654.805,00 (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah) dan PPh pasal 4 jasa konstruksi sebesar Rp1.130.961,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) kemudian tersangka Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 (Pihak I), Saksi Rudy Azhary selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG (Pihak II), Saksi Rahmawati Siregar, S.E. selaku PPTK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 serta diketahui oleh Saksi Drs. Soritua Hasibuan selaku Kepala Dinas PKAD Kota Sibolga menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 11/PPK-DPKAD/BAP/2011 atas pembayaran angsuran Termin ke III sebesar 5 % atau senilai 62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam

Hal.78 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini penambahan ruang kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai kontraknya Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 selanjutnya pada bulan yang sama Bendahara Pengeluaran PKAD Kota Sibolga atas nama Saksi M. Zubir membuat tanda terima pembayaran angsuran III sebesar 5% atau senilai Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian di bulan yang sama (tanpa tanggal) Saksi M. Zubir selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PKAD Kota Sibolga membuat tanda terima uang pembayaran angsuran III sebesar 5% atau senilai Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Rudy Azhari selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG yang mana tanda terima tersebut diketahui/ditandatangani oleh Saksi Rahmawati Siregar, S.E. selaku PPTK Dinas PKAD Kota Sibolga serta disetujui oleh Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga dan Saksi Drs. Soritua selaku Kepala Dinas PKAD Kota Sibolga selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2011 Saksi Amarula Gultom, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintahan Kota Sibolga berdasarkan SPM-LS Nomor 900/239/SPM-LS/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 32329 melalui PT. BANK SUMUT untuk mencairkan/memindah bukukan dari bank Rekening Nomor 290-01.02.003505.0 uang sebesar Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Saksi Rudi Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG dengan Nomor Rekening 290-01.04.00378.0 pada PT. BANK SUMUT Cabang Sibolga untuk keperluan belanja langsung pembayaran angsuran III 5% dari harga kontra pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 termasuk PPN sebesar Rp5.654.805 (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah) dan PPh Pasal 4 jasa konstruksi sebesar Rp1.130.961,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG melalui Surat Nomor 03/CV.YD/VIII/2011 perihal Permintaan pembayaran uang retensi, kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PKAD Kota Sibolga dimohon agar diberikan pembayaran sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan dan disetor ke Rekening Nomor 290-

Hal.79 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.02.003505.0 PT. BANK SUMUT Cabang Sibolga, kemudian pada tanggal 22 Desember 2011 Saudara Adiram Omposunggu, S.T. selaku Direksi Teknis, Saksi Rudi Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV.Yuddi Agung dan Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 8/PPK-DPKAD/BAHPL/2011, yang menyatakan bahwa seluruh hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Pada tanggal 23 Desember 2011 bertindak sebagai Pihak Pertama dan Saksi Rudi Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. Yuddi Agung bertindak sebagai Pihak Kedua, menandatangani Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor 9/PPK-DPKAD/BAPP/2011 yang menyatakan bahwa total prestasi pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini Penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sampai saat ini adalah sebesar 100%. Pada tanggal yang sama Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. juga menandatangani Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor 13/PPK-DPKAD/BAPP/2011 yang menyatakan bahwa total prestasi Pekerjaan Pembangunan gedung kantor dalam hal ini Penambahan ruang kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sampai saat ini adalah sebesar 100 %, Pada tanggal 27 Desember 2011 Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. selaku Pihak Pertama dan Saksi Rudi Azhari, S.E. selaku Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor 10/PPK/BA/2011 yang menyatakan telah mengadakan serah terima pekerjaan untuk yang pertama, pada tanggal yang sama Terdakwa juga menandatangani Surat Nomor 14/PPK/BA/2011 yang menyatakan telah mengadakan serah terima pekerjaan untuk yang kedua kali. selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2011 Saksi M. Zubir selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PKAD Kota Sibolga mengajukan Surat Permintaan Belanja Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa Nomor 903/240/SPP-LS-BJ/2011 kepada Pengguna Anggaran Dinas PKAD sebesar Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) lalu ditanggal yang sama Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku Pengguna Anggaran Dinas PKAD menerbitkan Surat Perintah Membayar SPM-LS Nomor 900/240/SPM-LS/2011 sebesar Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga yaitu Saksi Amarula Gultom, S.E. agar menerbitkan SP2D kepada Saksi Rudy Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG untuk keperluan pembayaran uang retensi sebesar 5% dari harga kontrak kantor dalam hal ini penambahan ruang kerja Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Kontrak Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8

Hal.80 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011, termasuk di dalamnya potongan PPN sebesar Rp5.654.805,00 (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah) dan PPh Pasal 4 jasa konstruksi sebesar Rp1.130.961,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) kemudian di tanggal yang sama Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. menandatangani SPM-LS Nomor 900/240/SPM-LS/ 2011 sebesar Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yaitu Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 (Pihak I), Saksi Rudy Azhary selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG (Pihak II), Saksi Rahmawati Siregar, S.E. selaku PPTK Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 serta diketahui oleh Saksi Drs. Soritua Hasibuan selaku Kepala Dinas PKAD Kota Sibolga menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 15/PPK-DPKAD/BAP/2011 atas pembayaran uang retensi sebesar 5 % atau senilai Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) pekerjaan pembangunan gedung dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai kontraknya Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 selanjutnya pada bulan yang sama Bendahara Pengeluaran PKAD Kota Sibolga atas nama Saksi M. Zubir membuat tanda terima pembayaran uang retensi sebesar 5% atau senilai Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian di bulan yang sama (tanpa tanggal) Saksi M. Zubir selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PKAD Kota Sibolga membuat tanda terima uang pembayaran uang retensi sebesar 5% atau senilai Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Rudy Azhari selaku Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG yang mana tanda terima tersebut diketahui/ditandatangani oleh Saksi Rahmawati Siregar, S.E. selaku PPTK Dinas PKAD Kota Sibolga serta disetujui oleh Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK Dinas PKAD Kota Sibolga dan Saksi Drs. Soritua Hasibuan selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2011 Saksi Amarula Gultom, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintahan Kota Sibolga berdasarkan SPM-LS Nomor 900/213/SPM-LS/ 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 32330 melalui PT. BANK SUMUT untuk mencairkan/memindah bukukan dari bank Rekening Nomor 290-01.02.003505.0 uang sebesar Rp62.202.850,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Saksi Rudi Azhari, S.E./Wakil Direktur CV. YUDDI

Hal.81 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG dengan Nomor Rekening 290-01.04.00378.0 pada PT. BANK SUMUT Cabang Sibolga untuk keperluan belanja langsung sebesar 5% dari harga kontra pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/SPPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 termasuk PPN sebesar Rp5.654.805,00 (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah) dan PPh Pasal 4 jasa konstruksi sebesar Rp1.130.961,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

Bahwa syarat-syarat pembayaran atas kegiatan pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 adalah laporan progres fisik pekerjaan, gambar dokumentasi, Surat Perintah Pembayaran yang ditujukan kepada PPK, SPP-LS yang ditujukan kepada PPTK, dan Bendahara SPM dan dalam proses pembayaran ini Tersangka Agustinus hutabarat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPK tidak mengikut sertakan PPTK untuk menandatangani dokumen SPP-LS, yang mana dalam hal ini peran PPTK dalam pencairan dana hanya menyampaikan dokumen berita acara pembayaran yang dibuat dan ditandatanganinya, sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Pasal 4 Ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pasal 4 Ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pasal 4 Ayat (3): Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 122 Ayat (10): Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal.82 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 184 Ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
6. Pasal 205 Ayat (1): PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang/jasa untuk disampaikan pada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
7. Pasal 205 Ayat (6): Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Pengguna Anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

Bahwa Tenaga Teknik rekanan dari CV. YUDDI AGUNG atas nama Yovi Ansyahputra, S.T. tidak pernah berjumpa atau berinteraksi dengan pengawas lapangan dinas PKAD atas nama Kariaman Waruwu dalam membuat/mengajukan laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan untuk diketahui oleh Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku PPK dalam pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011, dengan kata lain bahwa Yovi Ansyah Putra, S.T. selaku Tenaga Teknik dari CV. YUDDI AGUNG tidak pernah melakukan pengecekan langsung terhadap pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011, karena yang bersangkutan tidak pernah sekalipun datang ke lokasi pengerjaan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan perkembangan atau progres pengerjaan tersebut telah direkayasa oleh Saksi Rudy Azhari, S.E.

Bahwa tindakan Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. selaku KPA dan PPK yang turut memerintahkan untuk melakukan pembayaran proyek tersebut telah 100 % selesai tanpa ada dibentuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana diisyaratkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 95 Ayat 2 dan 3 dan tanpa ada masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan sebagaimana Pasal 95 Ayat 5 huruf b.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. yang tidak berpedoman Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Hal.83 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi CV. YUDDI AGUNG dan menimbulkan kerugian Negara/ perekonomian Negara sejumlah Rp175.373.655,40 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah dan empat puluh sen) sebagaimana laporan hasil investigasi lapangan pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 oleh Ahli Ir. Indra Jaya Pandia, M.T. dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik USU tanggal 13 November 2013 dan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor R-104/PWO-2/5/2014 tanggal 4 November 2014 yang dilakukan oleh Agus Dwi Pratama, dkk diperoleh hasil sebagai berikut yaitu:

No.	Uraian	Satuan	Volume Yang Dibayar	Volume Yang Terpasang	Selisih Volume Fisik	Harga Satuan Kontrak/CO (Rp)	Harga Satuan Terpasang (Rp)	Nilai Pekerjaan Yang Dibayarkan Sesuai Kontrak (Rp)	Nilai Pekerjaan Terpasang (Rp)
a.	b	c	d	e	f	g	h	i	j=(exh)
A.	Pekerjaan Pendahuluan								
1	Pekerjaan Pembongkaran Bangunan Lama	-	-	-	-	5,750,000.00	-	-	-
2	Pekerjaan Pembongkaran Beton/Pas. Batu Bata	M ²	189.65	189.65	-	89,097.53	6,415.20	16,897,346.56	1,216,642.68
3	Pekerjaan Pembongkaran Rangka Atap Kayu dan Atap Seng	-	1.00	1.00	-	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
4	Pengukur	M	118.	32.5	(85.	48,900.0	30,959.	5,770,20	1,006,

Hal.84 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	an dan Pemasangan Bouwplan k		00	0	50)	0	28	0.00	176.60
5	Membuang Bekas Bongkaran Papan	-	1.00	1.00	-	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
6	Nama Proyek Sub	-	1.00	1.00	-	300,000.00	-	300,000.00	-
	Jumlah						29,717,546.56	8,972,819.28	
B.	Pekerjaan Tanah								
1	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi	M³	17.28	21.45	4.17	48,114.00	39,105.00	831,409.92	838,802.25
2	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	M³	5.03	2.91	(2.12)	16,038.00	13,035.00	80,640.86	37,931.85
3	Pekerjaan Urugan Pasir di bawah Pondasi t=10 cm	M³	8.59	-	(8.59)	104,742.00	104,742.00	899,786.15	-
4	Pekerjaan Timbunan Tanah menurut Trap Elevasi	M³			-	83,238.00	-	-	-
5	Pekerjaan Cerocok Kayu Keras @ 15 cm L=2,50 m	M	324.00	324.00	-	87,497.03	87,497.03	28,349,037.72	28,349,037.72
6	Pekerjaan Lantai Kerja Tapak/Slo	M³	3.02	-	(3.02)	669,969.02	669,969.02	2,021,966.50	-

Hal.85 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	of 1:3:5 t 10 cm								
7	Pekerjaan Beton Rabat 1:3:5	M ³	5.90	6.04	0.14	669,969. 02	669,96 9.02	3,952,81 7.22	4,046, 612.88
	Sub Jumlah							36,135,6 58.37	33,27 2,384. 70
C.	Lantai Dasar C1								
	Pekerjaan Beton								
1	Pekerjaan Pondasi Tapak Beton Bertulang Cor 1:2:3	M ³	4.32	7.57	3.25	3,089,56 8.96	3,190,8 51.93	13,346,9 37.91	24,15 4,749. 11
2	Pekerjaan Sloof Cor 1:2:3 ; 20x50	M ³	6.45	10.9 7	4.52	2,639,89 4.38	3,916,3 06.32	17,027,3 18.75	42,96 1,880. 33
3	Pekerjaan Sloof Cor 1:2:3 ; 15x20	M ³	0.32	0.32	-	3,091,35 5.11	3,916,3 06.32	973,776. 86	1,253, 218.02
4	Pekerjaan Stik Kolom Beton Bertulang Cor 1:2:3	M ³	0.56	-	(0.5 6)	6,921,81 3.15	6,921,8 13.15	3,893,51 9.90	-
5	Pekerjaan Kolom Struktur 1:2:3 @ 30 cm	M ³			-	6,399,79 2.62		-	-
6	Pekerjaan Kolom Struktur 1:2:3 @ 40 cm	M ³	0.50	0.50	-	6,399,79 2.62	3,534,0 93.60	3,225,49 5.48	1,767, 046.80
7	Pekerjaan Kolom Struktur A	M ³	3.24	3.24	-	6,381,64 3.96	3,534,0 93.60	20,676,5 26.43	11,45 0,463. 26

Hal.86 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cor 1:2:3 ; 0,30x0,30 Pekerjaan								
8	Kolom Struktur B Cor 1:2:3 ; 0,30x0,30 Pekerjaan	M³			-	4,232,82 0.04		-	-
9	Kolom Praktis 15 x 15 cm Pekerjaan	M³	0.34	0.41	0.07	4,191,19 0.91	3,534,0 93.60	1,414,52 6.93	1,448, 978.38
10	Balok 0,20 x 0,50 Cor 1:2:3 Pekerjaan	M³	5.75	8.78	3.03	5,747,30 2.97	5,131,3 04.18	33,065,3 83.45	45,05 2,850. 70
11	Balok 0,20 x 0,25 Cor 1:2:3 Pekerjaan	M³	1.84	0.84	(1.0 0)	6,275,84 7.56	5,131,3 04.18	11,552,5 80.19	4,310, 295.51
12	Plat Lantai Cor 1:2:3 Pekerjaan	M³	13.8 0	10.8 3	(2.9 7)	5,824,69 3.74	6,091,0 63.95	80,399,9 95.10	65,96 6,222. 58
13	Tangga Beton Cor 1:2:3 Pekerjaan	M³	-		-	4,803,57 5.77		-	-
	Sub Jumlah							185,576, 060.99	198,3 65,704 .69
	C2 Pekerjaan Dinding dan Pasangan Pondasi								
1	Batu Bata Camp. 1:2	M²	18.6 0	-	(18. 60)	88,177.3 7	88,177. 37	1,640,09 9.08	-
2	Pas DIinding Bata Camp.	M²	125. 82	110. 23	(15. 59)	78,347.6 5	78,347. 65	9,857,70 1.32	8,636, 261.46

Hal.87 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1:4								
3	Plesteran Camp. 1:2 pada Pondasi Batu Bata	M ²	22.3 2	-	(22. 32)	43,875.5 6	43,875. 56	979,302. 50	-
4	Plesteran Camp. 1:4 untuk Dinding Batu Bata	M ²	251. 64	220. 46	(31. 18)	38,752.7 4	33,406. 74	9,751,73 9.49	7,364, 849.90
	Sub Jumlah							22,228,8 42.40	16,00 1,111. 36
	C3 Pekerjaan Kayu/Kos en/Pintu/J endela/Ka ca								
1	Kosen Pintu/Jen dela Kayu Kapur	M ³	1.09	0.62	(0.4 7)	7,108,24 9.50	7,084,4 40.00	7,747,99 1.96	4,392, 352.80
2	Pemas an Pintu Panil Kayu	M ²	11.7 6	8.00	(3.7 6)	437,877. 00	386,63 0.00	5,149,43 3.52	3,093, 040.00
3	Jendela Panel Kaca	M ²	14.2 8	13.4 4	(0.8 4)	431,436. 60	431,00 1.00	6,160,91 4.65	5,792, 653.44
4	Pemas an Kunci Tanam pada Daun Pintu	Se t	7.00	5.00	(2.0 0)	115,592. 40	115,59 2.40	809,146. 80	577,9 62.00
5	Pasangan Engsel Pintu	Bh	21.0 0	10.0 0	(11. 00)	22,374.0 0	22,374. 00	469,854. 00	223,7 40.00
6	Pasangan Grendel Pintu	Bh	7.00	-	(7.0 0)	18,004.1 4	18,004. 14	126,028. 98	-
7	Pasangan Handel Daun Pintu	Bh	7.00	5.00	(2.0 0)	18,414.0 0	47,500. 00	128,898. 00	237,5 00.00

Hal.88 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pasangan Engsel Jendela	Bh	36.00	28.00	(8.00)	16,236.00	16,236.00	584,496.00	454,608.00
9	Pasangan Grendel Jendela	Bh	18.00	28.00	10.00	11,074.14	11,074.14	199,334.52	310,075.92
10	Pasangan Hak Angin Jendela	Bh	36.00	28.00	(8.00)	34,254.00	34,254.00	1,233,144.00	959,112.00
11	Pasangan Handle Jendela	Bh	18.00	14.00	(4.00)	18,414.00	18,414.00	331,452.00	257,796.00
	Sub Jumlah							22,940,694.42	16,840.16
	C4 Pekerjaan Lantai								
1	Pemasangan Keramik (Lantai) ukuran 40x40 cm	M ²	104.26	121.40	17.14	154,961.33	148,076.87	16,156,268.27	17,976,532.02
2	Pemasangan Keramik (Tangga) ukuran 40x40 cm	M ²	-	-	-	154,961.33	-	-	-
3	Pemasangan Keramik (Lantai) ukuran 20x20 cm	M ²	-	-	-	135,733.05	-	-	-
4	Pemasangan Keramik (Dinding) ukuran 20x25 cm	M ²	-	-	-	176,656.73	-	-	-
5	Bon-bon keramik	M	4.10	2.20	(1.90)	24,640.00	16,883.44	101,024.00	37,143.57
	Sub Jumlah							16,257,292.27	18,013,675.

Hal.89 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

									59
	C5 Pekerjaan Langit- Langit Plafond Gypsum tebal 9 mm + Rangka Hollow								
1		M ²	85.5 0	90.2 5	4.75	101,720. 52	101,72 0.52	8,697,10 4.46	9,180, 276.93
2	Pemasangan List Plafond Gypsum	M	71.5 0	75.7 7	4.27	26,216.9 4	16,883. 44	1,874,51 1.21	1,279, 258.25
	Sub Jumlah							10,571,6 15.67	10,45 9,535. 18
	C6 Pekerjaan Instalasi Air/Sanita si								
1	Pemasangan Kloset Jongkok	Bh	-	-	-	1,020,99 4.50	-	-	-
2	Pemasangan Kran Air	Bh	-	-	-	29,898.0 0	-	-	-
3	Pemasangan Floor Drain	Bh	-	-	-	40,642.4 0	-	-	-
4	Bak Air Fiber Glass	Bh	-	-	-	856,587. 60	-	-	-
5	Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih dia 3/4"	M	-	-	-	29,898.0 0	-	-	-
6	Pemasangan Jaringan Pipa Air	M	-	-	-	321,739. 11	-	-	-

Hal.90 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kotor 4"								
7	Pemasangan Jaringan Pipa Air Bekas 3"	M	-	-	-	221,996.61	-	-	-
8	Pembuatan Septictank Sub	Bh	-	-	-	3,555,621.90	-	-	-
	Jumlah							-	-
	C7 Pekerjaan Instalasi Listrik/Perenerangan								
1	Penarikan Kabel untuk Titik-titik Lampu	Ttk	22.00	16.00	(6.00)	98,010.00	98,010.00	2,156,220.00	1,568,160.00
2	Pemasangan Armateur Down Light	Bh	13.00	18.00	5.00	90,320.00	90,320.00	1,174,160.00	1,625,760.00
3	Pemasangan Fitting Plafond	Bh	5.00	10.00	5.00	30,808.01	30,808.01	154,040.05	308,080.10
4	Pemasangan Bola Lampu SLE 18 Watt	Bh	18.00	25.00	7.00	30,244.51	30,244.51	544,401.18	756,112.75
5	Pemasangan Stop Kontak	Bh	4.00	13.00	9.00	17,721.01	17,721.01	70,884.04	230,373.13
6	Pemasangan Saklar Tunggal	Bh	4.00	3.00	(1.00)	19,365.51	19,365.51	77,462.04	58,096.53
7	Pemasangan Saklar Double	Bh	1.00	3.00	2.00	30,633.51	30,633.51	30,633.51	91,900.53

Hal.91 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pemasangan Sekring Box	Bh	1.00	-	(1.00)	160,429.50	160,429.50	160,429.50	-
	Sub Jumlah							4,368,232.32	4,638,483.04
	C8 Pekerjaan Railing/Jerajak								
1	Pembuatan Railing Tangga	M	-	-	-	714,676.87		-	-
2	Pembuatan Jerajak Jendela	M ²	-	-	-	671,141.93		-	-
3	Pembuatan Tangga Putar dan Pagar Pengaman Tangga	-	1.00	1.00	-	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
4	Pembuatan Railing Tangga Utama	-	1.00	1.00	-	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00
	Sub Jumlah							28,500,000.00	28,500,000.00
	C9 Pekerjaan Pengecatan								
1	Cat Kilat Kayu	M ²	60.90	43.71	(17.19)	29,121.84	29,833.76	1,773,520.06	1,304,033.65
2	Cat Tembok pada Bidang Permukaan Dinding	M ²	933.42	220.46	(712.96)	16,465.48	21,484.88	15,369,208.34	4,736,556.64
3	Cat Tembok pada Bidang	M ²	383.90	90.25	(293.65)	16,465.48	21,484.88	6,321,097.77	1,939,010.42

Hal.92 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Permukaan Plafond								
	Sub Jumlah						23,463,826.17	7,979,600.71	
D.	Lantai 1								
	D1 Pekerjaan Beton								
1	Kolom struktur 1:2:3 uk. 0,3 x0,3	M ³	1.46	1.46	-	6,399,792.62	3,534,093.60	9,343,697.23	5,159,776.66
2	Kolom struktur 1:2:3 uk. 0,2 x0,25	M ³	-	-	-	4,402,700.26	-	-	-
3	Kolom struktur 1:2:3 uk. 0,15 x0,25	M ³	1.42	1.42	-	4,402,700.26	3,534,093.60	6,251,834.37	5,018,412.91
4	Kolom praktis 15 x15 cm	M ³	1.94	1.30	(0.64)	4,191,190.91	3,534,093.60	8,130,910.37	4,594,321.68
5	Balok 0,2 x 0,4	M ³	2.66	2.64	(0.02)	5,747,302.97	5,131,304.18	15,287,825.90	13,546,643.04
6	Balok 0,15 x 0,4	M ³	6.15	1.95	(4.20)	6,275,847.56	5,131,304.18	38,596,462.49	10,006,043.15
7	Ring balok 15 x 20 cm	M ³	1.13	2.52	1.39	3,771,109.65	3,771,109.65	4,261,353.90	9,503,196.32
8	Plat leufel beton bertulang	M ³	-	-	-	4,406,983.35	-	-	-
	Sub Jumlah						81,872,084.26	47,828,393.75	
	D2 Pekerjaan Dinding dan Pasangan								
1	Pas. Dinding bata	M ²	301.24	334.44	33.20	78,347.65	78,347.65	23,601,446.09	26,202,588.07

Hal.93 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	camp. 1:4								
2	Plesteran camp. 1:4 untuk dinding batu bata	M ²	602. 48	668. 88	66.4 0	38,752.7 4	33,752. 74	23,347,7 50.80	22,57 6,532. 73
	Sub Jumlah							46,949,1 96.88	48,77 9,120. 80
	D3 Pekerjaa n Kayu/Kos en/Pintu/J endela/Ka ca								
1	Kosen pintu/ jendela kayu kapur	M ³	1.68	0.54	(1.1 4)	7,108,24 9.50	7,084,4 40.00	11,937,5 08.91	3,825, 597.60
2	Pintu panil kayu	M ²	6.72	6.40	(0.3 2)	437,877. 00	386,63 0.00	2,942,53 3.44	2,474, 432.00
3	Jendela panil kaca	M ²	30.7 2	20.4 5	(10. 27)	431,436. 60	431,00 1.00	13,253,7 32.35	8,813, 970.45
4	Kunci tanam pada daun pintu	set	4.00	4.00	-	115,592. 40	115,59 2.40	462,369. 60	462,3 69.60
5	Engsel pintu	Bh	12.0 0	8.00	(4.0 0)	22,374.0 0	22,374. 00	268,488. 00	178,9 92.00
6	Grendel pintu	Bh	4.00	-	(4.0 0)	18,004.1 4	18,004. 14	72,016.5 6	-
7	Handle daun pintu	Bh	4.00	-	(4.0 0)	18,414.0 0	47,500. 00	73,656.0 0	-
8	Engsel jendela	Bh	72.0 0	60.0 0	(12. 00)	16,236.0 0	16,236. 00	1,168,99 2.00	974,1 60.00
9	Grendel jendela	Bh	36.0 0	60.0 0	24.0 0	11,074.1 4	11,074. 14	398,669. 04	664,4 48.40
10	Hak angin jendela	Bh	72.0 0	60.0 0	(12. 00)	34,254.0 0	34,254. 00	2,466,28 8.00	2,055, 240.00
11	Handle jendela	Bh	36.0 0	30.0 0	(6.0 0)	18,414.0 0	18,414. 00	662,904. 00	552,4 20.00
	Sub Jumlah							33,707,1 57.90	20,00 1,630. 05

Hal.94 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	D4 Pekerjaan Lantai								
1	Keramik lantai uk. 40x40 cm	M ²	183. 45	158. 75	(24. 70)	154,961. 33	148,07 6.87	28,427,6 55.99	23,50 7,203. 11
2	Keramik lantai uk. 20x20 cm	M ²	8.25	5.63	(2.6 2)	135,733. 05	150,82 2.68	1,119,79 7.66	849,1 31.69
3	Keramik dinding uk. 20x25 cm	M ²	24.1 2	15.4 5	(8.6 7)	176,656. 73	157,07 9.48	4,260,96 0.33	2,426, 877.97
4	Bon-bon keramik	M	4.60	3.97	(0.6 3)	24,640.0 0	24,640. 00	113,344. 00	97,82 0.80
	Sub Jumlah							33,921,7 57.98	26,88 1,033. 57
	D5 Pekerjaan Langit- Langit/Pla fond								
1	Plafond gypsum tebal 9 mm + rangka hallow	M ²	179. 95	334. 50	154. 55	101,720. 52	101,72 0.52	18,304,6 07.57	34,02 5,513. 94
2	Pemas an list plafond gypsum	M	164. 84	250. 75	85.9 1	26,216.9 4	16,883. 44	4,321,60 0.39	4,233, 522.58
3	Plafond triplek # 3 mm + rangka	-	92.3 0	92.0 0	(0.3 0)	141,748. 50	38,199. 30	13,083,3 86.55	3,514, 335.60
	Sub Jumlah							35,709,5 94.51	41,77 3,372. 12
	D6 Pekerjaan Instalasi Air/Sanita si								
1	Kloset jongkok	Bh	2.00	2.00	-	1,020,99 4.50	1,030,6 96.50	2,041,98 9.00	2,061, 393.00

Hal.95 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pemasangan Kran Air	Bh	-	-	-	29,898.00	-	-	-
3	Pemasangan Floor Drain	Bh	-	-	-	40,642.40	-	-	-
4	Bak Air Fiber Glass	Bh	-	-	-	856,587.60	-	-	-
5	Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih dia 3/4"	M	-	-	-	29,898.00	-	-	-
6	Pemasangan Jaringan Pipa Air Kotor 4"	M	-	-	-	321,739.11	-	-	-
7	Pemasangan Jaringan Pipa Air Bekas 3"	M	-	-	-	221,996.61	-	-	-
8	Pembuatan Septictank	Bh	-	-	-	3,555,621.90	-	-	-
	Sub Jumlah							-	-
	C7								
	Pekerjaan Instalasi Listrik/Penerangan								
1	Penarikan Kabel untuk Titik-titik Lampu	Ttk	22.00	16.00	(6.00)	98,010.00	98,010.00	2,156,220.00	1,568,160.00
2	Pemasangan Armateur Down Light	Bh	13.00	18.00	5.00	90,320.00	90,320.00	1,174,160.00	1,625,760.00
3	Pemasangan	Bh	5.00	10.00	5.00	30,808.00	30,808.00	154,040.00	308,000.00

Hal.96 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	gan Fitting Plafond			0		1	01	05	80.10
4	Pemasangan Bola Lampu SLE 18 Watt	Bh	18.00	25.00	7.00	30,244.51	30,244.51	544,401.18	756,112.75
5	Pemasangan Stop Kontak	Bh	4.00	13.00	9.00	17,721.01	17,721.01	70,884.04	230,373.13
6	Pemasangan Saklar Tunggal	Bh	4.00	3.00	(1.00)	19,365.51	19,365.51	77,462.04	58,096.53
7	Pemasangan Saklar Double	Bh	1.00	3.00	2.00	30,633.51	30,633.51	30,633.51	91,900.53
8	Pemasangan Sekring Box	Bh	1.00	-	(1.00)	160,429.50	160,429.50	160,429.50	-
	Sub Jumlah							4,368,232.32	4,638,483.04
	C8 Pekerjaan Railing/Jerajak								
1	Pembuatan Railing Tangga	M	-	-	-	714,676.87			-
2	Pembuatan Jerajak Jendela	M ²	-	-	-	671,141.93			-
3	Pembuatan Tangga Putar dan Pagar Pengaman Tangga	-	1.00	1.00	-	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
4	Pembuatan Railing Tangga Utama	-	1.00	1.00	-	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00
	Sub Jumlah							28,500,000.00	28,500,000.00

Hal.97 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									00
	C9 Pekerjaan Pengecatan								
1	Cat Kilat Kayu	M ²	60.90	43.71	(17.19)	29,121.84	29,833.76	1,773,520.06	1,304,033.65
2	Cat Tembok pada Bidang Permukaan Dinding	M ²	933.42	220.46	(712.96)	16,465.48	21,484.88	15,369,208.34	4,736,556.64
3	Cat Tembok pada Bidang Permukaan Plafond	M ²	383.90	90.25	(293.65)	16,465.48	21,484.88	6,321,097.77	1,939,010.42
	Sub Jumlah							23,463,826.17	7,979,600.71
D.	Lantai 1								
	D1 Pekerjaan Beton								
1	Kolom struktur 1:2:3 uk. 0,3 x 0,3	M ³	1.46	1.46	-	6,399,792.62	3,534,093.60	9,343,697.23	5,159,776.66
2	Kolom struktur 1:2:3 uk. 0,2 x 0,25	M ³	-	-	-	4,402,700.26	-	-	-
3	Kolom struktur 1:2:3 uk. 0,15 x 0,25	M ³	1.42	1.42	-	4,402,700.26	3,534,093.60	6,251,834.37	5,018,412.91
4	Kolom praktis 15 x 15 cm	M ³	1.94	1.30	(0.64)	4,191,190.91	3,534,093.60	8,130,910.37	4,594,321.68
5	Balok 0,2 x 0,4	M ³	2.66	2.64	(0.02)	5,747,302.97	5,131,304.18	15,287,825.90	13,546,643.04
6	Balok 0,15 x 0,4	M ³	6.15	1.95	(4.20)	6,275,847.56	5,131,304.18	38,596,462.49	10,006,043.

Hal.98 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

									15
7	Ring balok 15 x 20 cm	M ³	1.13	2.52	1.39	3,771,10 9.65	3,771,1 09.65	4,261,35 3.90	9,503, 196.32
8	Plat leufel beton bertulang	M ³	-	-	-	4,406,98 3.35	-	-	-
	Sub Jumlah							81,872,0 84.26	47,82 8,393. 75
	D2 Pekerjaan Dinding dan Pasangan Pas.								
1	Dinding bata camp. 1:4	M ²	301. 24	334. 44	33.2 0	78,347.6 5	78,347. 65	23,601,4 46.09	26,20 2,588. 07
2	Plesteran camp. 1:4 untuk dinding batu bata	M ²	602. 48	668. 88	66.4 0	38,752.7 4	33,752. 74	23,347,7 50.80	22,57 6,532. 73
	Sub Jumlah							46,949,1 96.88	48,77 9,120. 80
	D3 Pekerjaan Kayu/Kos en/Pintu/J endela/Ka ca								
1	Kosen pintu/ jendela kayu kapur	M ³	1.68	0.54	(1.1 4)	7,108,24 9.50	7,084,4 40.00	11,937,5 08.91	3,825, 597.60
2	Pintu panil kayu	M ²	6.72	6.40	(0.3 2)	437,877. 00	386,63 0.00	2,942,53 3.44	2,474, 432.00
3	Jendela panil kaca	M ²	30.7 2	20.4 5	(10. 27)	431,436. 60	431,00 1.00	13,253,7 32.35	8,813, 970.45
4	Kunci tanam pada daun	set	4.00	4.00	-	115,592. 40	115,59 2.40	462,369. 60	462,3 69.60

Hal.99 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pintu								
5	Engsel pintu	Bh	12.0 0	8.00	(4.0 0)	22,374.0 0	22,374. 00	268,488. 00	178,9 92.00
6	Grendel pintu	Bh	4.00	-	(4.0 0)	18,004.1 4	18,004. 14	72,016.5 6	-
7	Handle daun pintu	Bh	4.00	-	(4.0 0)	18,414.0 0	47,500. 00	73,656.0 0	-
8	Engsel jendela	Bh	72.0 0	60.0 0	(12. 00)	16,236.0 0	16,236. 00	1,168,99 2.00	974,1 60.00
9	Grendel jendela	Bh	36.0 0	60.0 0	24.0 0	11,074.1 4	11,074. 14	398,669. 04	664,4 48.40
10	Hak angin jendela	Bh	72.0 0	60.0 0	(12. 00)	34,254.0 0	34,254. 00	2,466,28 8.00	2,055, 240.00
11	Handle jendela	Bh	36.0 0	30.0 0	(6.0 0)	18,414.0 0	18,414. 00	662,904. 00	552,4 20.00
	Sub Jumlah							33,707,1 57.90	20,00 1,630. 05
	D4 Pekerjaan Lantai								
1	Keramik lantai uk. 40x40 cm	M ²	183. 45	158. 75	(24. 70)	154,961. 33	148,07 6.87	28,427,6 55.99	23,50 7,203. 11
2	Keramik lantai uk. 20x20 cm	M ²	8.25	5.63	(2.6 2)	135,733. 05	150,82 2.68	1,119,79 7.66	849,1 31.69
3	Keramik dinding uk. 20x25 cm	M ²	24.1 2	15.4 5	(8.6 7)	176,656. 73	157,07 9.48	4,260,96 0.33	2,426, 877.97
4	Bon-bon keramik	M	4.60	3.97	(0.6 3)	24,640.0 0	24,640. 00	113,344. 00	97,82 0.80
	Sub Jumlah							33,921,7 57.98	26,88 1,033. 57
	D5 Pekerjaan Langit- Langit/Pla fond								
1	Plafond gypsum tebal 9 mm + rangka hallow	M ²	179. 95	334. 50	154. 55	101,720. 52	101,72 0.52	18,304,6 07.57	34,02 5,513. 94

Hal.100 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pemasangan list plafond gypsum Plafond triplek # 3 mm + rangka	M	164.84	250.75	85.91	26,216.94	16,883.44	4,321,600.39	4,233,522.58
3	Sub Jumlah							35,709,594.51	41,773,372.12
	D6 Pekerjaan Instalasi Air/Sanitasi								
1	Kloset jongkok	Bh	2.00	2.00	-	1,020,994.50	1,030,696.50	2,041,989.00	2,061,393.00
2	Kran air	Bh	2.00	2.00	-	29,898.00	13,622.40	59,796.00	27,244.80
3	Floor drain	Bh	2.00	2.00	-	40,642.40	40,642.40	81,284.80	81,284.80
4	Bak air fiber glass Jaringan	Bh	2.00	2.00	-	856,587.60	665,521.56	1,713,175.20	1,331,043.12
5	pipa air bersih dia. ¾"	M	20.00	12.50	(7.50)	29,898.00	65,340.00	597,960.00	816,750.00
6	Jaringan pipa air kotor 4"	M	15.00	12.00	(3.00)	321,739.11	321,739.11	4,826,086.65	3,860,869.32
7	Jaringan pipa air bekas 3"	M	20.00	14.00	(6.00)	221,996.61	221,996.61	4,439,932.20	3,107,952.54
	Sub Jumlah							13,760,223.85	11,286,537.58
	D7 Pekerjaan Instalasi Listrik								
1	Kabel untuk titik-titik lampu	Ttk	30.00	30.00	-	98,010.00	98,010.00	2,940,300.00	2,940,300.00
2	Fitting plafond	Bh	11.00	8.00	(3.00)	30,808.01	30,808.01	338,888.11	246,640.08
3	Armatuer down light	Set	15.00	25.00	10.00	90,320.00	90,320.00	1,354,800.00	2,258,000.00

Hal.101 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Bola lampu SLE 18 watt	Bh	26.00	26.00	-	30,244.51	30,244.51	786,357.26	786,357.26
5	Stop kontak	Bh	4.00	19.00	15.00	17,721.01	17,721.01	70,884.04	336,699.19
6	Saklar tunggal	Bh	4.00	5.00	1.00	19,365.51	19,365.51	77,462.04	96,827.55
7	Saklar double Sub	Bh	1.00	1.00	-	30,635.51	30,635.51	30,635.51	30,635.51
	Jumlah							5,599,326.96	6,695,283.59
	D8								
	Pekerjaan Pengatapan								
1	Rangka Atap Baja Ringan (Spesifikasi Pabrikan)	M ²	752.60	752.60	-	296,318.00	296,318.00	223,008,926.80	223,008,926.80
2	Pemasangan Atap Genteng Metal Berwarna	M ²	752.60	752.60	-	112,112.10	110,253.60	84,375,566.46	82,976,859.36
3	Pemasangan Rabung Metal Berwarna	M	52.01	52.01	-	107,939.70	107,939.70	5,613,943.80	5,613,943.80
4	Pemasangan Talang Dalam	M	11.00	11.00	-	172,156.05	107,113.05	1,893,716.55	1,178,243.55
5	Pemasangan Listplank Kayu Kapur	M	99.50	97.30	(2.20)	70,557.30	70,557.30	7,020,451.35	6,865,225.29
	Sub Jumlah							321,912,604.96	319,643,198.80
	D9								

Hal.102 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan Pengecatan								
1	Cat Kilat Kayu	M ²	31.25	53.91	22.66	29,121.84	29,833.76	910,057.50	1,608,338.00
2	Cat Tembok pada Bidang Permukaan Dinding	M ²	890.96	668.88	(222.08)	16,465.48	21,484.88	14,670,153.82	14,370,806.53
3	Cat Tembok pada Bidang Permukaan Plafond	M ²	328.00	426.50	98.50	16,465.48	21,484.88	5,400,677.44	9,163,301.32
	Sub Jumlah							20,980,888.76	25,142,445.86
E.	Pekerjaan Tambahan								
1	Pembuatan Relief secara Keseluruhan	M	95.50	29.81	(65.69)	81,680.10	81,680.10	7,800,449.55	2,434,883.78
2	Pekerjaan Pembulatan Tiang	Bh	2.00	2.00	-	2,500,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	Sub Jumlah							12,800,449.55	7,434,883.78
F.	Pekerjaan Lain-Lain								
1	Foto Dokumentasi/Administrasi	Lbr	1.00	1.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2	Laporan Harian	Bln	6.00	6.00	-	625,000.00	625,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00
3	Steling Kerja	-	1.00	1.00	-	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
4	Lansir Bahan	-	1.00	1.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00

Hal.103 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	As Built Drawing dan Administrasi	-	1.00	1.00	-	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
6	Pembersihan Akhir	-	1.00	1.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	Sub Jumlah							22,500,000.00	22,500,000.00
	Jumlah							1,009,473,054.79	920,468,054.60
	Profit							121,136,766.58	-
	PPN 10%							100,947,305.48	113,096,092.00
	IMB							12,500,000.00	12,500,000.00
	Total							1,244,057,126.85	1,046,064,146.60
	Dibulatkan							1,244,057,000.00	
Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah									
-	Jumlah uang yang telah dicairkan dari kas daerah Pemerintah Kota Sibolga dan telah digunakan/ dipertanggungjawabkan untuk Pembayaran Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dhi Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011					Rp 1,244,057,000			
Dikurangi									
-	IMB						Rp 12,500,000.		
-	PPN yang telah dipungut dan disetor (Lampiran II)					Rp 113,096,092.			
-	PPH Pasal 4 Jasa Konstruksi yang telah dipungut dan disetor (Lampiran II)					Rp 22,619,218.00			
Nilai Fisik Pekerjaan yang dibayarkan						Rp1,095,841,690.			
Nilai Realisasi Fisik di Lapangan						Rp 920,468,054.60			
Kerugian Keuangan Negara/Daerah						Rp175,373,635.4			

Perbuatan Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. tersebut di atas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sibolga tanggal 15 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI AZHARI, S.E. berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

I.	1)	5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Nomor 900/2572/2011 tentang Penghunjukan Asisten Teknik dan Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Sibolga pada tanggal 11 Juli 2011.
	2)	5 (lima) lembar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sibolga Nomor 01/SK/PPK-DPKAD/2011 tentang Penghunjukan Asisten Teknik dan Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Hal.105 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Sibolga pada tanggal 11 Juli 2011.</p> <p>3) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 823.3/71/2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang Pengangkatan ADIRAM OMPUSUNGGU sebagai PNS.</p>
II.	<p>1) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 821.1.12/139/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Pengangkatan KARIAMAN WARUWU sebagai PNS.</p>
III.	<p>1) 1 (satu) buah fotokopi dokumen yang dilegalisir beberapa Dokumen Pengadaan Nomor 34/DP-ULP/PU-DPUK/2011 tanggal 20 Juni 2011 untuk Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011.</p> <p>2) 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2011 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga dengan perincian;</p> <p>3) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 001/ULP/DPUK/2011 tanggal 23 Juni 2011 perihal Undangan Rapat ULP.</p> <p>4) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Hasil Rapat ULP Nomor 002/ULP/DPUK/2011 tanggal 24 Juni 2011.</p> <p>5) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 003/ULP/DPUK/2011 tanggal 24 Juni 2011 perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Rapat Panitia kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).</p> <p>6) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan Proyek.</p> <p>7) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 004/ULP/PU/PL-DPUK/2011 tanggal 24 Juni 2011 perihal Pengumuman Permohonan Penayangan Pengadaan Barang/Jasa kepada Sekretaris LPSE Provinsi Sumatera</p>

Hal.106 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Utara.
8)	2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 004/ULP/DPUK/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi.
9)	3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 005/ULP/DPUK/2011 tanggal 01 Juli 2011 perihal Berita Acara Pemberian Penjelasan.
10)	1 (satu) fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Rapat Penjelasan (<i>aanwizing</i>) pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2011 di Aula Kantor Dinas PU Kota Sibolga.
11)	2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir daftar rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen kualifikasi.
12)	1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 007/ULP/PU-DPUK/2011 tanggal 6 Juli 2011 perihal Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan.
13)	1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 008.a/ULP/PU-DPUK/2011 tanggal 7 Juli 2011 perihal Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran.
14)	1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 008.b/ULP/PU-DPUK/2011 tanggal 7 Juli 2011 perihal Berita Acara Pengunduran Pembukaan Dokumen Penawaran.
15)	1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 009/ULP/PU-DPUK/2011 tanggal 8 Juli 2011 perihal Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.
16)	1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran pada tanggal 7 Juli 2011.
17)	1 (satu) set fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV.YUDDI AGUNG.
18)	1 (satu) set fotokopi yang dilegalisir koreksi aritmatik.
19)	1 (satu) set fotokopi Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor /ULP/DPUK/2011 pada tanggal Juli 2011.
20)	1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Pengumuman Pemenang dan Cadangan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 Nomor 014/ULP-DPUK/2011 tanggal 28 Juli 2011.
21)	2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat CV. ELLATEC



	<p>DWIDAYA Nomor 14/CV.EDD/sangguh/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihal Sanggahan Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga.</p> <p>22) 1(satu) lembar fotokopi yang dilegalisir bukti tanda terima kiriman melalui kantor POS.</p> <p>23) 1(satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 021/ULP/DPUK/2011 tanggal 4 Agustus 2011 perihal Jawaban Atas Sanggahan Pengumuman Nomor 014/ULP-DPUK/2011.</p> <p>24) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 024/ULP/DPUK/2011 tanggal 19 Agustus 2011 perihal Laporan Akhir Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Yang Ditujukan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011.</p> <p>25) 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. ELLATEC DWIJAYA Nomor 060/CV-edd/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011.</p> <p>26) 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. MUBDI R.N Nomor 045/CV-M.R.N/SP/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.</p> <p>27) 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. KURNIA Nomor 060/CV-K/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.</p> <p>28) 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. MARULI ASIH Nomor 84/CV-MA/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.</p> <p>29) 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. YUDHI AGUNG Nomor 01/CV-YA/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011.</p> <p>30) 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. WAHANA KARYA INDONESIA Nomor - tanggal 6 Juli 2011.</p> <p>31) 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. SURYA INDONESIA BARU Nomor - tanggal 05 Juli 2011.</p>
--	--



	<p>32) 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. CITRA BARU Nomor 10/CV-CV/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011.</p> <p>33) 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor 800/113-A-DPUK/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2011.</p> <p>34) 5 (lima) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Walikota Sibolga Nomor 600/165/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Pengangkatan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011.</p> <p>35) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor 050902846528292 tanggal 13 Mei 2009 atas nama BASARULLAH LUBIS.</p> <p>36) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 821.12/ 3283.d/1986 tanggal 29 November 1996.</p>
IV.	<p>1) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 012/ULP/DPUK/2011 pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011.</p> <p>2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 013/ULP/DPUK/2011 pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011.</p>
V.	<p>1) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 192/UPS.1980 tanggal 11 Maret 1980 tentang Pengangkatan OESMAN HASIBUAN sebagai PNS.</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor 050902845528291 tanggal 13 Mei 2009 atas nama OESMAN HASIBUAN.</p>
VI.	<p>1) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 821.12/145/2007 tentang Pengangkatan BAHANI INDAH HAPSARI, A.Md sebagai PNS.</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor 050902870528310 tanggal 13 Mei 2009 atas nama BAHANI INDAH HAPSARI, A.Md.</p>
VII.	<p>1) 1 (satu) buah dokumen fotokopi yang dilegalisir Rencana</p>



	<p>Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 yang dibuat di Sibolga pada tanggal Maret 2011.</p> <p>2) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor 900/86/2011 tentang Penghunjukan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga tahun 2011 yang ditetapkan di Sibolga pada tanggal 11 April 2011.</p> <p>3) 7 (tujuh) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor 900/08/2011 tentang Penghunjukan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 yang ditetapkan di Sibolga pada tanggal 7 Februari 2011.</p> <p>4) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 428/UPO/1977 tanggal 04 Mei 1977 tentang Pengangkatan SORITUA HASIBUAN sebagai PNS.</p>
VIII.	<p>1) 4 (empat) lembar fotokopi dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan di Sibolga Pada tanggal 10 Maret 2011.</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sibolga Nomor 900/2287/2011 perihal Bantuan Panitia Pengadaan Yang Ditujukan Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga pada tanggal 20 Juni 2011.</p> <p>3) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Nomor 900/2462/2011 perihal Bantuan Personil sebagai PPTK dan Pengawas yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga pada tanggal 4 Juli 2011.</p> <p>4) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor 800/923.DPOK/2011 perihal Penyampaian Personil PPTK dan Pengawas yang ditujukan Kepada</p>



	<p>Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah pada tanggal 06 Juli 2011.</p> <p>5) 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 824/56/2011 tentang Pengangkatan AGUSTINUS HUTABRAT, S.E. sebagai Pj. Kepala Bidang Asset dan Investasi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga yang ditetapkan di Sibolga tanggal 15 Maret 2011.</p> <p>6) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 813.2/883.D/95 Pengangkatan AGUSTINUS HUTABARAT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>7) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 821.12/516.D/1997 pengangkatan AGUSTINUS HUTABARAT sebagai Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>8) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 027/824/SJ tanggal 16 Maret 2011 perihal Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Walikota Sibolga Nomor 027/450/2011 tanggal 12 April 2011 perihal Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>10) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga Nomor 900/2284/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga atas nama Drs. SORITUA HASIBUAN yang ditetapkan di Sibolga pada tanggal 17 Juni 2011.</p> <p>11) 4 (empat) lembar Keputusan Walikota Sibolga Nomor</p>
--	--



	<p>900/86/2011 tentang Penghunjukan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan di Sibolga pada tanggal 11 April 2011.</p> <p>12) 2 (dua) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang dan Cadangan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 014/ULP-DPUK/2011 yang ditetapkan di Sibolga pada tanggal 28 Juli 2011.</p> <p>13) 1 (satu) lembar Surat 01/SPPBJ/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 02 Agustus perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga yang ditujukan kepada Saudara RUDI AZHARI, S.E. (WAKIL DIREKTUR CV. YUDDI AGUNG).</p> <p>14) 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kontruksi (kontrak) Nomor 01/SPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dhi Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun 2011 biaya anggaran Rp1.244.057.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah).</p> <p>15) 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 01/SPMK/PPK-DPKAD/VIII/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen atas nama AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. dengan Penyedia CV. YUDDI AGUNG atas nama RUDI AZHARI, S.E. (Wakil Direktur).</p> <p>16) 1 (satu) buah buku <i>Contrak Chage Order</i> (pekerjaan tambah kurang) Nomor 01/CCO/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun 2011.</p> <p>17) 1 (satu) buah AS BUILT DRAWING kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga.</p> <p>18) 1 (satu) buah Dokumen Laporan Harian dan Laporan</p>
--	---



	<p>Mingguan Dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dhi. Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga, Kontraktor CV. YUDDI AGUNG, Nomor Kontrak 01/SPKK/PPK-DPKAD/VIII/2011, Nomor C-C-O 01/CCO/PPK-DPKAD/VIII/2011 Tahun Anggaran 2011.</p> <p>19) 1 (satu) buah dokumen Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun 2011.</p>
IX.	<p>1) 6 (enam) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Walikota Sibolga Nomor 900/40/2011 tentang Penghunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penghunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan di Sibolga pada tanggal 28 Februari 2011.</p> <p>2) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 823.3/26/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengangkatan M. ZUBIR sebagai PNS.</p>
X.	<p>1) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Nomor 900/844/2011 tentang Pemberhentian dan Penghunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Sibolga pada tanggal 15 Maret 2011 oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga atas nama SORITUA HASIBUAN.</p>
XI.	<p>1) 5 (lima) lembar fotokopi yang dilegalisir berupa Keputusan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sibolga Nomor 900/426/2011 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (PPTK-SKPD) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan di Sibolga pada tanggal 17 Februari 2011.</p> <p>2) 2 (dua) Lembar fotokopi yang dilegalisir berupa Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 823.3/26/2005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Pengangkatan RAHMAWATI SIREGAR, S.E. sebagai PNS.</p>
XII.	<p>1) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan</p>



	<p>Walikota Sibolga Nomor 900/52.a/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Perubahan Penghunjukan Pejabat yang Menandatangani Cek Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung SKPP Gaji dan SP2D pada Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011.</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor 900/23451/2011 tanggal 01 Juli 2011.</p> <p>3) 12 (dua belas) lembar fotokopi yang dilegalisir Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Sibolga dengan PT. Bank Sumut tentang Penggunaan Aplikasi Kas Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Nomor 580/921/2011 dan Nomor 016/Dir/Dts-PDJ/SPJ/2011 tanggal 01 Juli 2011.</p> <p>4) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 141/I-A/Peg/02/1992 tanggal 20 April 1992 kepada atas nama AMARULLAH GULTOM.</p> <p>5) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 824/56/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Pengangkatan AMARULLAH GULTOM menjadi Kepala Bidang Penganggaran dan Kuasa BUD Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga.</p> <p>6) 1 (satu) set SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 31580 tanggal 09 November 2011 untuk keperluan belanja langsung pembayaran angsuran I sebesar (60%) dari harga kontrak pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 08 Agustus sebesar Rp1.224.057.000,00 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 04/PPK-DPKAD/BAP/2011 tanggal 09 November 2011 sesuai dengan permintaan terlampir.</p> <p>7) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/131/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 8 November 2011.</p> <p>8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS sebesar Rp746.434.200 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).</p>
--	--



9)	1 (satu) lembar Ringkasan Permintaan Pembayaran Uang Langsung Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/131/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 8 November 2011.
10)	1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/131/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 8 November 2011.
11)	1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan tanggal 9 November 2011 atas nama ROSINTAN NAIBAHO NIP 19600830 198002 2 001.
12)	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor SPM 900/131/SPM-LS/2011 tanggal 9 November 2011 sebesar Rp746.434.200,00.
13)	1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Termin Nomor 01/CV.YD/XI/2011 tanggal 3 November 2011 oleh Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG atas nama RUDI AZHARI, S.E.
14)	1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 02/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Jumat tanggal 4 November 2012.
15)	1 (satu) lembar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor 02/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Senin tanggal 7 November 2012.
16)	2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 04/PPK – DPKAD/BAP/2011 pada hari Rabu tanggal 9 November 2011.
17)	1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Angsuran I sebesar (60%) dari harga kontrak sebagai mana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 dan sesuai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan sebesar Rp746.434.200,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).
18)	4 (empat) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan (progres fisik) Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sebesar 65.000%.



	<p>19) 1 (satu) set SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 32070 tanggal 21 Desember 2011 untuk Keperluan Belanja Langsung Pembayaran Angsuran I sebesar (30%) dari harga Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dhi. Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 8 Agustus sebesar Rp1.224.057.000 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 04/PPK-DPKAD/ BAP/2011 tanggal 20 Desember 2011 sesuai dengan permintaan terlampir.</p> <p>20) 1 (satu) lembar lembaran disposisi SPM-LS pembayaran 30% pembangunan kantor SPM No.01/SPKK/PPK-DPKAD/VIII/ 2011.</p> <p>21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS sebesar Rp373.217.100,00;</p> <p>22) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/213/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 20 Desember 2011.</p> <p>23) 1 (satu) lembar Ringkasan Permintaan Pembayaran Uang Langsung Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/213/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 20 Desember 2011.</p> <p>24) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/213/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 20 Desember 2011.</p> <p>25) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor SPM 900/213/SPM-LS/2011 tanggal 9 November 2011 sebesar Rp373.217.100,00;</p> <p>26) 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Termin Nomor 02/CV.YD/XI/2011 tanggal 15 Desember 2011 oleh Wakil Direktur CV.YUDDI AGUNG atas nama RUDI AZHARI, S.E.</p> <p>27) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 05/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011.</p> <p>28) 1 (satu) lembar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor 06/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Senin tanggal 19</p>
--	--



Desember 2011.

- 29) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 07/PPK-DPKAD/BAP/2011 pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011.
- 30) 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Angsuran II sebesar (90%-60%) sama dengan 30% dari harga kontrak sebagai mana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 dan sesuai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan sebesar Rp373.217.100,00.
- 31) 4 (empat) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan (progres fisik) Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sebesar 94.766%.
- 32) 1 (satu) set SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 32329 tanggal 29 Desember 2011 untuk keperluan Belanja Langsung Pembayaran Angsuran I sebesar (95%) dari harga kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dhi. Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 8 Agustus sebesar Rp1.224.057.000,00 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 04/PPK-DPKAD/BAP/2011 tanggal 28 Desember 2011 sesuai dengan permintaan terlampir.
- 33) 1 (satu) lembar lembaran disposisi SPM-LS pembayaran 5% pembangunan kantor SPM Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VIII/2011.
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/239/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 28 Desember 2011.
- 35) 1 (satu) lembar Ringkasan Permintaan Pembayaran Uang Langsung Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/239/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp62.202.850,00.
- 36) 1 (satu) lembar rincian Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS sebesar Rp62.202.850,00.
- 37) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung

Hal.117 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/239/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp62.202.850,00.</p> <p>38) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Termyn Nomor 03/CV.YD/XI/2011 tanggal 21 Desember 2011 oleh Wakil Direktur CV.YUDDI AGUNG atas nama RUDI AZHARI, S.E.</p> <p>39) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 8/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011.</p> <p>40) 1 (satu) lembar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor 9/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011.</p> <p>41) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 11/PPK-DPKAD/BAP/2011 pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011.</p> <p>42) 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran sebesar (5%) dari harga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 dan sesuai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan sebesar Rp62.202.850,00.</p> <p>43) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga pada hari Senin tanggal 14 Desember 2011.</p> <p>44) 4 (empat) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan (progres fisik) Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sebesar 100.000%.</p> <p>45) 1 (set) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 32330 tanggal 29 Desember 2011 untuk Keperluan Belanja Langsung Pembayaran sebesar (5%) dari harga kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 8 Agustus sebesar Rp1.224.057.000,00 dan Berita Acara Pembayaran Nomor</p>
--	--



	<p>15/PPK-DPKAD/BAP/2011 tanggal 29 Desember 2011 sesuai dengan permintaan terlampir.</p> <p>46) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor SPM 903/240/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 28 Desember 2011.</p> <p>47) 1 (satu) lembar Disposisi SPM-LS pembayaran 5% pembangunan kantor SPM Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/ VIII/ 2011.</p> <p>48) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 903/240/ SPP-LS-BJ/2011 tanggal 28 Desember 2011.</p> <p>49) 1 (satu) lembar Ringkasan Permintaan Pembayaran Uang Langsung Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/240/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 28 Desember 2011.</p> <p>50) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa 903/240/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 28 Desember 2011.</p> <p>51) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Termyn Nomor 04/CV.YD/XII/2011 tanggal Desember 2011 oleh Wakil Direktur CV.YUDDI AGUNG atas nama RUDI AZHARI, S.E.</p> <p>52) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 12/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2011.</p> <p>53) 1 (satu) lembar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor 13/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011.</p> <p>54) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 15/PPK-DPKAD/BAP/2011 pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011.</p> <p>55) 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Uang Retensi sebesar 5%) dari harga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 dan sesuai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan sebesar Rp62.202.850,00.</p> <p>56) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan</p>
--	--



	<p>Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga pada hari Senin tanggal 14 Desember 2011.</p> <p>57) 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga oleh Jasaraharja Putera dengan nomor jaminan 15.06.05.2012.00007 senilai Rp62.202.850,00.</p> <p>58) 4 (empat) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan (progres fisik) Pembangunan Gedung Kantor Dhi Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sebesar 100.</p> <p>59) 4 (empat) buah dokumen foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun 2011.</p>
XIII.	<p>1) 4 (empat) lembar fotokopi Minut Akte Pemasukan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. YUDDI AGUNG Nomor 234 tanggal 30 Juni 2011.</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RUDI AZHARI, S.E.</p> <p>3) 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-187.HT.03.02-Th.2003 tentang Pengangkatan Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, S.H. yang dikeluarkan di Jakarta 14 Februari 2003 oleh atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Zulkarnain Yunus, S.H., M.H. Nip. 040034478.</p>
XIV.	<p>1) 1 (satu) buah Dokumen Asli Akte Pemasukan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Kominditer CV. Yuddi Agung Nomor 234 tanggal 30 Juni 2011 nama 1.Tuan Muchtar, 2.Tuan Azhari, 3.Tuan Rudi Azhari, S.E. yang dibuat oleh Notaris Pejabat Pembuat Akte Tanah Binsar Simanjuntak, S.H.</p> <p>2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan asli Rudi Azhari, S.E.</p>

Digunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa Rudi Azhari, S.E.

6. Membebaskan kepada Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 19
September 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Mengurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

I.	<ol style="list-style-type: none">1) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Nomor 900/2572/2011 tentang Penghunjukan Asisten Teknik dan Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Sibolga pada tanggal 11 Juli 2011.2) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sibolga Nomor 01/SK/PPK-DPKAD/2011 tentang Penghunjukan Asisten Teknik dan Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Sibolga pada tanggal 11 Juli 2011.3) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 823.3/71/2004 tanggal 30 Januari
----	--

Hal.121 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



	2004 tentang Pengangkatan ADIRAM OMPUSUNGGU sebagai PNS.
II.	1) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 821.1.12/139/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Pengangkatan KARIAMAN WARUWU sebagai PNS.
III.	1) 1 (satu) buah fotokopi dokumen yang dilegalisir beberapa Dokumen Pengadaan Nomor 34/DP-ULP/PU-DPUK/2011 tanggal 20 Juni 2011 untuk Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011. 2) 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2011 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga dengan perincian; 3) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 001/ULP/DPUK/2011 tanggal 23 Juni 2011 perihal Undangan Rapat ULP. 4) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Hasil Rapat ULP Nomor 002/ULP/DPUK/2011 tanggal 24 Juni 2011. 5) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 003/ULP/DPUK/2011 tanggal 24 Juni 2011 perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Rapat Panitia kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 6) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan Proyek. 7) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 004/ULP/PU/PL-DPUK/2011 tanggal 24 Juni 2011 perihal Pengumuman Permohonan Penayangan Pengadaan Barang/Jasa kepada Sekretaris LPSE Provinsi Sumatera Utara. 8) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 004/ULP/DPUK/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi.

Hal.122 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



	<p>9) 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 005/ULP/DPUK/2011 tanggal 01 Juli 2011 perihal Berita Acara Pemberian Penjelasan.</p> <p>10) 1 (satu) fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Rapat Penjelasan (<i>aanwizing</i>) pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2011 di Aula Kantor Dinas PU Kota Sibolga.</p> <p>11) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir daftar rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen kualifikasi.</p> <p>12) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 007/ULP/PU-DPUK/2011 tanggal 6 Juli 2011 perihal Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan.</p> <p>13) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 008.a/ULP/PU-DPUK/2011 tanggal 7 Juli 2011 perihal Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran.</p> <p>14) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 008.b/ULP/PU-DPUK/2011 tanggal 7 Juli 2011 perihal Berita Acara Pengunduran Pembukaan Dokumen Penawaran.</p> <p>15) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 009/ULP/PU-DPUK/2011 tanggal 8 Juli 2011 perihal Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.</p> <p>16) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran pada tanggal 7 Juli 2011.</p> <p>17) 1 (satu) set fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV.YUDDI AGUNG.</p> <p>18) 1 (satu) set fotokopi yang dilegalisir koreksi aritmatik.</p> <p>19) 1 (satu) set fotokopi Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor /ULP/DPUK/2011 pada tanggal Juli 2011.</p> <p>20) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Pengumuman Pemenang dan Cadangan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 Nomor 014/ULP-DPUK/2011 tanggal 28 Juli 2011.</p> <p>21) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat CV. ELLATEC DWIDAYA Nomor 14/CV.EDD/sangguh/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihal Sanggahan Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga.</p>
--	--



	<p>22) 1(satu) lembar fotokopi yang dilegalisir bukti tanda terima kiriman melalui kantor POS.</p> <p>23) 1(satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 021/ULP/DPUK/2011 tanggal 4 Agustus 2011 perihal Jawaban Atas Sanggahan Pengumuman Nomor 014/ULP-DPUK/2011.</p> <p>24) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 024/ULP/DPUK/2011 tanggal 19 Agustus 2011 perihal Laporan Akhir Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Yang Ditujukan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011.</p> <p>25) 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. ELLATEC DWIJAYA Nomor 060/CV-edd/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011.</p> <p>26) 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. MUBDI R.N Nomor 045/CV-M.R.N/SP/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.</p> <p>27) 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. KURNIA Nomor 060/CV-K/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.</p> <p>28) 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. MARULI ASIH Nomor 84/CV-MA/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.</p> <p>29) 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. YUDHI AGUNG Nomor 01/CV-YA/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011.</p> <p>30) 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. WAHANA KARYA INDONESIA Nomor - tanggal 6 Juli 2011.</p> <p>31) 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. SURYA INDONESIA BARU Nomor - tanggal 05 Juli 2011.</p> <p>32) 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. CITRA BARU Nomor 10/CV-CV/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011.</p> <p>33) 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor 800/113-A-</p>
--	---



	<p>DPUK/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2011.</p> <p>34) 5 (lima) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Walikota Sibolga Nomor 600/165/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Pengangkatan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011.</p> <p>35) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor 050902846528292 tanggal 13 Mei 2009 atas nama BASARULLAH LUBIS.</p> <p>36) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 821.12/ 3283.d/1986 tanggal 29 November 1996.</p>
IV.	<p>1) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 012/ ULP/DPUK/2011 pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011.</p> <p>2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 013/ULP/DPUK/2011 pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011.</p>
V.	<p>1) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 192/ UPS.1980 tanggal 11 Maret 1980 tentang Pengangkatan OESMAN HASIBUAN sebagai PNS.</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor 050902845528291 tanggal 13 Mei 2009 atas nama OESMAN HASIBUAN.</p>
VI.	<p>1) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 821.12/145/2007 tentang Pengangkatan BAHANI INDAH HAPSARI, A.Md sebagai PNS.</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor 050902870528310 tanggal 13 Mei 2009 atas nama BAHANI INDAH HAPSARI, A.Md.</p>
VII.	<p>1) 1 (satu) buah dokumen fotokopi yang dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 yang dibuat di Sibolga pada tanggal Maret 2011.</p> <p>2) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor 900/86/2011 tentang</p>



	<p>Penghunjukan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga tahun 2011 yang ditetapkan di Sibolga pada tanggal 11 April 2011.</p> <p>3) 7 (tujuh) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor 900/08/2011 tentang Penghunjukan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 yang ditetapkan di Sibolga pada tanggal 7 Februari 2011.</p> <p>4) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 428/UPO/1977 tanggal 04 Mei 1977 tentang Pengangkatan SORITUA HASIBUAN sebagai PNS.</p>
VIII.	<p>1) 4 (empat) lembar fotokopi dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan di Sibolga Pada tanggal 10 Maret 2011.</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sibolga Nomor 900/2287/2011 perihal Bantuan Panitia Pengadaan Yang Ditujukan Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga pada tanggal 20 Juni 2011.</p> <p>3) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Nomor 900/2462/2011 perihal Bantuan Personil sebagai PPTK dan Pengawas yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga pada tanggal 4 Juli 2011.</p> <p>4) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor 800/923.DPOK/2011 perihal Penyampaian Personil PPTK dan Pengawas yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah pada tanggal 06 Juli 2011.</p> <p>5) 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 824/56/2011 tentang Pengangkatan AGUSTINUS HUTABRAT, S.E. sebagai Pj. Kepala Bidang Asset dan Investasi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah</p>



	<p>Kota Sibolga yang ditetapkan di Sibolga tanggal 15 Maret 2011.</p> <p>6) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 813.2/883.D/95 Pengangkatan AGUSTINUS HUTABARAT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>7) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 821.12/516.D/1997 pengangkatan AGUSTINUS HUTABARAT sebagai Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>8) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 027/824/SJ tanggal 16 Maret 2011 perihal Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Walikota Sibolga Nomor 027/450/2011 tanggal 12 April 2011 perihal Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>10) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga Nomor 900/2284/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga atas nama Drs. SORITUA HASIBUAN yang ditetapkan di Sibolga pada tanggal 17 Juni 2011.</p> <p>11) 4 (empat) lembar Keputusan Walikota Sibolga Nomor 900/86/2011 tentang Penghunjukan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan di Sibolga pada tanggal 11 April 2011.</p> <p>12) 2 (dua) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang dan</p>
--	--



	<p>Cadangan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 014/ULP-DPUK/2011 yang ditetapkan di Sibolga pada tanggal 28 Juli 2011.</p> <p>13) 1 (satu) lembar Surat 01/SPPBJ/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 02 Agustus perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga yang ditujukan kepada Saudara RUDI AZHARI, S.E. (WAKIL DIREKTUR CV. YUDDI AGUNG).</p> <p>14) 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kontruksi (kontrak) Nomor 01/SPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dhi Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun 2011 biaya anggaran Rp1.244.057.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah).</p> <p>15) 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 01/SPMK/PPK-DPKAD/VIII/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen atas nama AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. dengan Penyedia CV. YUDDI AGUNG atas nama RUDI AZHARI, S.E. (Wakil Direktur).</p> <p>16) 1 (satu) buah buku <i>Contrak Chage Order</i> (pekerjaan tambah kurang) Nomor 01/CCO/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun 2011.</p> <p>17) 1 (satu) buah AS BUILT DRAWING kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga.</p> <p>18) 1 (satu) buah Dokumen Laporan Harian dan Laporan Mingguan Dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dhi. Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga, Kontraktor CV. YUDDI AGUNG, Nomor Kontrak 01/SPKK/PPK-DPKAD/VIII/2011, Nomor C-C-O 01/CCO/PPK-DPKAD/VIII/2011 Tahun Anggaran 2011.</p> <p>19) 1 (satu) buah dokumen Foto Dokumentasi Pekerjaan</p>
--	---



	Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun 2011.
IX.	<p>1) 6 (enam) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Walikota Sibolga Nomor 900/40/2011 tentang Penghunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penghunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan di Sibolga pada tanggal 28 Februari 2011.</p> <p>2) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 823.3/26/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengangkatan M. ZUBIR sebagai PNS.</p>
X.	<p>1) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Nomor 900/844/2011 tentang Pemberhentian dan Penghunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Sibolga pada tanggal 15 Maret 2011 oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga atas nama SORITUA HASIBUAN.</p>
XI.	<p>1) 5 (lima) lembar fotokopi yang dilegalisir berupa Keputusan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sibolga Nomor 900/426/2011 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (PPTK-SKPD) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan di Sibolga pada tanggal 17 Februari 2011.</p> <p>2) 2 (dua) Lembar fotokopi yang dilegalisir berupa Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 823.3/26/2005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Pengangkatan RAHMAWATI SIREGAR, S.E. sebagai PNS.</p>
XII.	<p>1) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Walikota Sibolga Nomor 900/52.a/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Perubahan Penghunjukan Pejabat yang Menandatangani Cek Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung SKPP Gaji dan SP2D pada Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011.</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah</p>



	<p>Tugas Nomor 900/23451/2011 tanggal 01 Juli 2011.</p> <p>3) 12 (dua belas) lembar fotokopi yang dilegalisir Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Sibolga dengan PT. Bank Sumut tentang Penggunaan Aplikasi Kas Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Nomor 580/921/2011 dan Nomor 016/Dir/Dts-PDJ/SPj/2011 tanggal 01 Juli 2011.</p> <p>4) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 141/I-A/Peg/02/1992 tanggal 20 April 1992 kepada atas nama AMARULLAH GULTOM.</p> <p>5) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 824/56/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Pengangkatan AMARULLAH GULTOM menjadi Kepala Bidang Penganggaran dan Kuasa BUD Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga.</p> <p>6) 1 (satu) set SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 31580 tanggal 09 November 2011 untuk keperluan belanja langsung pembayaran angsuran I sebesar (60%) dari harga kontrak pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 08 Agustus sebesar Rp1.224.057.000,00 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 04/PPK-DPKAD/BAP/2011 tanggal 09 November 2011 sesuai dengan permintaan terlampir.</p> <p>7) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/131/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 8 November 2011.</p> <p>8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS sebesar Rp746.434.200 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).</p> <p>9) 1 (satu) lembar Ringkasan Permintaan Pembayaran Uang Langsung Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/131/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 8 November 2011.</p> <p>10) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/131/SPP-LS-</p>
--	--



	<p>BJ/2011 tanggal 8 November 2011.</p> <p>11) 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan tanggal 9 November 2011 atas nama ROSINTAN NAIBAHO NIP 19600830 198002 2 001.</p> <p>12) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor SPM 900/131/SPM-LS/2011 tanggal 9 November 2011 sebesar Rp746.434.200,00.</p> <p>13) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Termin Nomor 01/CV.YD/XI/2011 tanggal 3 November 2011 oleh Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG atas nama RUDI AZHARI, S.E.</p> <p>14) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 02/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Jumat tanggal 4 November 2012.</p> <p>15) 1 (satu) lembar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor 02/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Senin tanggal 7 November 2012.</p> <p>16) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 04/PPK – DPKAD/BAP/2011 pada hari Rabu tanggal 9 November 2011.</p> <p>17) 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Angsuran I sebesar (60%) dari harga kontrak sebagai mana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 dan sesuai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan sebesar Rp746.434.200,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).</p> <p>18) 4 (empat) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan (progres fisik) Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sebesar 65.000%.</p> <p>19) 1 (satu) set SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 32070 tanggal 21 Desember 2011 untuk Keperluan Belanja Langsung Pembayaran Angsuran I sebesar (30%) dari harga Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dhi. Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor</p>
--	---



	<p>01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 8 Agustus sebesar Rp1.224.057.000 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 04/PPK-DPKAD/ BAP/2011 tanggal 20 Desember 2011 sesuai dengan permintaan terlampir.</p> <p>20) 1 (satu) lembar disposisi SPM-LS pembayaran 30% pembangunan kantor SPM No.01/SPKK/PPK-DPKAD/VIII/ 2011.</p> <p>21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS sebesar Rp373.217.100,00;</p> <p>22) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/213/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 20 Desember 2011.</p> <p>23) 1 (satu) lembar Ringkasan Permintaan Pembayaran Uang Langsung Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/213/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 20 Desember 2011.</p> <p>24) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/213/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 20 Desember 2011.</p> <p>25) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor SPM 900/213/SPM-LS/2011 tanggal 9 November 2011 sebesar Rp373.217.100,00;</p> <p>26) 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Termin Nomor 02/CV.YD/XI/2011 tanggal 15 Desember 2011 oleh Wakil Direktur CV.YUDDI AGUNG atas nama RUDI AZHARI, S.E.</p> <p>27) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 05/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011.</p> <p>28) 1 (satu) lembar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor 06/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011.</p> <p>29) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 07/PPK-DPKAD/BAP/2011 pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011.</p> <p>30) 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Angsuran II sebesar (90%-60%) sama dengan 30% dari harga kontrak</p>
--	--



	<p>sebagai mana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 dan sesuai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan sebesar Rp373.217.100,00.</p> <p>31) 4 (empat) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan (progres fisik) Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sebesar 94.766%.</p> <p>32) 1 (satu) set SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 32329 tanggal 29 Desember 2011 untuk keperluan Belanja Langsung Pembayaran Angsuran I sebesar (95%) dari harga kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dhi. Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 8 Agustus sebesar Rp1.224.057.000,00 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 04/PPK-DPKAD/BAP/2011 tanggal 28 Desember 2011 sesuai dengan permintaan terlampir.</p> <p>33) 1 (satu) lembar lembaran disposisi SPM-LS pembayaran 5% pembangunan kantor SPM Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VIII/2011.</p> <p>34) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/239/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 28 Desember 2011.</p> <p>35) 1 (satu) lembar Ringkasan Permintaan Pembayaran Uang Langsung Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/239/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp62.202.850,00.</p> <p>36) 1 (satu) lembar rincian Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS sebesar Rp62.202.850,00.</p> <p>37) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/239/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp62.202.850,00.</p> <p>38) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Termyn Nomor 03/CV.YD/XI/2011 tanggal 21 Desember 2011 oleh Wakil Direktur CV.YUDDI AGUNG atas nama RUDI</p>
--	---



AZHARI, S.E.

- 39) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 8/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011.
- 40) 1 (satu) lembar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor 9/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011.
- 41) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 11/PPK-DPKAD/BAP/2011 pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011.
- 42) 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran sebesar (5%) dari harga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 dan sesuai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan sebesar Rp62.202.850,00.
- 43) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga pada hari Senin tanggal 14 Desember 2011.
- 44) 4 (empat) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan (progres fisik) Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sebesar 100.000%.
- 45) 1 (set) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 32330 tanggal 29 Desember 2011 untuk Keperluan Belanja Langsung Pembayaran sebesar (5%) dari harga kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 8 Agustus sebesar Rp1.224.057.000,00 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 15/PPK-DPKAD/BAP/2011 tanggal 29 Desember 2011 sesuai dengan permintaan terlampir.
- 46) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor SPM 903/240/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 28 Desember 2011.
- 47) 1 (satu) lembar Disposisi SPM-LS pembayaran 5% pembangunan kantor SPM Nomor 01/SPKK/PPK-

Hal.134 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



	<p>DPKAD/ VIII/ 2011.</p> <p>48) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 903/240/ SPP-LS-BJ/2011 tanggal 28 Desember 2011.</p> <p>49) 1 (satu) lembar Ringkasan Permintaan Pembayaran Uang Langsung Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/240/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 28 Desember 2011.</p> <p>50) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa 903/240/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 28 Desember 2011.</p> <p>51) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Termyn Nomor 04/CV.YD/XII/2011 tanggal Desember 2011 oleh Wakil Direktur CV.YUDDI AGUNG atas nama RUDI AZHARI, S.E.</p> <p>52) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 12/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2011.</p> <p>53) 1 (satu) lembar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor 13/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011.</p> <p>54) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 15/PPK– DPKAD/BAP/2011 pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011.</p> <p>55) 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Uang Retensi sebesar 5%) dari harga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 dan sesuai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan sebesar Rp62.202.850,00.</p> <p>56) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga pada hari Senin tanggal 14 Desember 2011.</p> <p>57) 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga oleh Jasaraharja</p>
--	--



	<p>Putra dengan nomor jaminan 15.06.05.2012.00007 senilai Rp62.202.850,00.</p> <p>58) 4 (empat) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan (progres fisik) Pembangunan Gedung Kantor Dhi Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sebesar 100.</p> <p>59) 4 (empat) buah dokumen foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun 2011.</p>
XIII.	<p>1) 4 (empat) lembar fotokopi Minut Akte Pemasukan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. YUDDI AGUNG Nomor 234 tanggal 30 Juni 2011.</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RUDI AZHARI, S.E.</p> <p>3) 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-187.HT.03.02-Th.2003 tentang Pengangkatan Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, S.H. yang dikeluarkan di Jakarta 14 Februari 2003 oleh atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Zulkarnain Yunus, S.H., M.H. Nip. 040034478.</p>
XIV.	<p>1) 1 (satu) buah Dokumen Asli Akte Pemasukan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Kominditer CV. Yuddi Agung Nomor 234 tanggal 30 Juni 2011 nama 1.Tuan Muchtar, 2.Tuan Azhari, 3.Tuan Rudi Azhari, S.E. yang dibuat oleh Notaris Pejabat Pembuat Akte Tanah Binsar Simanjuntak, S.H.</p> <p>2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan asli Rudi Azhari, S.E.</p>

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MDN tanggal 8 Februari 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 September 2016, Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, yang dimintakan banding;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MDN tanggal 8 Februari 2017 tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2017, Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MDN tanggal 8 Februari 2017 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Februari 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Februari 2017;

Memperhatikan Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 18/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 22 Maret 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, tidak mengajukan Memori Kasasi;

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 16 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Termohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MDN tanggal 8

Hal.137 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2017, namun sampai berakhir tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pernyataan kasasi yang ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyerahkan memori kasasi sebagaimana Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 18/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 22 Maret 2017, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 248 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka hak Terdakwa untuk mengajukan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MDN tanggal 8 Februari 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 17 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum berpendapat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Primair diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Penuntut Umum keberatan dengan alasan sebagai berikut:

Hal.138 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor 900/87/2011 tanggal 11 April 2011 menetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pengelola Keuangan dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Sibolga pada kegiatan pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor, perluasan gedung kantor Pada Tahun Anggaran 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.257.732.000,00 dan sebagai Penyedia barang adalah Rudi Azhari, S.E. selaku Wakil Direktru CV. Yuddi Agung (dilakukan dalam tuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku KPA dan PPK dalam persidangan tidak ada menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu meliputi Spesifikasi Teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak dan telah bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (1) huruf (a) Perpres Nomor 54 Tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa Agustinus Hutabarat selaku KPA dan PPK menerima hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Yuddi Agung tanpa terlebih dahulu adanya Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 95 Perpres Nomor 54 Tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa Agustinus Hutabarat, S.E. selaku KPA dan PPK tidak membentuk Tim Penerima Hasil Pekerjaan (*Finished Handeling Over-FHO*);
- Bahwa Terdakwa selaku KPA dan PPK tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan Tupoksinya seperti apa yang diterangkan oleh ahli LKPP dari Direktur permasalahan hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Ahmad Fery Tanjung, S.H., M.M., M.Kn, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Yuddi Agung tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sehingga pekerjaan tersebut terjadi kekurangan volume pekerjaan pada gedung DPKAD Kota Sibolga sesuai dengan apa yang telah diterangkan oleh Ahli Teknik dari Universitas Sumatera Utara Ir. Indra Jaya Pandia, M.T. sehingga pekerjaan yang dikerjakan oleh Rudi Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. Yuddi Agung terjadi kekurangan volume pekerjaan sehingga terjadilah kerugian negara/daerah Kota Sibolga sebesar Rp175.373.635,40 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga enam ratus tiga puluh lima empat puluh rupiah). Seperti yang diterangkan Ahli BPKP Provinsi Sumatera Utara Binez Simanjuntak, S.E., CfrA;
- Bahwa Terdakwa selaku KPA dan PPK bersama dengan Rudi Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. Yuddi Agung (dilakukan dalam penunutan

Hal.139 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) telah menyalahi aturan dan melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

- Bahwa benar atas kerugian negara dalam hal ini Pemko Sibolga telah dikembalikan oleh Rudi Azhari, S.E. selaku Wakil Direktur CV. Yuddi Agung pada saat telah dilakukan Penyidikan dan pada saat telah dilakukan Penuntutan namun kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa pengembalian kerugian negara adalah tidak menghapuskan pidananya sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999;
- Bahwa kami berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Penuntut Umum adalah terlalu ringan. Atas putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidaklah sepadan atas Kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang telah melakukan korupsi khususnya bagi Terdakwa selaku KPA dan PPK yang telah mengerjakan proyek Pemerintah, sehingga Negara dirugikan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak membentuk Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan, sehingga pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Saksi Rudi Azhari, S.E., Wakil Direktur CV. Yuddi Agung (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 8/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 menyatakan seluruh pekerjaan pembangunan gedung kantor telah selesai dikerjakan, tanpa ada masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan, sedangkan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan tersebut menjadi syarat Pencairan Keuangan ke rekanan pelaksana, sehingga rekanan pelaksana pekerjaan pembangunan ruang Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Asset Daerah (PKAD) Kota Sibolga telah menerima pembayaran 100 % walaupun

Hal.140 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya terdapat kekurangan material dan item yang tidak dikerjakan, akibatnya telah merugikan negara cq. Pemkot Sibolga sebesar Rp175.373.635,40 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima koma empat nol rupiah);

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan secara melawan hukum, dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi karena bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keangan Negara *juncto* Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu bertambahnya kekayaan Saudara Rudi Azhari sebesar Rp175.373.635,40 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima koma empat nol rupiah), dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah cukup terpenuhi;
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Rudi Azhari telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya, yaitu sebesar Rp175.373.635,40 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima koma empat nol rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatra Utara Nomor R-104/PW0-2/5/2014 tanggal 4 November 2014;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum cukup beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, melanggar

Hal.141 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan kepada Terdakwa oleh karena itu harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MDN tanggal 8 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 19 September 2016 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam membasmi tindak pidana korupsi di Indonesia;
- b. Perbuatan Terdakwa dapat berimbas pada terhambatnya percepatan pelayanan kepada masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dipidana;
- b. Terdakwa masih dalam usia produktif, masih ada kesempatan untuk memperbaiki perilakunya dan berperan serta dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **AGUSTINUS HUTABARAT, S.E.** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut;

Hal.142 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MDN tanggal 8 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 19 September 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS HUTABARAT, S.E.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

I.	<ol style="list-style-type: none">1) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Nomor 900/2572/2011 tentang Penghunjukan Asisten Teknik dan Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Sibolga pada tanggal 11 Juli 2011.2) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sibolga Nomor 01/SK/PPK-DPKAD/2011 tentang Penghunjukan Asisten Teknik dan Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Sibolga pada tanggal 11 Juli 2011.3) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 823.3/71/2004 tanggal 30 Januari
----	--

Hal.143 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



	2004 tentang Pengangkatan ADIRAM OMPUSUNGGU sebagai PNS.
II.	1) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 821.1.12/139/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Pengangkatan KARIAMAN WARUWU sebagai PNS.
III.	<p>1) 1 (satu) buah fotokopi dokumen yang dilegalisir beberapa Dokumen Pengadaan Nomor 34/DP-ULP/PU-DPUK/2011 tanggal 20 Juni 2011 untuk Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011.</p> <p>2) 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2011 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga dengan perincian;</p> <p>3) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 001/ULP/DPUK/2011 tanggal 23 Juni 2011 perihal Undangan Rapat ULP.</p> <p>4) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Hasil Rapat ULP Nomor 002/ULP/DPUK/2011 tanggal 24 Juni 2011.</p> <p>5) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 003/ULP/DPUK/2011 tanggal 24 Juni 2011 perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Rapat Panitia kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).</p> <p>6) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan Proyek.</p> <p>7) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 004/ULP/PU/PL-DPUK/2011 tanggal 24 Juni 2011 perihal Pengumuman Permohonan Penayangan Pengadaan Barang/Jasa kepada Sekretaris LPSE Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>8) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 004/ULP/DPUK/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi.</p>



- 9) 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 005/ULP/DPUK/2011 tanggal 01 Juli 2011 perihal Berita Acara Pemberian Penjelasan.
- 10) 1 (satu) fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Rapat Penjelasan (*aanzwizing*) pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2011 di Aula Kantor Dinas PU Kota Sibolga.
- 11) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir daftar rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen kualifikasi.
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 007/ULP/PU-DPUK/2011 tanggal 6 Juli 2011 perihal Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan.
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 008.a/ULP/PU-DPUK/2011 tanggal 7 Juli 2011 perihal Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran.
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 008.b/ULP/PU-DPUK/2011 tanggal 7 Juli 2011 perihal Berita Acara Pengunduran Pembukaan Dokumen Penawaran.
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 009/ULP/PU-DPUK/2011 tanggal 8 Juli 2011 perihal Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran pada tanggal 7 Juli 2011.
- 17) 1 (satu) set fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV.YUDDI AGUNG.
- 18) 1 (satu) set fotokopi yang dilegalisir koreksi aritmatik.
- 19) 1 (satu) set fotokopi Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor /ULP/DPUK/2011 pada tanggal Juli 2011.
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Pengumuman Pemenang dan Cadangan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 Nomor 014/ULP-DPUK/2011 tanggal 28 Juli 2011.
- 21) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat CV. ELLATEC DWIDAYA Nomor 14/CV.EDD/sangguh/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihal Sanggahan Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga.

Hal.145 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017



22)	1(satu) lembar fotokopi yang dilegalisir bukti tanda terima kiriman melalui kantor POS.
23)	1(satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 021/ULP/DPUK/2011 tanggal 4 Agustus 2011 perihal Jawaban Atas Sanggahan Pengumuman Nomor 014/ULP-DPUK/2011.
24)	4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 024/ULP/DPUK/2011 tanggal 19 Agustus 2011 perihal Laporan Akhir Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Yang Ditujukan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011.
25)	1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. ELLATEC DWIJAYA Nomor 060/CV-edd/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011.
26)	1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. MUBDI R.N Nomor 045/CV-M.R.N/SP/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.
27)	1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. KURNIA Nomor 060/CV-K/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.
28)	1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. MARULI ASIH Nomor 84/CV-MA/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.
29)	1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. YUDHI AGUNG Nomor 01/CV-YA/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011.
30)	1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. WAHANA KARYA INDONESIA Nomor - tanggal 6 Juli 2011.
31)	1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. SURYA INDONESIA BARU Nomor - tanggal 05 Juli 2011.
32)	1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan CV. CITRA BARU Nomor 10/CV-CV/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011.
33)	3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor 800/113-A-



	<p>DPUK/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2011.</p> <p>34) 5 (lima) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Walikota Sibolga Nomor 600/165/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Pengangkatan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011.</p> <p>35) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor 050902846528292 tanggal 13 Mei 2009 atas nama BASARULLAH LUBIS.</p> <p>36) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 821.12/ 3283.d/1986 tanggal 29 November 1996.</p>
IV.	<p>1) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 012/ ULP/DPUK/2011 pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011.</p> <p>2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 013/ULP/DPUK/2011 pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011.</p>
V.	<p>1) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 192/ UPS.1980 tanggal 11 Maret 1980 tentang Pengangkatan OESMAN HASIBUAN sebagai PNS.</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor 050902845528291 tanggal 13 Mei 2009 atas nama OESMAN HASIBUAN.</p>
VI.	<p>1) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 821.12/145/2007 tentang Pengangkatan BAHANI INDAH HAPSARI, A.Md sebagai PNS.</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor 050902870528310 tanggal 13 Mei 2009 atas nama BAHANI INDAH HAPSARI, A.Md.</p>
VII.	<p>1) 1 (satu) buah dokumen fotokopi yang dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 yang dibuat di Sibolga pada tanggal Maret 2011.</p> <p>2) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor 900/86/2011 tentang</p>



	<p>Penghunjukan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga tahun 2011 yang ditetapkan di Sibolga pada tanggal 11 April 2011.</p> <p>3) 7 (tujuh) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor 900/08/2011 tentang Penghunjukan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 yang ditetapkan di Sibolga pada tanggal 7 Februari 2011.</p> <p>4) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 428/UPO/1977 tanggal 04 Mei 1977 tentang Pengangkatan SORITUA HASIBUAN sebagai PNS.</p>
VIII.	<p>1) 4 (empat) lembar fotokopi dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan di Sibolga Pada tanggal 10 Maret 2011.</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sibolga Nomor 900/2287/2011 perihal Bantuan Panitia Pengadaan Yang Ditujukan Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga pada tanggal 20 Juni 2011.</p> <p>3) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Nomor 900/2462/2011 perihal Bantuan Personil sebagai PPTK dan Pengawas yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga pada tanggal 4 Juli 2011.</p> <p>4) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor 800/923.DPOK/2011 perihal Penyampaian Personil PPTK dan Pengawas yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah pada tanggal 06 Juli 2011.</p> <p>5) 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 824/56/2011 tentang Pengangkatan AGUSTINUS HUTABRAT, S.E. sebagai Pj. Kepala Bidang Asset dan Investasi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah</p>



	<p>Kota Sibolga yang ditetapkan di Sibolga tanggal 15 Maret 2011.</p> <p>6) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 813.2/883.D/95 Pengangkatan AGUSTINUS HUTABARAT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>7) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 821.12/516.D/1997 pengangkatan AGUSTINUS HUTABARAT sebagai Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>8) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 027/824/SJ tanggal 16 Maret 2011 perihal Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Walikota Sibolga Nomor 027/450/2011 tanggal 12 April 2011 perihal Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>10) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga Nomor 900/2284/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga atas nama Drs. SORITUA HASIBUAN yang ditetapkan di Sibolga pada tanggal 17 Juni 2011.</p> <p>11) 4 (empat) lembar Keputusan Walikota Sibolga Nomor 900/86/2011 tentang Penghunjukan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan di Sibolga pada tanggal 11 April 2011.</p> <p>12) 2 (dua) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang dan</p>
--	--



	<p>Cadangan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 014/ULP-DPUK/2011 yang ditetapkan di Sibolga pada tanggal 28 Juli 2011.</p> <p>13) 1 (satu) lembar Surat 01/SPPBJ/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 02 Agustus perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga yang ditujukan kepada Saudara RUDI AZHARI, S.E. (WAKIL DIREKTUR CV. YUDDI AGUNG).</p> <p>14) 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kontruksi (kontrak) Nomor 01/SPK/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dhi Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun 2011 biaya anggaran Rp1.244.057.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah).</p> <p>15) 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 01/SPMK/PPK-DPKAD/VIII/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen atas nama AGUSTINUS HUTABARAT, S.E. dengan Penyedia CV. YUDDI AGUNG atas nama RUDI AZHARI, S.E. (Wakil Direktur).</p> <p>16) 1 (satu) buah buku <i>Contrak Chage Order</i> (pekerjaan tambah kurang) Nomor 01/CCO/PPK-DPKAD/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun 2011.</p> <p>17) 1 (satu) buah AS BUILT DRAWING kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga.</p> <p>18) 1 (satu) buah Dokumen Laporan Harian dan Laporan Mingguan Dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dhi. Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga, Kontraktor CV. YUDDI AGUNG, Nomor Kontrak 01/SPKK/PPK-DPKAD/VIII/2011, Nomor C-C-O 01/CCO/PPK-DPKAD/VIII/2011 Tahun Anggaran 2011.</p> <p>19) 1 (satu) buah dokumen Foto Dokumentasi Pekerjaan</p>
--	---



	Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun 2011.
IX.	<p>1) 6 (enam) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Walikota Sibolga Nomor 900/40/2011 tentang Penghunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penghunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan di Sibolga pada tanggal 28 Februari 2011.</p> <p>2) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 823.3/26/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengangkatan M. ZUBIR sebagai PNS.</p>
X.	<p>1) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Nomor 900/844/2011 tentang Pemberhentian dan Penghunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 ditetapkan di Sibolga pada tanggal 15 Maret 2011 oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga atas nama SORITUA HASIBUAN.</p>
XI.	<p>1) 5 (lima) lembar fotokopi yang dilegalisir berupa Keputusan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sibolga Nomor 900/426/2011 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (PPTK-SKPD) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan di Sibolga pada tanggal 17 Februari 2011.</p> <p>2) 2 (dua) Lembar fotokopi yang dilegalisir berupa Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 823.3/26/2005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Pengangkatan RAHMAWATI SIREGAR, S.E. sebagai PNS.</p>
XII.	<p>1) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Walikota Sibolga Nomor 900/52.a/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Perubahan Penghunjukan Pejabat yang Menandatangani Cek Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung SKPP Gaji dan SP2D pada Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011.</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah</p>



	<p>Tugas Nomor 900/23451/2011 tanggal 01 Juli 2011.</p> <p>3) 12 (dua belas) lembar fotokopi yang dilegalisir Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Sibolga dengan PT. Bank Sumut tentang Penggunaan Aplikasi Kas Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Nomor 580/921/2011 dan Nomor 016/Dir/Dts-PDJ/SPj/2011 tanggal 01 Juli 2011.</p> <p>4) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 141/I-A/Peg/02/1992 tanggal 20 April 1992 kepada atas nama AMARULLAH GULTOM.</p> <p>5) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 824/56/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Pengangkatan AMARULLAH GULTOM menjadi Kepala Bidang Penganggaran dan Kuasa BUD Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga.</p> <p>6) 1 (satu) set SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 31580 tanggal 09 November 2011 untuk keperluan belanja langsung pembayaran angsuran I sebesar (60%) dari harga kontrak pekerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 08 Agustus sebesar Rp1.224.057.000,00 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 04/PPK-DPKAD/BAP/2011 tanggal 09 November 2011 sesuai dengan permintaan terlampir.</p> <p>7) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/131/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 8 November 2011.</p> <p>8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS sebesar Rp746.434.200 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).</p> <p>9) 1 (satu) lembar Ringkasan Permintaan Pembayaran Uang Langsung Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/131/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 8 November 2011.</p> <p>10) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/131/SPP-LS-</p>
--	--



	<p>BJ/2011 tanggal 8 November 2011.</p> <p>11) 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan tanggal 9 November 2011 atas nama ROSINTAN NAIBAHO NIP 19600830 198002 2 001.</p> <p>12) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor SPM 900/131/SPM-LS/2011 tanggal 9 November 2011 sebesar Rp746.434.200,00.</p> <p>13) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Termin Nomor 01/CV.YD/XI/2011 tanggal 3 November 2011 oleh Wakil Direktur CV. YUDDI AGUNG atas nama RUDI AZHARI, S.E.</p> <p>14) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 02/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Jumat tanggal 4 November 2012.</p> <p>15) 1 (satu) lembar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor 02/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Senin tanggal 7 November 2012.</p> <p>16) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 04/PPK – DPKAD/BAP/2011 pada hari Rabu tanggal 9 November 2011.</p> <p>17) 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Angsuran I sebesar (60%) dari harga kontrak sebagai mana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 dan sesuai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan sebesar Rp746.434.200,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).</p> <p>18) 4 (empat) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan (progres fisik) Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sebesar 65.000%.</p> <p>19) 1 (satu) set SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 32070 tanggal 21 Desember 2011 untuk Keperluan Belanja Langsung Pembayaran Angsuran I sebesar (30%) dari harga Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dhi. Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor</p>
--	---



	<p>01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 8 Agustus sebesar Rp1.224.057.000 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 04/PPK-DPKAD/ BAP/2011 tanggal 20 Desember 2011 sesuai dengan permintaan terlampir.</p> <p>20) 1 (satu) lembar disposisi SPM-LS pembayaran 30% pembangunan kantor SPM No.01/SPKK/PPK-DPKAD/VIII/ 2011.</p> <p>21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS sebesar Rp373.217.100,00;</p> <p>22) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/213/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 20 Desember 2011.</p> <p>23) 1 (satu) lembar Ringkasan Permintaan Pembayaran Uang Langsung Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/213/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 20 Desember 2011.</p> <p>24) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/213/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 20 Desember 2011.</p> <p>25) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor SPM 900/213/SPM-LS/2011 tanggal 9 November 2011 sebesar Rp373.217.100,00;</p> <p>26) 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Termin Nomor 02/CV.YD/XI/2011 tanggal 15 Desember 2011 oleh Wakil Direktur CV.YUDDI AGUNG atas nama RUDI AZHARI, S.E.</p> <p>27) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 05/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011.</p> <p>28) 1 (satu) lembar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor 06/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011.</p> <p>29) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 07/PPK-DPKAD/BAP/2011 pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011.</p> <p>30) 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Angsuran II sebesar (90%-60%) sama dengan 30% dari harga kontrak</p>
--	--



	<p>sebagai mana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 dan sesuai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan sebesar Rp373.217.100,00.</p> <p>31) 4 (empat) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan (progres fisik) Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sebesar 94.766%.</p> <p>32) 1 (satu) set SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 32329 tanggal 29 Desember 2011 untuk keperluan Belanja Langsung Pembayaran Angsuran I sebesar (95%) dari harga kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dhi. Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 8 Agustus sebesar Rp1.224.057.000,00 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 04/PPK-DPKAD/BAP/2011 tanggal 28 Desember 2011 sesuai dengan permintaan terlampir.</p> <p>33) 1 (satu) lembar lembaran disposisi SPM-LS pembayaran 5% pembangunan kantor SPM Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VIII/2011.</p> <p>34) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/239/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 28 Desember 2011.</p> <p>35) 1 (satu) lembar Ringkasan Permintaan Pembayaran Uang Langsung Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/239/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp62.202.850,00.</p> <p>36) 1 (satu) lembar rincian Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS sebesar Rp62.202.850,00.</p> <p>37) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/239/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp62.202.850,00.</p> <p>38) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Termyn Nomor 03/CV.YD/XI/2011 tanggal 21 Desember 2011 oleh Wakil Direktur CV.YUDDI AGUNG atas nama RUDI</p>
--	---



AZHARI, S.E.

- 39) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 8/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011.
- 40) 1 (satu) lembar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor 9/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011.
- 41) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 11/PPK-DPKAD/BAP/2011 pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011.
- 42) 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran sebesar (5%) dari harga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 dan sesuai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan sebesar Rp62.202.850,00.
- 43) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga pada hari Senin tanggal 14 Desember 2011.
- 44) 4 (empat) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan (progres fisik) Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sebesar 100.000%.
- 45) 1 (set) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 32330 tanggal 29 Desember 2011 untuk Keperluan Belanja Langsung Pembayaran sebesar (5%) dari harga kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 8 Agustus sebesar Rp1.224.057.000,00 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 15/PPK-DPKAD/BAP/2011 tanggal 29 Desember 2011 sesuai dengan permintaan terlampir.
- 46) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor SPM 903/240/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 28 Desember 2011.
- 47) 1 (satu) lembar Disposisi SPM-LS pembayaran 5% pembangunan kantor SPM Nomor 01/SPKK/PPK-



	<p>DPKAD/ VIII/ 2011.</p> <p>48) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 903/240/ SPP-LS-BJ/2011 tanggal 28 Desember 2011.</p> <p>49) 1 (satu) lembar Ringkasan Permintaan Pembayaran Uang Langsung Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) 903/240/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 28 Desember 2011.</p> <p>50) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa 903/240/SPP-LS-BJ/2011 tanggal 28 Desember 2011.</p> <p>51) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Termyn Nomor 04/CV.YD/XII/2011 tanggal Desember 2011 oleh Wakil Direktur CV.YUDDI AGUNG atas nama RUDI AZHARI, S.E.</p> <p>52) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 12/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2011.</p> <p>53) 1 (satu) lembar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor 13/PPK-DPKAD/BAHPL/2011 pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011.</p> <p>54) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 15/PPK–DPKAD/BAP/2011 pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011.</p> <p>55) 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Uang Retensi sebesar 5%) dari harga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 01/SPKK/PPK-DPKAD/VII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 dan sesuai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan sebesar Rp62.202.850,00.</p> <p>56) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga pada hari Senin tanggal 14 Desember 2011.</p> <p>57) 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga oleh Jasaraharja</p>
--	---



	<p>Putra dengan nomor jaminan 15.06.05.2012.00007 senilai Rp62.202.850,00.</p> <p>58) 4 (empat) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan (progres fisik) Pembangunan Gedung Kantor Dhi Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga sebesar 100.</p> <p>59) 4 (empat) buah dokumen foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dalam hal ini Penambahan Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun 2011.</p>
XIII.	<p>1) 4 (empat) lembar fotokopi Minut Akte Pemasukan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. YUDDI AGUNG Nomor 234 tanggal 30 Juni 2011.</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RUDI AZHARI, S.E.</p> <p>3) 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-187.HT.03.02-Th.2003 tentang Pengangkatan Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, S.H. yang dikeluarkan di Jakarta 14 Februari 2003 oleh atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Zulkarnain Yunus, S.H., M.H. Nip. 040034478.</p>
XIV.	<p>1) 1 (satu) buah Dokumen Asli Akte Pemasukan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Kominditer CV. Yuddi Agung Nomor 234 tanggal 30 Juni 2011 nama 1.Tuan Muchtar, 2.Tuan Azhari, 3.Tuan Rudi Azhari, S.E. yang dibuat oleh Notaris Pejabat Pembuat Akte Tanah Binsar Simanjuntak, S.H.</p> <p>2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan asli Rudi Azhari, S.E.</p>

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 21 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.
ttd./ MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal.159 dari 172 hal. Put. No.1280 K/Pid.Sus/2017